

PANGCASILA

Filsafat Multikultural Untuk Memahami Negara-Bangsa



Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.

PANCASILA

Filsafat Multikultural
Untuk Memahami Negara-Bangsa

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.

PANCASILA

Filsafat Multikultural Untuk Memahami Negara-Bangsa

Penulis:

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.

Copyright © 2023
ISBN 978-623-7692-75-1

Diterbitkan Oleh:

CV. Saga Jawadwipa
Pustaka Saga

Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima 4A, Surabaya
Email: saga.penerbit@gmail.com HP: 085655396657

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini dibuat untuk membantu mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pancasila, berdasarkan pengalaman Penulis mengajar dan menguji Ujian Negara Pancasila di beberapa jurusan/ program studi di Universitas Kristen Petra Surabaya.

Pada bagian awal dijelaskan filsafat multikultural bertumpu pada pendekatan filosofi Brian Fay. Selanjutnya Filsafat Pancasila sesuai kerangka yang dibuat Koento Wibisono. Kemajemukan masyarakat diuraikan berdasarkan hasil kajian Rabuskha dan Shepsle. Bagian akhir tentang negara-bangsa bertumpu pada pemikiran Anthony Giddens.

Semoga buku ini bermanfaat.

Surabaya, 17 Maret 2023.

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iii

DAFTAR ISI | iv

1. Filsafat | 1
 1. Pendahuluan | 1
 2. Filsafat | 1
2. Filsafat Pancasila | 18
 1. Pancasila | 18
 2. Pancasila Dasar Negara | 20
 3. Dasar Politik Pancasila | 23
 4. Dasar Moral Pancasila | 26
3. Kemajemukan Masyarakat | 29
 1. Kerjasama Etnis Pra-Kemerdekaan | 29
 2. Kerjasama Etnis Pasca-Kemerdekaan: Ambiguitas | 31
 3. Menuntut Generasi dan Pentingnya Etnisitas yang Meningkatkan | 36
 4. Kalah dan Merosotnya Koalisi Multi-Etnis | 39
 5. Intrik Elektoris dan Kekerasan | 45
 6. Masyarakat Plural: Beberapa Variasi | 48
4. Negara Bangsa | 59
 1. Pendahuluan | 59
 2. Totalitarianisme | 61
 3. Unsur-Unsur Pemerintahan | 75
 4. Dimensi modernitas | 87

DAFTAR REFERENSI | 127

RIWAYAT HIDUP | 128

1. Filsafat

1. Pendahuluan

Pancasila merupakan mata pelajaran yang diajarkan sejak bangku pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Untuk perguruan tinggi Pancasila diajarkan secara filosofis.

Ada beberapa istilah yang digunakan yaitu Pancasila, Pendidikan Pancasila, dan Filsafat Pancasila.

Tulisan-tulisan yang bertalian dengan Pancasila sudah cukup banyak beredar. Namun tulisan yang bertalian dengan Filsafat Pancasila sangatlah terbatas. Apalagi filsafat, yang benar-benar secara filosofi sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultur sangatlah terbatas atau belum ada. Oleh karena itu tulisan ini dibuat agar mahasiswa memahami filsafat multikultural dan konsep negara - bangsa untuk meneropong ideologi Pancasila di tengah masyarakat dunia yang semakin global.

2. Filsafat*)

Tulisan ini mengadakan pendekatan terhadap filosofi ilmu sosial dengan sebuah cara baru, cara yang memusatkan pada pengalaman dalam menempati dunia ini dimana masyarakat secara signifikan berbeda satu dengan yang lain. Pendekatan ini lebih baik disebut dengan yang lain. Pendekatan ini lebih baik disebut dengan "Multikultural", karena sifatnya yang mengandung multikulturalisme yang mengarahkan perhatian kepada

segala kesempatan dan bahaya dari perbedaan-perbedaan yang ada di dunia. Sebuah filosofi multikultural dari ilmu sosial yang membentuk pertanyaan-pertanyaan baru dan menggunakan konsep-konsep baru dalam menghadapi isu yang terdapat dalam ilmu yang mempelajari tentang manusia; filosofi tersebut juga mendudukan pertanyaan-pertanyaan dan konsep-konsep lama dalam filosofi ilmu sosial pada sebuah cahaya baru.

Mengapakah ada kebutuhan terhadap sebuah filosofi ilmu sosial yang baru? Hampir sepanjang sejarahnya, pertanyaan mendasar dalam filosofi ilmu sosial hanyalah : apakah ilmu sosial itu alamiah, atau dapatkah ilmu sosial tersebut alamiah? Para ilmuwan sosial telah secara historis butuh untuk mendapatkan jubah ilmu dan telah membentuk penelitian mereka terhadap ilmu-ilmu pengetahuan alam. Konsekuensinya filosofi ilmu sosial tersebut secara tradisional mendasarkan diri pada penilaian keberhasilan ilmu sosial dalam segala kebaikannya, dengan cara dimana ilmu sosial itu seperti atau tidak seperti ilmu-ilmu pengetahuan alam. Namun demikian, walaupun pendekatan ini telah menghasilkan masa depan yang penting pada studi tentang makhluk hidup, yang tidak lama lagi akan, dapat mengontrol filosof atau praktisi ilmu sosial. Beberapa pendekatan baru lebih menyentuh lagi kepada perhatian budaya dan intelektual dewasa ini sedang dibutuhkan.

Sebuah pertanyaan tentang kedudukan ilmiah dari penelitian - penelitian sosial telah kehabisan daya dorong karena beberapa ilmu pengetahuan alam tidak bisa bertahan dalam menghasilkan semacam referensi seperti

yang pernah dilakukannya. Anggapan bahwa ilmu pengetahuan alam itu standard bagi semua usaha kognitif tercermin dalam beberapa filosofi terdahulu tentang penelitian sosial. Namun dalam iklim intelektual ilmu pengetahuan alam sekarang telah kehilangan posisi yang menguntungkan. Alasannya sangat kompleks : hal tersebut melibatkan kesalahan pemerintah dan industri dalam menjalankan *Big Science* seperti pembuatan senjata nuklir; bahaya-bahaya dari teknologi yang terinspirasi oleh ilmu pengetahuan alam, bahaya yang menghantui kehancuran ekologi; penyebaran kesadaran akan, bentuk alternatif pengetahuan; dan semacam gambaran yang tidak terinspirasi dari ilmu- ilmu yang menjelaskan tentang keberadaan manusia dalam sebuah dunia yang dingin dan rata. Tetapi secara filosofi akhir dari ilmu sebagai paradigma aktifitas intelektual itu terikat pada kematian positivism dan keberadaan perpectivism yang terkait.

Kita akan membahas positivism dan perpectivism lebih detail dalam tulisan ini, karena salah satu dari tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk mengukur sisa perhatian dan meningkatkannya dengan perspectivism. Pada titik ini cukuplah dengan mengatakan bahwa kebalikannya dengan positivism yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai metode *par excellence* dalam melihat 'kenyataan' secara langsung, perspectivism menyatakan kalau setiap usaha *epistemic* -termasuk ilmu pengetahuan-muncul dari sebuah sudut pandang yang terbagi oleh komitmen dan interes terhadap intelektual dan politis mereka sendiri. Berdasarkan perspectivism kita tidak dapat melihat segala hal 'secara langsung', hanya sejumlah

kecil dari semua 'kenyataan'. Semua penglihatan merupakan penglihatan dari sebuah perspective tertentu. Bahkan dalam ilmu pengetahuan alam pengaruh sudut pandang teori dan budaya sekarang ini terlihat tidak dapat dipertanyakan.

Bagi beberapa orang, *perspectivism* hanyalah sebuah titik tengah sebuah perjalanan dari *positivism* ke *relativism*. Karena setiap bentuk kognisi perlu muncul dalam *perspective* tertentu, *relativism* menganggap bahwa tidak ada dasar rasional yang muncul untuk menilai apakah *perspective* satu itu lebih baik dari *perspective* yang lain. Misalnya, hampir semua orang Euro-American dapat menganggap pengobatan barat itu lebih baik dari *voodoo* dalam mengobati penyakit. Tapi hal ini dilakukan pada tingkatan dasar dari beberapa kriteria penilaian yang netral. Kriteria yang dilakukan untuk menilai kepercayaan dan aksi itu tergantung dengan sendirinya pada *perspective* yang lebih luas; lalu untuk mengukuhkan keberadaan pengobatan barat semua yang telah dikatakan adalah bahwa pengobatan itu lebih cocok diterapkan dengan konsep dan pandangan Euro-American dari pada *voodoo* (tentu tidak mengejutkan karena diucapkan dalam kerangka mereka sendiri!). Dari segi lain, dalam sudut pandangan yang kurang ilmiah, *voodoo* mungkin lebih disukai.

Dalam pandangan para penganut *relativism*, ilmu pengetahuan hanyalah satu dari sejumlah *perspective* yang memungkinkan, tidaklah lebih buruk tapi tentulah tidak lebih baik dari yang lain. Sebenarnya, ilmu pengetahuan alam adalah pendekatan yang lebih disukai di 'Barat'

dimana didalamnya terkumpul hegemoni dan terdapat beberapa alternative. Namun hal ini hanya menunjukkan kalau di Barat nilai sebuah keberhasilan bisa dibuat memungkinkan dengan adanya ilmu pengetahuan (khususnya, pengawasan tehnik oleh alam). Tapi hal ini tidak membuktikan kalau ilmu pengetahuan secara alami menjadi yang paling baik sebagai sebuah jalan untuk mencari pengetahuan.

Relativism menggoyahkan bangunan ilmu pengetahuan yang tradisional dengan *statement* mereka terhadap 'kekhususan'. Hal itu juga menjatuhkan kepercayaan dalam ilmu pengetahuan dengan caranya yang lain. Relativism membangun sebuah apresiasi yang tajam bagi kekuatan politik yang berperan dalam menentukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan termasuk kerangka kerja dimana kita berada. (Ini adalah Gramsci (1971) dan Foucault (1977 dan 1981) dimana peran mereka sangat penting). Hal ini bukanlah kebetulan. Karena perubahan-perubahan dari satu kerangka berfikir ke bentuk yang lain tidak dapat ditentukan secara rasional, perubahan itu pasti mengakibatkan dan dilaksanakan dengan cara-cara yang lebih rasional. Oleh karena itu, penganut faham positivism bisa berfikir bahwa para ilmuwan itu mempunyai kekuasaan karena ide-idenya hampir selalu benar (atau menjadi kenyataan), atau karena mereka menerapkan sebuah metode dalam mencapai kebenaran. Namun demikian, karena kita tahu bahwa ukuran nilai kebenaran harus muncul dalam sebuah perspective yang diberikan, pertanyaannya akan berubah menjadi mengapa satu perspective lebih dominan dari

yang lain; dan karena perspective-perspective itu tidak dapat dipandang benar atau lebih baik tanpa memasukkan kriteria nilai dari perspective-perspective tersebut di dalam sebuah perspective tersendiri, yang menyebabkan perspective lain dapat memenuhi kriteria nilai dalam sebuah karya. Inilah alasan mengapa beberapa studi tentang ilmu pengetahuan sekarang ini memusatkan diri pada mekanisme yang lebih rasional dimana ilmiah ortodoks itu dilaksanakan. Kemudian bagi para penganut relativism 'hegemony' ilmu pengetahuan (menggunakan istilah Gramsci) menunjukkan bahwa bukan intelektualnya yang dominan tapi kekuatan kelompok tertentu yang menguasai institusi intelektual dan politik.

Sorotan terhadap konsentrasi kekuatan ini terletak pada pancaran ilmu pengetahuan yang dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam relativism yang ekstrem, sedikit sekali bahkan tidak ada perbedaan antara ilmu pengetahuan dan propaganda; tapi, bahkan dalam komitmen dasar relativism yang moderat, termasuk komitmen ilmu pengetahuan, perlu untuk tidak rasional. Namun hal ini menyebabkan usaha pembentukan apakah penelitian sosial itu dapat menjadi atau seperti ilmu pengetahuan alam sebuah usaha yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan alam adalah model dari aktivitas rasional tidaklah berguna.

Dengan cara ini relativism secara radikal telah menggoyahkan kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan alam dapat menghasilkan gambaran yang benar tentang dunia secara fisik, lebih kurang memberikan model bagi

pengetahuan yang terkait tentang dunia manusia. Sebenarnya, relativism telah menyeret pemikiran-pemikiran seperti sebuah kebenaran dan penerang yang terkait kedalam ketidakpastian. Sebagai hasilnya, kekhawatiran dengan masalah-masalah relativism telah mengganti perhatian dengan suatu sifat ilmiah dari ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan.

Bagi para pengikutnya relativism adalah sebuah 'Hal yang Baik' (paling tidak dari perspective modern Euro-American). Di posisi pertama relativism menyediakan cara bagaimana kita berbicara tentang orang lain yang berbeda dengan kita dan kemudian menyontoh kita dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Karena kita semua melihat dan hidup di dunia ini dari dalam kerangka kerja kita sendiri, yang lain harus mengalami 'Kenyataan' dengan cara yang berbeda dengan cara kita. Dalam cara ini relativism dimaksudkan untuk menjaga kita dari *ethnocentrisme* (sebuah pandangan yang memandang setiap orang seperti kita). Di posisi yang kedua, karena kita tidak punya dasar yang independen untuk mengkritik cara orang lain dalam berfikir atau bertindak, sikap kita seharusnya lebih toleran dan memberikan penghargaan dari pada sikap menghukumi yang cenderung menyalahkan pemikiran orang lain. Pada cara ini relativism dimaksudkan untuk menjaga kita dari *chauvinisme*.

Dengan cara ini relativism membangkitkan "multikulturalisme". Istilah "multikulturalisme" telah menjadi sebuah slogan yang trendi. Hal ini tidak menguntungkan karena Multikulturalisme mengandung

arti sesuatu yang krusial dalam dunia yang kontemporer ini : bahwa setiap orang berbeda dengan yang lain, saling berinteraksi dan, harusnya, berhubungan satu sama lain. Semua penganut multikulturalisme memfokuskan pada pemahaman dan hidup dengan budaya dan sosial yang berbeda; tapi di atas semua itu ada komitmen yang agak lemah terhadap multikulturalisme yang merupakan topik yang diperdebatkan dengan kerasnya. Versi yang paling umum adalah apa yang disebut dengan “*the celebration of difference*”; dalam pandangan ini perbedaan-perbedaan diantara kelompok manusia yang bervariasi seharusnya ditonjolkan dan dihargai.

Multikulturalisme begitu menghargai dalam meletakkan masalah-masalah penting bagi studi tentang makhluk hidup. Saya akan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Menurut pemahaman Multikulturalisme yang menikmati perbedaan sosial dan budaya, setiap masyarakat atau budaya adalah unit tunggal yang terpisah dari unit-unit yang lain oleh batas-batas yang memisahkannya karena perbedaannya dengan yang lain. Lebih dari itu, setiap pribadi adalah cerminan. Unit budaya dan sosial dimana mereka berasal. Identitas pribadi ditentukan oleh satuan budaya dan sosial dimana para anggotanya telah menyatu dan bersosialisasi.

Karena mereka berbeda, unit budaya dan sosial ini sering berbenturan dengan yang lain; sebenarnya, beberapa dari mereka dengan cara yang bisa ditebak akan berusaha menggoyahkan atau menguasai yang lain. Unit-unit yang kuat berusaha memerintah yang lemah, dan pada akhirnya berusaha membuat yang lemah menjadi

seperti yang kuat. Selanjutnya jika mereka berhasil mereka akan menghapuskan perbedaan yang ada dalam kelompok tersebut. Dorongan alam dalam dunia yang berbeda ini kemudian mengarah pada penghapusan perbedaan-perbedaan tersebut.

Multikulturalisme yang dipandang sebagai upaya untuk menikmati perbedaan adalah merupakan respon dorongan alam ini. Multikulturalisme ini bertahan pada integritas sosial dan budaya dan pada penghargaannya terhadap integritas yang lain. Multikulturalisme menyarankan setiap kelompok untuk mencari dan menjaga pusat kelompok itu dan pada saat yang sama mengenali dan membantu usaha mereka pada unit yang berbeda untuk melakukan hal yang sama. Masing-masing dari kita hidup dalam sebuah kerangka kerja dimana kita hidup bersama dalam jumlah yang terbatas dan kerangka tersebut berbeda dengan yang lain. Dalam pandangan ini tugas kita adalah menyadari dan menikmati kenyataan ini memberikan penghargaan bagi warna dan bentuk kehidupan manusia di planet ini.

Tapi Multikulturalisme memandang masalah *epistemic* : jika yang lain hidup dalam kerangka mereka sendiri dan kita dalam kerangka kerja kita, bagaimana kita dapat mengerti mereka ? Kita berfikir dan bertindak dalam kerangka kerja kita sedangkan mereka dalam kerangka mereka sendiri, sehingga kita dipaksa untuk menganggap mereka dalam kondisi yang lain. Lebih jauh lagi karena kondisi mereka secara fundamental berbeda dengan kita, hal itu muncul kalau kita tidak dapat mengerti mereka. Dunia yang multikultural yang menekankan etnik, gender,

rasial, agama, kelas, dan perbedaan budaya dimana orang-orang dengan giat menemukan dan melindungi kekhususan mereka menimbulkan perpecahan dalam pengetahuan sosial. Akhirnya dapat dikatakan bahwa hanya masyarakat dari satu macam saja yang dapat mengetahui masyarakat dari macamnya sendiri. Hanya wanita yang memahami wanita lain; hanya African-American yang dapat memahami African-American. Secara singkat, Multikulturalisme muncul untuk membawa orang memahami yang lain.

Namun hal ini berarti bahwa penelitian sosial dapat diatur walaupun dengan cara kasar. Misalnya hanya wanita saja yang dapat menulis tentang wanita atau menilai apa yang ditulis tentang wanita (dan hal yang sama berlaku juga bagi Katolik, kaum Azande, homoseksual, dan lain-lain), ide tentang sebuah komunitas terbuka dari kaum akademisi yang terlibat dalam dialog tentang kenyataan publik itu secara total ditiadakan.

Multikulturalisme dipahami sebagai upaya menikmati perbedaan dan sebagai relativisme dibaliknya menimbulkan tantangan mendasar bagi pertanyaan untuk saling dimengerti. Hal ini mengganggu sekali bagi Multikulturalisme dan relativisme mereka sendiri. kekuatan ide ini tergantung pada kemampuan memahami bagaimana caranya manusia itu bisa berbeda. Tapi jika implikasi mereka terhadap pemahaman itu tidak memungkinkan, lantas mereka akan terbawa pada kehancuran mereka sendiri. Sebagai cerminan multikulturalisme dan relativisme muncul sebagai usaha mengalahkan diri sendiri.

Dengan adanya dorongan Multikulturalisme dan relativisme dalam kehidupan intelektual dan politikan yang kontemporer, dan adanya masalah-masalah mereka muncul berdasarkan kemungkinan akan pemahaman terhadap sesama, pertanyaan mendasar dari filosofi ilmu pengetahuan sosial sekarang ini seharusnya bukan apakah penelitian sosial itu ilmiah; tapi seharusnya malah apakah pemahaman terhadap sesama khususnya mereka yang berbeda itu memungkinkan, dan jika ya, pemahaman seperti apa yang tercakup. Inilah yang menjadi pertanyaan utama dari tulisan ini.

Dengan memberikan kerangka bagi pertanyaan utama dari filosofi ilmu pengetahuan sosial dengan cara tersebut topik-topik tertentu di bidang ini seperti hubungan antara alasan dan akibat; sifat dari suatu arti; karakter dari interpretasi dan hubungannya pada penjelasan kausal; peranan hukum-hukum ilmu sosial; kemungkinan objektivitas mengandung sebuah suasana yang mendesak. Tapi yang lebih penting, pertanyaan-pertanyaan baru dan cara-cara baru yang berkenaan dengan hal itu muncul. Khususnya, pertanyaan tentang apa maksudnya memahami orang lain; tentang 'sebuah/suatu' diri dan hubungannya dengan yang lain; tentang sifat budaya manusia dan sosialnya; tentang relativisme itu sendiri; tentang rasionalitas dan kemudahan untuk dimengerti; tentang kompleksitas dari pemahaman budaya asing; dan tentang peranan masa lampau pada pemahaman masa sekarang ini mengarah pada pusat masalah dalam penelitian mengenai penelitian sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini sering tidak ditemukan dalam disertasi atau karya tulis di bidang

filosofi ilmu pengetahuan sosial, atau sering diturunkan pada peranan sekunder. Perdebatan utama dalam buku ini adalah bahwa sekarang ini mereka harus dipusatkan pada suatu disiplin.

Tulisan ini berusaha membentuk keadaan hidup kita dalam dunia yang multikultural dibawah pengaruh relativisme. Setiap pertanyaan yang cenderung muncul dari pengalaman multikultural dan yang memunculkan persoalan filosofis yang penting. Misalnya, menanyakan, “Apakah anda harus menjadi orang yang tahu orang lain?” Pertanyaan ini memunculkan pengalaman multikultural yang berbeda; jika saya dan kelompok saya hidup dan berfikir dengan cara kami yang berbeda, bagaimana saya atau kami dapat ‘benar-benar tahu’ mereka dari kelompok lain yang hidup dan berfikir dengan cara mereka yang berbeda? Mungkin hanya mereka yang berasal dari kelompok kami yang dapat benar-benar tahu apa yang tergolong kelompok kami; mungkin, kemudian, seseorang harus menjadi orang yang mengerti orang lain? Contoh lain adalah pertanyaan; “Apakah budaya kita atau lingkungan sosial kita membuat kita menjadi seperti kita ini?” Pertanyaan ini memunculkan refleksi sederhana dari pengalaman multikultural ; jika saya berbeda dengan yang lain karena saya milik sekelompok yang berbeda dari yang lainnya, lantas apakah identitas saya secara esensial berfungsi sebagai tanda anggota kelompok saya? Saya harap hal ini akan menjadi jelas jika pertanyaan yang terfokus pada pengalaman multikultural. Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk sebuah agenda bagi sebuah filosofi multikultural dari ilmu pengetahuan sosial dimana

pertanyaan-pertanyaan mengenai status sosial dalam ilmu pengetahuan sosial membentuk agenda bagi filosofi ilmu pengetahuan sosial yang lebih dahulu. Paling tidak dalam, contoh pertama pernyataan yang menanyakan apakah filosofi ilmu pengetahuan itu multikultural.

Dengan dimulai dengan sebuah pertanyaan, kemudian menampilkan sebuah doktrin (sebuah 'isme') yang menjawab pertanyaan. Setiap doktrin dimaksudkan untuk membentuk intuisi multikultural yang kontemporer. Kemudian, doktrin solipsisme bahwa hanya saya (mungkin juga yang lain seperti saya) dapat mengerti saya dimaksudkan untuk mengungkapkan perasaan yang hanya dapat dimengerti oleh orang yang mempunyai pengalaman dan latar belakang yang 'benar- benar tahu' satu sama lain, sebuah perasaan yang muncul karena pengalaman multikultural yang berbeda. Atau sekali lagi, doktrin holisme bahwa setiap pribadi secara eksklusif merupakan fungsi dari tempat mereka dari kelompok sosial atau merupakan sistem arti yang lebih luas cenderung menyuarakan ide bahwa saya adalah siapa saya dan apa saya yang ditentukan oleh kebaikan kelompok dimana saya telah bersosialisasi atau bercampur, sebuah ide yang muncul oleh apresiasi saya tentang bagaimana saya berbeda dengan yang lain dari kelompok lain. Filosofi ilmu pengetahuan sosial, bersifat multikultural karena doktrin yang dipercayanya. (Silahkan catat bahwa beberapa 'isme' yang dibahas telah menjadi umum bahasan yang umum dalam ilmu pengetahuan sosial dan filosofi ilmu pengetahuan sosial itu). Tapi telaah hal itu mengandung arti yang berbeda bagi beberapa orang yang

berbeda kadang-kadang apa yang saya artikan dengan doktrin tidak sama dengan apa yang dimaksud penulis lain. Konsekuensinya saya secara jelas membagi doktrin-doktrin sehingga mempunyai arti khusus dalam teks ini; juga saya kadang kala menunjuk arti lain yang mungkin ada, dan kepada buku lain dimana arti-arti yang lain itu mungkin ditemukan. Dalam definisi saya telah berusaha untuk menyaring apa yang diambil sebagai pusat sebuah doktrin, dengan meninggalkan bentuk-bentuknya yang lebih baik untuk karya-karya lain yang mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda dengan karya yang ada di tulisan ini. Kadang-kadang hal ini dapat mendorong sebuah doktrin untuk mengutarakan bahwa doktrin itu telah diwarnai; tapi resiko dari tuntutan itu adalah menjadi lebih banyak pengumpulan penjelasan terhadap aembuatan metode saya).

Dengan memulai sebuah pertanyaan dan sebuah doktrin yang menjawab pertanyaan ini yang keduanya muncul dari pengalaman multikultural, kemudian membahas mana yang salah dan mana yang benar dari doktrin khusus itu. Secara umum, analisa - analisa menunjukkan bahwa 'isme-isme' tidaklah terlalu salah dari satu sisi, bahwa sebuah pandangan yang lebih menyeluruh perlu diambil baik dalam 'isme' maupun kritikiannya, dan bahwa ketika hal ini dilakukan anggapan yang ada dibalik pertanyaan-pertanyaan bersifat problematik. Sorotan yang dilakukan untuk menggoyahkan pertanyaan-pertanyaan ini dan intuisi yang mendukungnya.

Pada semua bagian tulisan ini berpendapat kalau

relativisme dalam bentuk-bentuknya yang kuat, dan multikulturalisme dipahami sebagai upaya menikmati perbedaan, adalah sebuah ketidak benaran walaupun tidak semuanya termasuk salah. Yaitu, sesuatu yang dianggap benar menurut relativisme dan multikulturalisme yang dimengerti namun doktrin yang tersusun secara normal ini terbatas dan hanya satu sisi saja; konsekuensinya doktrin-doktrin ini perlu untuk difikirkan kembali. Oleh karena itu, bagian dari tulisan ini merupakan pendefinisian kembali dari relativisme dan multikulturalisme.

Konsepsi relativisme dan multikulturalisme sekarang ini menekankan perbedaan, integritas budaya, dan bertentangan dengan dominasi budaya; mereka berfikir dalam kategori dualistik tentang ‘diri’ vs yang lain’; ‘kami’ vs ‘mereka’; ‘kesamaan’ vs ‘perbedaan’; ‘asimilasi’ vs ‘sparatisme’ ; dan ‘insider’ vs ‘outsider’. Tulisan ini melawan konsepsi-konsepsi tersebut dan pemakaian dualisme konsepsi itu. Di sudut yang berbeda buku ini menekankan perubahan; dari sudut integritas tulisan ini menekankan keterbukaan dan interaksi; dari sudut perlawanan tulisan ini menekankan pembelajaran. Semuanya mengganti mode dualistik pemikiran dengan pemikiran dialektikal. Disamping memuaskan pernyataan-pernyataan tertentu dan menganalisa doktrin-doktrin tertentu, kemudian, sebuah filosofi ilmu pengetahuan sosial menjadi multikultural jika hal ini ditulis sebagai sebuah mode berfikir yang lebih sesuai dengan kehidupan yang multikultural dari pada alternatif cara berfikir.

Dalam iklim intelektual dan politik yang lebih awal, sebuah pancaran cerah yang digunakan oleh ilmu

pengetahuan sosial dalam memandang dirinya sendiri sudah terlihat dengan jelas. Walaupun begitu, hari kita hidup dalam sebuah masa dengan pertanyaan akan ide ilmu pengetahuan secara khusus dan pengetahuan secara umum. Kehidupan kita merupakan sebuah masa skeptikisme; skeptikisme tentang kebenaran, objektivitas, pengetahuan, dan bahkan kemungkinan pemahaman terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Skeptikisme semacam itu boleh-boleh saja, namun jika menjadi ekstrim akan jatuh pada sinisme: yaitu apa yang dilakukan untuk pengetahuan merupakan pandangan yang menjatuhkan yang secara politis kuat dan secara historis berkuasa ('sejarah sebenarnya merupakan cerita yang diceritakan oleh para pemenang'). Dengan pandangan ini penelitian sosial sebagai sumber pengetahuan yang memungkinkan kebijaksanaan yang mulai menghilang.

Skeptikisme mempunyai akibat bahkan lebih berbahaya dari kematian penelitian sosial. Hal ini cenderung meragukan kemungkinan analisa dan pemecahan yang rasional dalam menghadapi penyelidikan-penyelidikan sosial. Keraguan ini pada gilirannya menyebabkan kebisuan sosial dan politik, pengambil alihan sosial, asimilasi diri, dan keputusasaan, atau desakan berperang pada kemakmuran orang yang mempunyai perspektif dan budaya. Banyak yang mengkritik multikulturalisme dan relativisme berpendapat bahwa kedudukan filosofis ini secara tak terelakkan cenderung "californization" (dimana, bagi kekejaman dunia, orang yang cinta pada diri sendiri secara pasif hanya dapat berbisik, "Apa sajalah"), atau bagi

“balkanization” (dimana kelompok bersenjata saling menyerang dalam permusuhan dan antagonisme).

Dibawah analisa tehniknya, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan, pandangan yang cukup bagi dunia yang multikulturalisme. Walaupun hal ini diharapkan melakukan penilaian terhadap relativisme dan multikulturalisme yang dipahami sebagai upaya menikmati perbedaan, hal juga berupaya menunjukkan bagaimana pandangan ini diterima secara normal sebagai ilmu pengetahuan sosial tersendiri dalam sebuah konteks dari konsep yang disebut “interaksionisme”.

Masalah yang muncul karena penilaian sifat penelitian sosial dari dalam konteks multikulturalisme kemudian menjadi menyeluruh, meluas, dan relevan bagi beberapa masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tujuan utama dari tulisan ini adalah memperdalam dan menghidupkan pembicaraan mengenai sifat penelitian sosial. Namun dibawah semua ini, tulisan ini bermaksud memberikan sebuah pandangan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan dunia yang multikultural.

*)Resitasi bersumber Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science. A Multi-cultural Approach*, Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 1996.

2. Filsafat Pancasila

1. Pancasila

- Pancasila
 - ↳ filsafat hidup bangsa
 - ↳ dasar filsafat negara
- Pancasila
 - ↳ universal: umum, kolektif
 - ↳ khusus: terbatas bagi rakyat Indonesia (WNI Asli & Peranakan)
- Rumusan Pancasila :
 - 22 Juni 1945 - Piagam Jakarta
 - 29 Mei 1945 - Sidang BPUPKI I (Mohammad Yamin)
 - 1 Juni 1945 - Sidang BPUPKI I (Soekarno)
 - 17 Agustus 1945 - Proklamasi
 - 18 Agustus 1945 - Penetapan UUD 1945
- Aristoteles : Empat sebab-musabab (kausal) :
 1. Kausa materialis : sebab berupa bahan
 2. Kausa finalis : sebab berupa tujuan
 3. Kausa formalis : sebab berupa bentuk
 4. Kausa efisien : sebab berupa karya



- Pancasila :
1. Bahan : tata hidup/kebiasaan manusia
 2. Tujuan : dasar filsafat negara

- 3. Bentuk : lima dasar
- 4. Karya : usaha PPKI 18 Agustus 1945
- Tata hidup manusia, bertalian dengan :
 - 1. Diri sendiri
 - hati nurani
 - berperikemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri
 - 2. Sesama manusia
 - berperikemanusiaan
 - humanistis
 - kemanusiaan yang beradab
 - kesatuan perserikatan (kekeluargaan)
 - aturan berdasar warga sendiri
 - perserikatan negara (kerakyatan)
 - berkeadilan
 - 3. Tuhan
 - zat yang berkuasa
 - berketuhanan
 - Tuhan itu Esa
 - kemanusiaan yang adil terhadap Tuhan (memenuhi tuntutan Tuhan)



Lima Dasar :

Kemanusiaan
 Persatuan
 Kerakyatan
 Keadilan
 Ketuhanan

- Rumusan Pancasila :
(dipengaruhi ruang dan waktu)
 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



Susunannya :

Majemuk tunggal (kesatuan yang bersifat organis) hierarkhis berbentuk piramidal (kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila dimukanya).

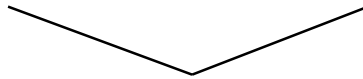
2. Pancasila Dasar Negara

- Negara : suatu organisasi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang diperintah secara terarah dan efisien berdasar konsepsi dasar (ideologi negara & moral negara)
- Dasar negara :
 - Pedoman bagi pembentukan struktur negara
 - Pedoman pelaksanaan tugas pemerintah
 - Pedoman partisipasi rakyat
 - Pedoman kerjasama pemerintah rakyat

- Sifat Keseimbangan Pancasila

I. Negara Theis Demokratis

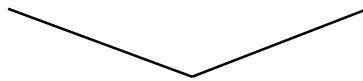
Ide golongan Islam Ide golongan Nasionalis
 Negara Islam Negara Sekuler



Pancasila
 Negara Theis Demokratis

II. Aliran Monodualisme

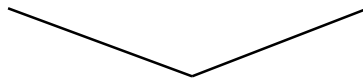
Sifat Individu Sifat Sosial
 Aliran Individualisme Aliran Kolektifisme



Pancasila
 Aliran Monodualisme

III. Faham Dialektis

Ide-ide Besar Dunia Ide-ide Asli Indonesia
 Sistem Demokrasi Musyawarah Mufakat



Pancasila
 Faham Dialektis

- Dasar Negara Pancasila
 - Filter yang menyaring segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia Indonesia
 - Sumber segala sumber hukum ⇒ Empat pokok pikiran :

1. Persatuan -- Dasar Negara
2. Keadilan Sosial -- Tujuan Negara
3. Kerakyatan dan Pemusyawaratan -- Sistem Negara
Perwakilan
4. Ketuhanan menurut dasar -- Fundamen Moral
Kemanusiaan Negara

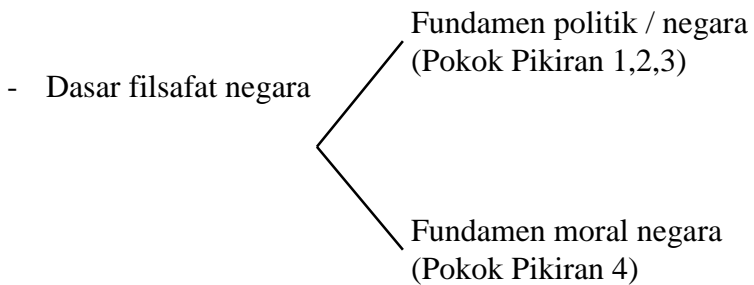
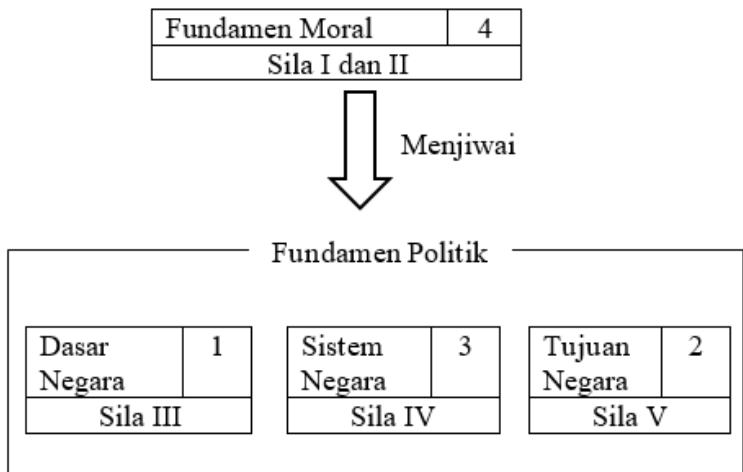


Diagram Empat Pokok Pikiran



- Kaidah Fundamental Negara :
 1. Tertulis (UUD)
 2. Tidak tertulis (dalam hukum ketatanegaraan) berupa :
 - I. Hukum Tuhan - Firman Tuhan
 - II. Hukum Kodrat - aturan hidup bersama, hasil pemikiran manusia \Rightarrow keadilan
 - III. Hukum Etis - aturan hidup bersama (nilai baik-buruk) \Rightarrow keadaban

3. Dasar Politik Pancasila

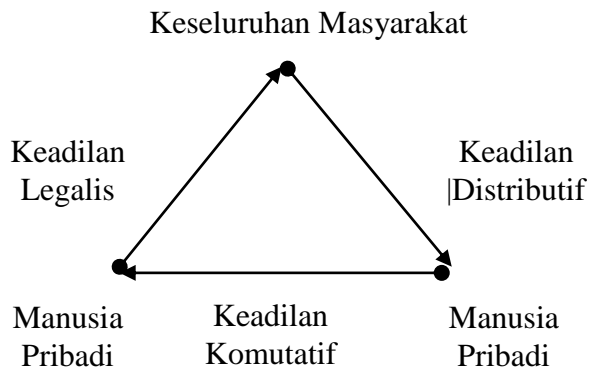
- Ideologi negara :
Kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan.
- Persatuan Indonesia
 - ❖ Suatu proses/usaha
 - ❖ Nasionalisme Indonesia :
 1. Mengurangi perbedaan untuk persatuan
 2. Menghidupkan perbedaan yang punya daya tarik ke arah persatuan
 3. Kesadaran, kecakapan & usaha baik untuk ketertiban, perdamaian & kesatuan
 - ❖ Berbuat baik dan mencegah kejahatan
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia :
 - ❖ Adil adalah keseimbangan hak dan kewajiban
 - ❖ Tiga bentuk keadilan :
 1. Keadilan Komutatif
 - Berdasar hubungan pribadi
 2. Keadilan Distributif

- Berdasar kalkulasi

3. Keadilan Legalis

- Berdasar taat hukum
- Selaras, serasi, seimbang

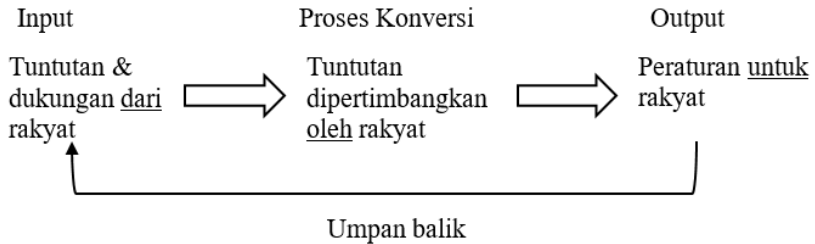
Diagram Tiga Macam Keadilan



- Keadilan Sosial :
Suatu tata masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak-kewajiban manusia sebagaimana mestinya baik material maupun spiritual.
- Keadilan sosial bertalian dengan :
 - masyarakat
 - asas sosial : kerjasama, tolong menolong
 - asas kebudayaan → Akulturasi
- Kerakyatan :
 - kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
 - pemerintahan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat)

- demokrasi

- Diagram Sistem Kerakyatan



- Dasar kerakyatan :

- Persamaan harkat & martabat manusia
- Pengaruh ajaran agama
- Untuk melindungi persamaan & perbedaan



Hati nurani : kekeluargaan
 mencintai sesama
 mengakui perbedaan
 saling melengkapi
 hubungan harmonis

- Kebijakanaksanaan :

Perbuatan atas dasar dorongan kehendak yang tertuju pada kebaikan, berdasarkan akal untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan rasa kemanusiaan

- Permusyawaratan :

Sistem dalam merumuskan / memutuskan suatu persoalan dengan cara rapat sebagai forum pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan

→ sesuai teori dialektika: tesis, anti-tesis, sintesis

- **Makna Sila IV :**

Suatu sistem pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu serta didalam menetapkan sesuatu peraturan dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama.

→ Demokrasi Pancasila sebagai Sistem Negara

→ Tidak dikenal oposisi

→ Pengawasan sesuai peraturan perundangan

→ Asas kekeluargaan

4. Dasar Moral Pancasila

- **Moral Pancasila ≈ Pancasila sebagai suatu kesatuan bulat asas-asas budi-pekerti atau moral.**

→ sesuai kodrat manusia

→ bertindak rasional

→ taat pada akal budi dan asas moral

→ taat pada perintah Tuhan

} Moral kodrati
(hati nurani)

} Moral religi

- **Ketuhanan Yang Maha Esa :**

→ Tuhan adalah Penyebab Pertama / Kausa Prima

→ Iman terhadap Tuhan

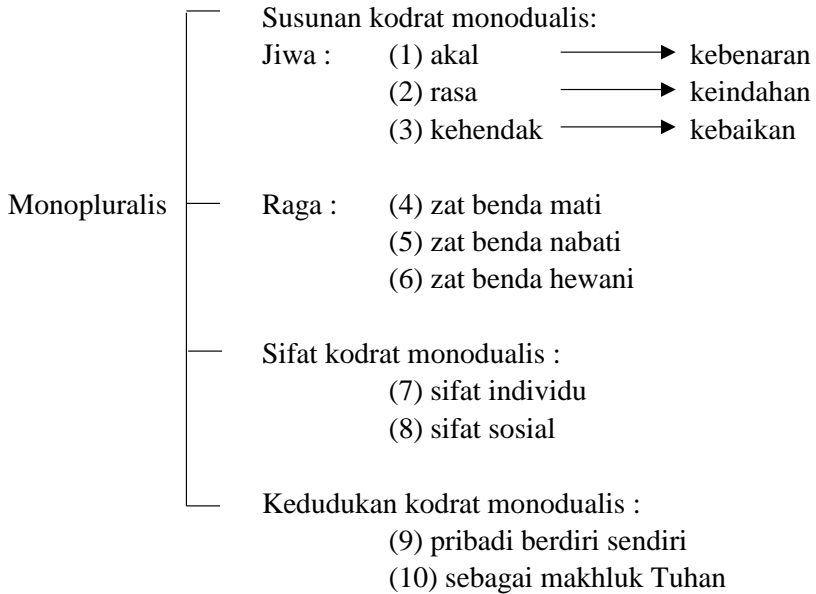
→ Taat dan taklim kepada Tuhan

→ Tidak ingkar atau munafik

- **Kemanusiaan yang adil dan beradab :**

→ Manusia adalah hewan/makhluk yang berakal

→ Hakekat kodrat monopluralis manusia (10 unsur) :



- Adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan
- Adab adalah tata kesopanan.
Beradab adalah bersikap, berkeputusan dan bertindak berdasarkan pertimbangan nilai moral yang berlaku dalam hidup bersama; penilaian baik buruk (tergantung ruang-waktu, cenderung subjektif)
- Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
 - Pengakuan HAM
 - Mencintai sesama manusia
 - Tenggang rasa atau tepo-saliro
 - (-) Jangan berbuat sesuatu terhadap orang lain apa yang

tidak Saudara kehendaki orang lain berbuat demikian terhadap Saudara.

(+) Berbuatlah terhadap orang lain apa yang Saudara kehendaki orang lain juga berbuat demikian terhadap Saudara

→ Empat tabiat saleh

(menurut Notonagoro) :

1. kebijaksanaan → tertuju pada kebaikan
2. kesederhanaan → membatasi diri dalam kenikmatan
3. keteguhan → membatasi diri untuk tidak melampaui batas kewajaran dalam menghadapi penderitaan
4. keadilan → terhadap diri sendiri, sesama manusia, Tuhan

3. Kemajemukan Masyarakat*)

Rabuska dan Shepsle memfokuskan pada ciri-ciri preferensi individu dalam masyarakat plural. Di dalam bagian ini, dengan memakai ciri-ciri tersebut, kita akan menelaah dinamika kompetisi etnis dan menarik beberapa hasil teoritis. Gambaran ikhtisar dinamika tersebut mengungkapkan 5 ciri yang berbeda, yaitu :

1. Kerjasama etnis pra-kemerdekaan
2. Kerjasama etnis pasca-kemerdekaan : ambiguitas
3. Menuntut generasi dan pentingnya etnisitas yang meningkat
4. Kalah dan merosotnya koalisi multietnis
5. Intrik elektoris dan ketidakpercayaan

1. Kerjasama Etnis Pra-Kemerdekaan

Peninjauan pengalaman historis masyarakat plural mengungkapkan regularitas pertama yang penting : Eksistensi kerjasama etnis tingkat elit pada periode pra-kemerdekaan. Selama periode ini, komunitas etnis tidak banyak menjadi pesaing satu sama lain, seperti di dalam kompetisi dengan pesaing umum. Eksistensi aturan asing mendorong kerjasama dalam etnis dan pendalaman etnis. Warga pribumi kelas menengah, yang mendapat peraturan asing yang terberat, dengan sedih sadar akan kesempatan-kesempatan yang tertutup bagi penduduk asli. Sedangkan rakyat pribumi mampu menerima segala macam penghinaan yang mereka derita (dan diragukan bila penghinaan-penghinaan itu berkurang setelah kemerdekaan), tetapi masyarakat menengah tidak dapat menerima penghinaan-penghinaan itu. Oleh karena itu,

Kamisese Kapawai Tuimacilai Mara, ketua baru kelompok politik Fiji, dideskripsikan oleh “New York Times” sebagai orang Fiji dari kelas menengah yang merasakan penghinaan dari penguasa kolonial Inggris. “Dikatakan bahwa penghinaan yang diterimanya dengan mendapatkan gaji yang lebih rendah dari orang Inggris yang melakukan pekerjaan yang sama memperkuat tendensi nasional pemimpin muda yang berpendidikan tinggi ini. Persepsi ketidakadilan, penghinaan, dan tertutupnya kesempatan umum untuk mencapai prestasi dan peningkatan diri diperkuat oleh perjanjian-perjanjian yang sering dilakukan dengan administrator asing (sebagai contoh : pengurusan surat-surat profesional, negosiasi bisnis, dll). Sebagai akibatnya, anggota kelas menengah mendorong untuk melakukan kerjasama untuk menjadikan eksploitasi dari pihak luar memakan banyak biaya, dan sedapat mungkin tidak berhasil.

Ada pula dorongan kerjasama yang lain. Perlawanan besar-besaran dan tuntutan untuk mendapatkan tambahan kesempatan berakibat pada pemberian rasionalitas bagi negara untuk melepaskan diri. Dan lagi, fakta bahwa kaum kolonialis memegang bagian yang lebih besar di bidang ekonomi dan kekuasaan untuk mengalokasikannya, dan bahwa perlawanan yang terkoordinasi dibutuhkan penggerak untuk kerjasama mutual. Shils menyatakan bahwa hasil yang menguntungkan dari faktor ini adalah elit nasionalis secara intensif sedikit merasa terganggu oleh pembagian komunal dalam tingkatan mereka.

Kasus Ceylon merupakan contoh :

Didalam awal kehidupan gerakan otonomi politis, timbul harapan dan keinginan bahwa perjuangan untuk

mendapatkan pemerintahan sendiri bagi Ceylonese akan menyatukan Sinhalese dan Tamils dalam tujuan bersama. Kelas menengah yang aktif secara politis merupakan multikomunal didalam komposisi dan pandangannya bersifat relatif kosmopolitan. Didalam kelas ini, identitas komunal tidak dihapus dan pernikahan jarang melompati hambatan-hambatan komunal, hubungan antara Sinhalese dan Tamils tidak hanya bebas dari ketegangan, tetapi juga seringkali bersifat baik dan hangat. Hal itu merupakan suatu tanda “modernitas” yang menolak adanya sentimen komunal yang dianggap kejam dan atavisme.

Seiring dengan kemerdekaan yang diakui, atau hampir diakui, koalisi multietnis yang mendominasi perjuangan untuk merebut kemerdekaan menjadi terbatas. Akan tetapi, dalam beberapa hal tindakan kerjasama diantara beberapa elit etnis terinstitusionalisasi didalam kerjasama ekonomi dan terutama asosiasi politik. Periode paska-kemerdekaan menjadi saksi dalam usaha untuk membentuk koalisi bersama multietnis yang besar.

2. Kerjasama Etnis Paska-Kemerdekaan : Ambiguitas

Geertz menggambarkan masalah dalam menghadapi koalisi multietnis atau asosiasi politis :

Pola yang nampaknya berkembang dan mungkin mengkristal adalah salah satu pola dimana partai nasional yang bersifat komprehensif muncul dalam negara dan berkali-kali diserang oleh partai-partai kecil Masing-masing saling berusaha mematikan yang lain dengan cara menyerang titik ketegangan yang muncul dan berkembang seiring dengan berfungsinya partai tersebut dan dengan cara

menarik lebih terbuka pada sentimen primordial.

Ketegangan yang berkembang dalam tingkat koalisi multietnis dapat dilacak secara langsung melalui perubahan didalam “aturan permainan”. Setelah kemerdekaan, isi politik adalah distribusi. Kekuasaan kolonial (atau sejenisnya) tidak lagi menjadi pesaing, mereka meninggalkan negara bekas jajahan yang bertengkar memperlmasalahkan “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Oleh karena itu, dari sudut pandang koalisi multietnis, permainan telah berkurang tidak lagi melawan kaum kolonialis, tetapi berbalik melawan diri sendiri. Situasi politik, yang pada awalnya merupakan permainan ekstrasi, sebagai contoh ekstrasi keuntungan dan kelompok dominan, telah diubah menjadi permainan divisi diantara anggota-anggota koalisi yang menang. Keuntungan dari pengeluaran patner koalisi, sekarang menjadi kemungkinan yang berbeda.

Meskipun berada didalam keindividuan konteks baru, aktivis politis yang turut berjuang dalam meraih kemerdekaan memiliki kepentingan untuk menjaga organisasi politis. Secara psikologis sangat sulit dan secara politis berbahaya bagi seorang nasionalis yang hebat, untuk membelokkan alasan (beserta dengan manifestasi institusional, koalisi multietnis) untuk apa mereka berjuang sekian lama.

Lalu bagaimana caranya koalisi multietnis yang besar memecahkan ketegangan yang dihadapinya, dan secara lebih khusus, bagaimana koalisi tersebut menangani dorongan yang lebih terbuka kearah sentimen primordial yang disuarakan oleh

pemimpin-pemimpin lawan. Teknik yang digunakan pada intinya ada 2 cara. Di satu sisi, pemimpin menumbuhkan tuntutan atas masalah nasional (sebagai lawan dari masalah komunal), sebagai contoh: perkembangan ekonomi, integritas teritorial. Di sisi lain, pemerintah menganggap masalah komunal divisif sebagai ambigu.

Teknik pertama, menuntut generasi atas masalah nasional, memungkinkan koalisi multietnis menghindari distribusi politik. Partai-partai kecil yang mencari keuntungan distributif komunal secara mudah dapat disalahkan karena usahanya yang tidak besar dalam pendirian negara, dengan cara menghalangi pertumbuhan ekonomi dan membahayakan fiabilitas rezim yang baru. Musuh-musuh eksternal ditemukan dan dibesar-besarkan oleh kondisi untuk menilai tuntutan mereka atas tindakan penghianatan pada kepentingan komunal. Sebenarnya, didalam beberapa contoh, prerogatif demokratis tergantung pada kepentingan mempertahankan integritas negara baru.

Tuntutan generasi atas pentingnya masalah nasional merupakan masalah strategi yang sangat cocok untuk koalisi multietnis, terutama karena koalisi tersebut biasanya merupakan satu-satunya organisasi politis nasional. Alasan semakin sedikitnya pesaing adalah karena kepentingan komunal. Koalisi adalah satu-satunya partai, oleh karena itu, ia memiliki tuntutan legitimasi pada konstituensi nasional. Posisi dominannya didalam persoalan nasional yang luas yang memperkenalkannya untuk tetap mempertahankan kepemimpinan.

Untuk berhadapan dengan rangkaian masalah komunal divisif secara potensial, koalisi multietnis menumbuhkan ambiguitas dengan sengaja. Seperti yang telah kami katakan

sebelumnya, individu-individu didalam masyarakat yang plural mempunyai preferensi yang bagus disepanjang dimensi ini. Kondisi ini dapat diperlihatkan secara matematis dimana kebijaksanaan ambigu menghasilkan hasil elektoral.

Sebagai contoh, kami memperlihatkan kasus bikomunal. Masing-masing komunitas sangat menyukai tatanan nilainya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh konvesitas fungsi preferensi. Bagaimana masing-masing masyarakat akan bereaksi terhadap pernyataan ambigu dalam dimensi ini? Secara khusus, seandainya koalisi multietnis, melalui tindakan dan ekspresi yang sesuai, diterima oleh seluruh warga sebagai lotere, sebagai contoh $\frac{1}{2} A, \frac{1}{2} B$. Dengan memakai aturan penentuan utilitas yang diharapkan, seseorang dapat menentukan nilai tiap komunitas yang berada di dalam koalisi multietnis. Utilitas lotere $L = (\frac{1}{2} A, \frac{1}{2} B)$, sebagai contoh masing-masing A dan B dengan probabilitas 0.5 direpresentasikan oleh titik tengah tali yang menghubungkan titik $(A, ((A)))$ dan $(B, ((B)))$. Catatlah bahwa utilitas yang diharapkan dari lotere ini, $(x(L))$, sama dengan utilitas alternatif tertentu X^* , dan bahwa posisi X^* secara relatif dekat dengan titik preferensi komunitas A.

Kalkulasi analogi warga negara dalam masyarakat B menunjukkan utilitas yang diharapkan dari lotere L sama dengan utilitas titik Y^* . Y^* merupakan ekuivalen pasti dari L. catatlah lagi bahwa Y^* secara relatif dekat dengan titik preferensi masyarakat B.

Setiap masyarakat menempatkan nilai tinggi pada lotere $L = (\frac{1}{2} A \frac{1}{2} B)$ sebenarnya Karena preferensinya bertentangan. Untuk A, lotere L dipreferensi sebesar X^* ; untuk B, lotere B dipreferensi sebesar Y^* . Dan masing-masing masyarakat secara relatif terpuaskan oleh ekuivalen kepastian perspektif.

Walaupun hasil tersebut tidak jelas, catatan logika kita membujuk kita bahwa ambiguitas tujuan cocok dan karenanya merupakan strategi rasional dengan cara memperbolehkan adanya daya pendorong dalam kelompok yang memiliki preferensi pertentangan. Jika koalisi multietnis berhasil memusatkan perhatiannya pada masalah nasional (non etnis) dan jika koalisi tersebut menetralkan masalah etnis devisif melalui ambiguitas, maka koalisi tersebut harus tetap mempertahankan peran kepemimpinan. Meskipun koalisi dapat dikalahkan secara marginal pada masalah etnis, koalisi tersebut berhasil karena masalah etnis tersebut tidak penting.

Sebuah contoh pemakaian ambiguitas sebagai strategi politis yang menjauhkan komunalisme ditemukan dalam partai Alliance Malaya, sebuah koalisi 3 partai etnis secara eksplisit. Pada pemilihan umum tahun 1959, partai Alliance bertindak secara ambigu atas masalah yang didasarkan komunal yang memecah keanggotaan Melayu, China dan India dari koalisi. Dengan masyarakat yang terpisah secara rasional, koalisi mengembangkan pendekatan kearah masalah rasional yang tidak memerlukan komitmen yang tak dapat dibatalkan dari satu sisi atau dari sisi yang lain.

Selama kampanye, kepemimpinan Partai Alliance menunjukkan beberapa ambivalensi terhadap masalah komunal. Di satu sisi, Tunku Abdul Rahman menarik komunal untuk mendukung Melayu, menekankan bahwa masalah komunal “bahaya asing” dan ancaman bagi orang-orang Melayu yang ditimbulkan oleh imigrasi pendatang luar. Di sisi lain, Tunku Abdul Rahman mempertahankan manifesto alliance yang mengatribusikan “bahaya asing” kedalam persyaratan warganegaraan yang terbatas, yang membuat sulit orang-orang

Melayu yang membutuhkan status penuh sebagai warga negara Melayu. Oleh karena itu, partai Alliance bermaksud untuk menggunakan masalah “ancaman luar negeri” untuk menarik perhatian ke Melayu, tetapi dengan cepat dijelaskan pada anggota Assosiasi China Melayu dan kongres India Melayu bahwa orang-orang China dan India dalam 2 organisasi ini bukanlah bagian dari “ancaman luar negeri itu”. Contoh ini hanya satu dari banyak contoh yang memakai ambiguitas secara sukses untuk mempertahankan penyatuan elemen yang tidak layak untuk tindakan politis umum.

Tepatnya pemakaian strategi menuntut generasi untuk masalah nasional dan ambiguitas untuk masalah etnis telah dibuktikan secara formal. Pemakaian strategi itu oleh beberapa masyarakat plural telah diverifikasi dalam bagian kedua. Akan tetapi seperti yang telah diidentifikasi oleh pemeriksaan dalam bagian selanjutnya, hasil strategi ini, dari kasus demi kasus, adalah munculnya etnisitas sebagai konsiderasi politis yang dominan. Aktivitas menumbuhkan tuntutan di dalam bagian koalisi multietnis secara temporer menekan definisi etnis atas politik, tetapi aktivitas itu tidak mengubah preferensi ataupun secara menyeluruh mengubah konsiderasi etnis.

3. Menuntut Generasi dan Pentingnya Etnisitas Yang Meningkat

Kesetiaan dalam masyarakat plural bersifat komunal, bukan nasional. Preferensi komunal bersifat kuat. Masalah nasional, meskipun penting, tidak mempunyai kekuasaan. Sebagai hasilnya, koalisi multietnis hanya mampu hidup singkat.

Apa yang menerangi manifestasi komunalisme? Jawabannya jelas kompleks, dan intinya bergantung pada

peristiwa sejarah. Beberapa penjelasan telah diberikan pada penekanan (asumsi) kami pada preferensi individu dan motif-motif politik, dan sebagai konsekuensinya, beberapa regularitas empiris tidak dijelaskan.

Sumber pertama meningkatnya komunalisme adalah karakter distributif periode paska-kemerdekaan. Karena pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kepentingan penduduk asli, peraturan internal distribusi menjadi lebih penting.

Sebagai hasilnya, warganegara dari masyarakat yang berbeda berbalik saling melawan. Kelangkaan sumber daya alam dan pertentangan yang serius, mengimplikasikan bahwa preferensi orang-orang dipuaskan oleh orang lain. Kenyataan bahwa pemerintah menjadi kekuatan penduduk asli yang penting dalam alokasi sumber daya-sumber daya tersebut hanyalah memperburuk masalah.

Sumber kedua meningkatnya konflik yang akhirnya berbalik kearah komunal adalah terlalu besarnya kondisi koalisi multietnis. Dengan berdirinya negara baru dan lenyapnya kekuasaan kolonial (jika ada), sebagai akibatnya koalisi multietnis menjadi koalisi keseluruhan. Dan bagi sebagian besar susunan struktural, koalisi keseluruhan lebih besar daripada pembuatan keputusan secara kolektif. Seringkali terdapat dorongan positif bagi beberapa sub-koalisi untuk mengeluarkan anggota yang masih ada. Kriteria komunal seringkali menentukan siapa yang dikeluarkan dan siapa yang boleh tetap tinggal.

Faktor-faktor ini, karakter distributif politik dan eksistensi koalisi yang besar, ketika dipadukan dengan otoritas pembuatan keputusan kemerdekaan, mendorong sentimen komunal.

Dengan ditambahi institusionalisasi sentimen primordial, eksistensi ketakutan komunal dan ketidakamanan, peraturan baru distribusi selalu mengikuti garis kontrol.

Akan tetapi, sesuatu hal harus merangkai proses keseluruhan dalam suatu gerakan. Peristiwa historis menyediakan katalis dalam beberapa hal, sebagai contoh peristiwa eksternal, wafatnya pemimpin politik, perubahan dibidang ekonomi, dll atas kepentingan yang lebih besar yang merupakan tingkah laku politisi komunal. Pemimpin etnis yang dikeluarkan dari koalisi multietnis ataupun yang masyarakatnya diabaikan secara sistematis, mendapatkan dorongan untuk mengetnisasi politik. Itu merupakan respon terhadap kurangnya perhatian komunalisme yang dilakukan dengan cara mengatur koalisi, tidak memasukkan politisi yang mempunyai dorongan untuk “bermain api” chauvinisme etnis. Geertz, seperti biasanya menyatakan :

... Terdapat lingkaran disekitar munculnya institusi pemerintahan negara baru, dan politik khusus yang cenderung mereka dukung, keseluruhan pusran penguatan ketidakpuasan primordial dan para politis merupakan hasil yang besar untuk meneruskan metafora, akibat buruk proses politik itu sendiri.

Ada 2 kesimpulan penting untuk diambil. Pertama, koalisi multietnis secara inheren tidak stabil, menjadi mudah diserang untuk dibalikkan, menuntut generasi untuk memfokuskan pada chauvinisme etnis. Kedua, terdapat politisi yang kepentingannya menuntut dukungan chauvinisme etnis. Konsekuensi yang nampaknya muncul: meningkatnya frekuensi daya dorong etnis yang membatasi kesatuan koalisi yang memimpin. Contoh yang

jelas meliputi : “apanjaht” politik di Gulana Inggris, “Sinhalese only” di Ceylon; apartheid di Afrika Selatan dan Rhodesia; “Enosis” gerakan di Cyprus; “anti-katolikisme” di Ulster, “kekuasaan hitam” di Thailand, “sentimen separatis” di Belgium : secessionisme di Nigeria, Chad, dan Ethiopia, “sentimen pan-Indonesia” di Melayu, dan permusuhan melawan India dan Arab di dalam Afrika Timur Inggris dimasa lalu.

4. Kalah dan Merosotnya Koalisi Multietnis

Argumentasi kami dalam hal ini adalah bahwa politik didalam periode paska-kemerdekaan mengarah pada persamaan distributif bahwa kriteria distribusi menyiksa koalisi multietnis untuk menghasilkan ketegangan, dan bahwa pemecahan sebenarnya mengiringi bertambah pentingnya dimensi etnis. “Didalam perjuangan etnis...afiliasi...menjadi simbol yang penting bagi penjajaran politis, simbol dimana politisi yang ambisius berusaha untuk memanipulasi”.

Konsekuensi dari semakin pentingnya etnisitas bersifat merusak koalisi multietnis dan representatif lain dari moderasi politis. Sebagaimana yang oleh Sarton teliti. “Tidak seperti di pasar, di dalam politik tidak ada acara untuk melindungi “kompetisi tidak adil”, demagogi, kekalahan, perjanjian tanpa substansi”. Di dalam masyarakat plural, cepat atau lambat, “kekalahan menjadi aturan permainan. Semua orang dipersiapkan untuk memberikan labih banyak atau lebih sedikit, dan gertakannya tidak dapat dilihat. Situasi ini bukan lagi situasi yang memperbolehkan bertahannya suatu sistem politis berdasarkan perjanjian dan kekalahan merupakan negasi politik kompetitif.

Ciri-ciri teoritis dari observasi ini diulang kembali. Pertama,

politisi yang ambisius tidak termasuk dalam koalisi multietnis yang mendorong berkembangnya tuntutan lebih pada komunal daripada masalah nasional. Karena merupakan partai nasional satu-satunya, koalisi multietnis nampaknya tidak hilang ketika masalah nasional menjadi penting. Posisi koalisi multietnis menjadi bertambah lemah karena pentingnya masalah komunal meningkat. Kedua, politisi komunal dapat mengalahkan kandidat koalisi multietnis, yang posisinya didalam masalah etnis bersifat ambigu, hanya dapat mengambil posisi ekstrim. Yaitu, hanya titik-titik didalam interval (A, X*) dan (Y* B) yang lebih disukai dalam lotere koalisi multietnis oleh masyarakat etnis respektif. Secara singkat, secara komunal didasarkan pada entrepreneur politik untuk meningkatkan pentingnya masalah komunal dan kemudian untuk mengalahkan koalisi multietnis yang ambigu.

Konsekuensi dari bertambah pentingnya etnisitas bermacam-macam. Konsekuensi yang pertama adalah lenyapnya institusi perantara, merupakan contoh utama dari koalisi multietnis. Penawaran berhenti, dan tindakan kerjasama termanifestasi hanya ketika keuntungan mutual dapat dicapai. Akan tetapi, sulit bagi anggota institusi perantara untuk saling berkerjasama ketika secara terus-menerus memperbaiki pagar-pagar didalam masyarakat etnis mereka sendiri, aktivitas dipentingkan oleh tindakan “menghembuskan api” dari politisi etnis yang ambisius.

Kasus Ulster bersifat instruktif. Bahkan sebelum Reverend Ian Paisley muncul, kerjasama antar katolik dan protestan sangat sulit. Pada pertengahan tahun 60-an Kapten O'Neill (Unionist Premier of Northern Ireland) membuat jembatan, yang secara simbolis digambarkan dengan undangannya untuk perdana

menteri Republik Irish sampai Belfast. Pendukung Katolik memandangnya sebagai suatu usaha murni dalam rekonsiliasi, dibawah kepemimpinan Mr. Eddie McAtees untuk pertama kalinya menjadi oposisi resmi di Stormont. Akan tetapi posisi perdana menteri bersifat tidak dapat dipertahankan, seperti yang telah diindikasikan oleh ketidakpopuleran kunjungan didalam lingkaran Unionis. Hal tersebut menimbulkan peringatan diantara pendukung yang kuat, dan didalam tahun selanjutnya, kelompok belakang dibentuk untuk mengawasi tindakan kapten O'Neill dimasa mendatang...". Secara singkat, setelah Reverend Paisley memulai kampanye protes publik, ia ditangkap dan ditahan untuk pertama kalinya.

Tidak hanya partai saja yang gagal untuk tetap secara luas berdasarkan pada institusi perantara, menjadi disamping berorientasi secara komunal, komunikasi dan kerjasama antar partai juga menentang pemeliharaan. Salah satu manifestasi diberikan oleh preposisi teoritis Haefele. Dia menunjukkan jika ruang lingkup badan pengambil keputusan dibatasi pada satu masalah, dengan demikian semua masalah yang muncul sebelumnya nampaknya sangat saling bergantung, sehingga pemilihan perdagangan hanya dapat memainkan peranan-peranan kecil dalam pengambilan keputusan". Yaitu, jika suatu kriteria substantif tunggal mendefinisikan nilai masalah untuk semua pelaku, kemudian melakukan penawaran, membalas jasa, dan aktivitas "*Quid Pro Qua*" juga dimasukkan. Aktivitas semacam itu hanya mungkin apabila beberapa jenis masalah-masalah yang penting muncul, masalah-masalah tersebut menerima solusi penawaran. Tetapi, dalam masyarakat plural semua masalah dipandang dalam terminologi implikasi etnis mereka. Dan nilai-nilai bertentangan dengan semua masalah

yang tumbuh. Dengan demikian, Premis Proposisi Haefele bertemu; kesimpulan yang mengikutinya: tidak ada batang kayu untuk menggulung.

Konsekuensi ketiga berpangkal pada bertambah pentingnya etnisitas adalah etnisasi barang-barang yang tersedia secara kolektif. Didalam masyarakat plural, barang-barang yang diproduksi dengan keputusan politik dikonsumsi bersama-sama, sebagai contoh: pendidikan, pertahanan, proteksi polisi. Konsumsi barang-barang ini, dalam banyak hal, bebas dari kemampuan untuk membayar atau kekuatan membeli, membedakan mereka dari barang-barang privat yang disuplai dalam pasar. Sebagai contoh, dalam kasus pertahanan, seluruh warganegara mendapat keuntungan dari penyimpanan nuklir apakah mereka membayarnya atau tidak. Sebenarnya, kemampuan penghindari pajak untuk mengkonsumsi barang-barang ini memberikan dua karakteristik pembeda barang-barang kolektif :

Bersama-sama menyuplai, konsumsi oleh beberapa individu tidak menghalangi konsumsi oleh yang lainnya.

Non-eksklusibilitas, kriteria yang membedakan mereka-mereka yang diperbolehkan mengkonsumsi barang-barang dari mereka yang tidak diperbolehkan.

Hal ini, tentunya, tidak dapat diartikan bahwa tidak ada konflik dalam alokasi barang-barang sektor publik didalam masyarakat plural. Sebaliknya, ada sedikitnya 2 macam konflik. Pertama, biaya oportunitas yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang menyukai investasi besar kekayaan publik didalam publik alternatif. Kedua, karena kekayaan kolektifitas diinvestasikan untuk barang-barang privat dan publik, sebagai

contoh : berkurangnya biaya rata-rata pos untuk konsumen tertentu, subsidi pertanian, perizinan pengurangan minyak, muncul konflik yang jelas terlihat pada proyek-proyek yang mendapatkan bantuan uang (tidak membicarakan masalah apakah barang-barang privat harus disumbang).

Dalam masyarakat plural, pemberian konsumsi barang-barang publik merosot karena semakin pentingnya etnisitas. Karena etnisitas menjadi makin penting, setiap keputusan politik menolong suatu masyarakat dan menghalangi masyarakat yang lain. Dengan demikian, barang-barang publik yang diberikan dari keputusan politik diberikan untuk kepentingan masyarakat etnis.

Non-ekskludabilitas, yang merupakan karakteristik barang-barang publik telah dilanggar. Etnisitas berperan sebagai basis eksklusif. Dan masyarakat yang disingkirkan secara jelas dianggap sebagai masyarakat yang secara publik jelek.

Despres menggambarkan konsekuensi etnisitas ini didalam pengalaman British Guiana :

Pertimbangkan konstruksi pusat kesehatan baru yang didirikan oleh pemerintah. Akankah pemerintah mendirikan fasilitas tersebut di desa yang didominasi oleh orang-orang Afrika seperti Ann Grove, atukah pusat itu akan didirikan didekat desa Indian di Clonbrook?, dimana kira-kira akan didirikan sekolah baru? atau, siapa yang akan menjadi ketua komite pengembangan regional? Siapa yang akan memproses lamaran untuk pinjaman di kantor distrik tabungan kerjasama dan masyarakat peminjam?. Pada akhirnya, keputusan-keputusan tersebut akan memilih individu-individu yang dalam beberapa hal memiliki hubungan komunal. Meskipun pemerintah

mungkin tidak mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut sebagai berbau politis, menurut orang-orang Afrika dan Indian, keputusan-keputusan itu tetap berbau politis.

Implikasi utama eksklusi sekelompok masyarakat tertentu dari konsumsi barang-barang publik merupakan suatu tantangan terhadap eksistensi negara. Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang-barang publik. Negara dibantu untuk membuat dan menyediakan secara kolektif apa yang tidak dapat dipenuhi melalui tindakan privat. Meskipun “barang-barang” yang disediakan pada awalnya mengambil bentuk integritas teritorial dan keamanan fisik (oleh karenanya, barang-barang tersebut disebut barang-barang Hobbes), ruang lingkungannya telah diperluas didalam negara modern. Kegagalan masyarakat plural untuk mengeluarkan non-ekskludabilitas memperkuat sentimen komunal; Individu-individu mencari sumber-sumber alternatif barang-barang publik, disebut dengan masyarakat etnis, dan oleh karenanya, alternatif tersebut mendasari kenegaraan. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa komunalisme pada awalnya mengembangkan tindakan-tindakan ilegitimasi, yang sebaliknya mengurangi keefektifan negara dan lebih jauh lagi memperkut tindakan ilegitimasi.

Akhirnya, kami mengulangi pernyataan yang secara teoritis telah disebutkan di depan, yaitu kebangkrutan moderasi. Moderasi dalam masyarakat etnis merupakan strategi yang dapat terus hidup, hanya jika etnisitas tidak dipandang penting. Pada saat etnisitas menjadi penting, dan sebagai konsekuensinya, semua masalah diinterpretasikan dalam terminologi komunal, retorika kerjasama dan suara-suara untuk saling mempercayai terdengar sangat lemah. Yang lebih penting secara strategis

mudah dapat dikalahkan oleh penghembusan api politik dan pengalihan politik.

Ceylon dan Ulster bekerja di kantor di Landslide Victory karena jabatan moderat. Dudley Senanayake bermain dengan chauvinisme dalam kampanyenya. Di Ulster, ekstrimis protestan, dengan dipimpin oleh Ian Paisley, memimpin partai Unionist untuk memeriksa dan mengubah kemustahilan moderasi.

5. Intrik Elektoris dan Kekerasan

Karakteristik terakhir politik dalam masyarakat plural yang kami teliti adalah kerusakan prosedur demokratis yang seringkali diiringi dengan kekerasan fisik. Sebagaimana data yang ditunjukkan dalam bagian 2, demonstrasi dan demokrasi merupakan kompetisi yang bebas dan terbuka bagi suara-suara masyarakat. Demonstrasi dan demokrasi tidak kuat didalam lingkungan yang mempunyai preferensi etnis yang besar. Aktivitas menuntut pemimpin yang ambisius, persamaan pentingnya sentimen primordial, dan kekalahan politik, memperlemah komitmen dalam nilai-nilai nasional. Ketika sebuah pendapat mencapai intensitas tertentu dan perpecahan mencapai kedalaman tertentu, maka muncul pergerakan yang menuntut totalitas, bukan kerjasama serta kontrol negara. Maka, tidak mengherankan bahwa perasaan preservasi diri komunal menuntun pada usaha yang telah diperhitungkan untuk memanipulasi peralatan negara guna mengamankan dan mempertahankan keuntungan komunal.

Demokrasi dalam masyarakat plural adalah kausalitas politik komunal. Godaan mayoritas untuk memperkuat kekuasaannya dengan memaka cara-cara yang tidak demokratis, dan untuk

minoritas bergantung pada cara-cara itu untuk meraih kekuasaan semakin kuat. Godaan ini terutama menjadi daya pendorong ketika kelompok dominan secara politik merasa tidak aman. Oleh karena itu, di Ulster, “jika kaum katolik jumlahnya lebih kecil daripada keseluruhan populasi... saling pengertian yang lebih baik mungkin dapat tercapai. Tetapi 35% adalah minoritas, terutama bila 50% anak-anak dibawah umur 15 tahun adalah katolik.”

Konsekuensi intensitas, ketidakamanan, dan godaan untuk memanipulasi susunan politis dapat mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk yang paling dapat dikenali adalah pencabutan hak pilih. Sebagai contoh, masyarakat kulit hitam Rhodesia, Afrika Selatan dan Indian Tamil di Ceylon, secara konstitusional dilarang dalam partisipasi politik yang dilegitimasi.

Tindakan yang kurang langsung mengarah pada konsekuensi yang sejenis dengan pencabutan hak pilih adalah manipulasi aturan pemilihan dan metode merepresentasikannya. Kemayoritasan biasanya didukung oleh masyarakat yang jumlahnya dominan, sedangkan jumlah yang seimbang didukung oleh masyarakat-masyarakat yang jumlahnya lebih seimbang. Dalam hal yang sama, komunitas yang jumlahnya besar menginginkan representasi teritorial, sedangkan bagi masyarakat yang jumlahnya lebih kecil jika secara teritorial ditiadakan, lebih menekankan pada basis representasi komunal.

Metodologi yang berhubungan dengan manipulasi melibatkan kualifikasi hak suara dan perhitungan suara. Di dalam metodologi ini, biasanya prinsip-prinsip mayoritas, beberapa suara dan pemberi suara sama satu sama lain. Oleh karena itu hak suara universal dikualifikasi, sampai baru-baru

ini, oleh pemilihan premis bisnis tambahan. Ditingkat pemerintahan lokal, terdapat persyaratan properti yang mengekang, jelas bertentangan dengan kepentingan orang Katolik dan pemilihan-pemilihan suara tambahan untuk perusahaan terbatas (dicabut pada bulan November, 1968). Pengekangan ini tidak diragukan lagi dimotivasi oleh kenyataan bahwa “1 orang, 1 suara” untuk mereka yang berumur 21 tahun secara alami akan diberikan hak suara pada orang protestan dan katolik, dan tentu saja orang katolik lebih banyak diuntungkan.

Di Malaysia, diterapkan pendekatan yang berbeda untuk menghindari hegemoni Melayu. Pemilihan di desa terdiri dari hanya satu setengah pemilih distrik kota, dan mendapatkan representasi yang sama. Tentu saja karena Malaysia di dominasi oleh daerah pedesaan, sedangkan Cina didominasi daerah perkotaan. Hasilnya : satu orang dua suara.

Alat manipulasi umum yang diketahui oleh setiap mahasiswa dibidang perangkat politik adalah pemberian kesempatan dengan curang kepada sebuah partai politik. Kontrol atas penarikan batas-batas pemilihan memperbolehkan masyarakat politik yang dominan untuk mempertahankan hegemoninya sambil tetap mempertahankan sisi depan demokrasi. Untuk menjamin pemberian kesempatan dengan curang kepada sebuah partai politik, kontrol mobilitas tambahan seringkali digunakan. Oleh karena itu, di Ulster, pemerintah lokal kota telah memberikan kesempatan curang kepada partai politik, memberikan kontrol lokal kepada orang protestan (*unionist*). Majelis lokal yang dikontrol oleh pemerintah lokal mempunyai otoritas atas alokasi perumahan, yang nampak dibiaskan untuk kepentingan golongan *Unionist*. Tujuan utama yang tampak adalah untuk mempertahankan persamaan

pemilihan umum yang diadakan dan oleh karenanya, mencegah segala tantangan partai yang mengontrol dewan.

Teknik lain yang membahayakan karakter demokrasi politik adalah : pengeblosan ke dalam penjara pemimpin-pemimpin partai lawan, penurunan pendaftaran partai politik, emigrasi secara paksa, campur tangan militer, intimidasi secara keras. Dan secara singkat, pengekangan secara besar, penyisihan secara penuh dari kompetisi politik melanggar jiwa dan praktik demokrasi.

6. Masyarakat Plural : Beberapa Variasi

Tulisan ini telah mengkarakterkan masyarakat plural dengan mementingkan dimensi etnis, kekuatan preferensi, pertentangan komunal, dan serangkaian entrepreneur politik yang ambisius. Secara bersama-sama karakter ini mengimplikasikan sejumlah konsekuensi. Walaupun bentuk yang tepat dari konsekuensi ini pada akhirnya bergantung pada kondisi historis dan kondisi eksogen, masyarakat plural selalu kehilangan unsur demokratisnya.

Tetapi demokrasi bergantung pada jumlah. Pengaturan pengambilan keputusan demokratis lebih dari sekedar jaminan prosedural; demokrasi memberikan kriteria untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Dan penentuan ini bergantung pada ukuran koalisi relatif. Di bagian lain, kami memperlihatkan ukuran masyarakat relatif berpengaruh pada pola instabilitas demokrasi yang dipaparkan di atas.

Konfigurasi Etnis

Konfigurasi etnis mengacu pada distribusi populasi di dalam masyarakat etnis dengan tekanan khusus pada ukuran

masyarakat relatif. Walaupun secara kuantitatif, kami tidak menunjukkan secara tepat, masyarakat plural dapat dibedakan ke dalam empat kategori konfigurasi:

- Kompetisi yang seimbang
- mayoritas dominan
- minoritas dominan, dan
- fragmentasi

Kategori pertama termasuk masyarakat yang terdiri dari sejumlah kecil masyarakat etnis, biasanya dua atau tiga kelompok besar, yang tidak mempunyai keuntungan komparatif yang jelas. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan, tidak ada kelompok yang dapat memaksakan nilai-nilainya ke dalam politik, koalisi yang cocok dengan divisi etnis penting untuk dipimpin, dan ditingkatkannya pengamanan pada minoritas. Guyana, Belgium, Trinidad, dan Malaysia termasuk dalam kategori ini.

Karakteristik konfigurasi seimbang yang berbeda termasuk koalisi multi-etnis yang secara relatif bertahan lama, pemakaian ambiguitas dan tuntutan generasi, serta perjanjian institusionalisasi kerjasama antar etnis dalam kerangka demokratis. Akan tetapi, sebenarnya lapisan pengaturan ini mulai terlihat. Tuntutan generasi untuk konfrontasi pemerintahan dalam masalah etnis, peniupan api ketidakpercayaan etnis dan permusuhan yang disebabkan oleh ambisi politisi yang mementingkan diri sendiri dan ketidakmampuan koalisi multietnis untuk menentang masalah-masalah itu, dapat menuntun ke arah konflik etnis. Kelompok etnis yang mempunyai kekuasaan menyesuaikan alat elektrik untuk membuatnya cocok dengan kepentingannya. Penyesuaian ini bervariasi mulai dari perombakan pemerintah lokal di

Malaysia, sampai pada pembentukan pemerintahan umum di luar negeri, di Guyana, (yang tentu saja dijamin oleh partai yang memimpin untuk mempertahankan kepemimpinannya), sampai pada usaha-usaha perombakan negara kesatuan di Belgia. Konsekuensi akhirnya adalah serangkaian kondisi yang memperbolehkan kompetisi politik yang bebas dan terbuka. Jebakan-jebakan demokratis juga cepat lenyap.

Konfigurasi seimbang atas kepentingan ada karena terdapat beberapa prospek perkembangan praktik dan institusi demokratis yang besar. Prospek ini di perkuat oleh usia lanjut relatif koalisi multietnis dan oleh kelenturan keputusan dan simbol demokrasi. Tetapi ketidakmampuan koalisi untuk mengontrol kecurangan politik, kekalahan, dan konsekuensi patner koalisi untuk memperhatikan masalah komunal, menandakan matinya kerjasama didalam komunal dan kompetisi demokratis.

Dominasi, baik itu oleh mayoritas ataupun minoritas, mengacu pada keuntungan strategis suatu masyarakat dibanding masyarakat yang lain. Di dalam kasus mayoritas, suatu masyarakat memperbanyak kompetisi politisnya hanya untuk mendapatkan jumlah besar belaka. Tindakan koalisi karakter multietnis tampaknya menjadi terminologi yang singkat. Peran masyarakat minoritas setidaknya peran demokratisnya, secara politis penting hanya di dalam peristiwa perpecahan besar didalam kelompok dominan. Lebih sering mereka dikatakan masyarakat lawan yang setia (yang tidak terlalu setia) dengan janji kekuasaan politis dari alat non-demokratis. Kami menggolongkan Ceylon, Cyprus, Mauritius, Northern Ireland (Ulster), Rwanda, dan Zanzibar ke dalam kategori ini.

Konflik di dalam konfigurasi masyarakat mayoritas dominan

terjadi lebih banyak pada level fundamental masalah konstitusional daripada didalam kasus seimbang. Selanjutnya timbul perjanjian umum pada masalah pilihan konstitusional dan proteksi komunal. Peraturan mayoritas dan hak pilih secara luas memberikan jaminan yang cukup kepada beberapa masyarakat etnis. Tetapi dimana suatu masyarakat bersifat dominan di dalam suatu peraturan permainan demokratis, masyarakat yang lebih kecil kurang bersedia untuk bekerjasama. Mereka biasanya menuntut untuk representasi komunal dan bentuk-bentuk lain proteksi komunal melawan kemayoritasan di pihak dominan. Oleh karena itu, karakter politik yang bertentangan memanifestasikan diri ke dalam level konstitusional dan keputusan kebijaksanaan individu.

Dengan demikian konfigurasi masyarakat dominan dikarakteristikkan oleh jaranganya kerjasama antar etnis, politis etnis tidak moderat bagi kelompok minoritas dalam tingkat konstitusional dan kebijaksanaan, dan penindasan aktivitas politik minoritas. Kemayoritasan adalah sebab mendominasinya masyarakat dominan dan intrik elektoris adalah metodenya untuk mempertahankan dominasi. Kekerasan seringkali juga dilakukan oleh mayoritas, sebagai contoh: kekacauan Katolik dan tindakan bawah tanah di daerah kampung di wilayah perkotaan di Northern Ireland. Hasil akhirnya sama dengan yang ada didalam konfigurasi kompetisi seimbang. Simbol demokrasi tetap, substansinya terhenti pertumbuhannya.

Dalam kasus minoritas dominan, kepura-puraan demokrasi disisihkan. Masyarakat minoritas memaksakan dirinya sendiri, sebagai akibat dari pemberian keuntungan secara melimpah selama periode pra-nasional. Kasus tersebut adalah kasus di

Afrika Selatan dan Rhodesia, dimana penjajah telah mentransformasikan dominasi pra-nasional ke dalam politik. Kompetisi demokratis yang tersamar tetap berlangsung hanya di dalam hal di mana perpecahan terjadi didalam masyarakat minoritas, sebagai contoh: kompetisi di asia Afrika antara orang-orang Afrika dan Inggris.

Untuk tujuan empiris, konfigurasi minoritas dominan dikarakteristikan oleh kompetisi politis yang terbatas, tidak adanya penjaga demokratis, hilangnya perasaan takut akan monopoli mayoritas dalam politik, dan keberhasilan politik ekstrimis yang menghapuskan segala macam alternatif moderat.

Kategori akhir, fragmentasi, termasuk masyarakat plural yang dibanjiri oleh sejumlah besar masyarakat etnis, semua masyarakat relatif kecil dan tidak ada yang dominan. Negara Congo, dengan 180 masyarakat etnis yang berbeda merupakan contoh kategori fragmentasi. Contoh-contoh yang lain termasuk di Yugoslavia, Lebanon, Nigeria, dan Sudan.

Setidaknya politik dalam masyarakat plural yang terfragmentasi menjadi kacau untuk dibicarakan. Tuntutan keahlian dalam situasi seperti itu, jarang muncul bila tidak ada sarana otoriter. Dengan demikian masyarakat plural yang terfragmentasi ditandai oleh : banyaknya kelompok kelangkaan atau tidak adanya institusi perantara, suplai kemampuan mendirikan koalisi dengan cepat, yang dibutuhkan untuk mengatur konflik politik, anarki murni dari konflik tak terstruktur sebagai hasil dari ketidakpercayaan primordial, dan pada khususnya peresmian peraturan oleh militer yang mempunyai monopoli atas kemampuan organisasi dan politik. Praktik-praktik demokratis tertutup dibawah kondisi-kondisi ini.

Kami menulis analisis teoretis politik dalam masyarakat

plural dengan menggambarkan preferensi etnis. Dengan memakai kerangka utilitas seperti yang dijabarkan, kami mengasumsikan bahwa individu mempunyai preferensi yang besar dalam masalah etnis dan oleh karenanya, dikarakteristikan oleh fungsi-fungsi utilitas. Kami menambahi asumsi tersebut dengan serangkaian asumsi tambahan :

- Pola persetujuan (ketidakpersetujuan) antar dan ínter komunal, dan
- Tujuan dan ambisi golongan elit.

Konsekuensi dari asumsi ini memberikan serangkaian harapan teoretis yang menyusun dan menerangkan bukti-bukti. Secara khusus, kami mencatat pembentukan “*cateris paribus*,” koalisi multietnis yang didasarkan secara luas selama periode formatif; bertahan hidupnya koalisi selama periode paska-kemerdekaan, didorong oleh pernyataan-pernyataan ambigu tentang masalah etnis divisive, dan tuntutan generasi atas masalah-masalah nasional; munculnya politisi yang ambisius (entepreneur politik) yang mencari keuntungan politis, yang memprovokasi untuk mendorong ke arah keinginan etnis; kebangkitan kembali politik dari kekalahan; hilangnya institusi perantara dan pengetnisan barang-barang publik, tidak bergunanya unsur-unsur moderat, dan akhirnya merosotnya kompetisi demokrasi akibat dari intrik elektoris dan kekerasan politis.

Kemudian kami mengobservasi bahwa proses merosotnya demokrasi seringkali bergantung pada kondisi-kondisi awal: pengalaman kolonial, peristiwa eksogen, dan konfigurasi etnis. Secara khusus, kami menekankan pada efek pentingnya distribusi populasi diantara masyarakat etnis di dalam gaya

kompetisi demokratis ketika populasi didistribusikan secara lebih menyeluruh diantara sejumlah kecil kelompok etnis, politik berlangsung terbalik secara kompetitif untuk beberapa saat. Di sisi lain, jika masyarakat tersebut diperlakukan curang untuk kepentingan masyarakat yang lain, kaum minoritas ingin merampas kekuasaan dan mempertahankan secara tidak sah, atau kaum mayoritas secara legal meraih kekuasaan, melangsungkan, dan menjamin posisi dominannya dengan memakai cara-cara manipulatif atau ekstra legal. Akhirnya, didalam kasus, proliferasi masyarakat etnis, kekacauan adalah bentuk masalah khusus yang melibatkan militer untuk mengamankan keuntungan tertentu.

Kami memberikan paradigma yang memberikan catatan dinamis perubahan sosial dalam masyarakat plural. Kami menyadari bahwa dalam beberapa hal, paradigma ini lebih ditonjolkan daripada yang lain. Kami juga melengkapi dengan representasi matematis dan reduksi yang tidak nampak, di sisi lain, kami bersandar pada intuisi yang didasari secara teoretis. Kami yakin paradigma ini dan wawasan yang membantunya memberikan pandangan “bebas yang mengejutkan” tentang dunia politik dalam masyarakat plural.

Paradigma yang ada tidak lengkap karena 2 alasan. Pertama menyangkut gap yang telah kami spesifikasi sebelumnya. Jalan untuk mendapatkan informasi tambahan dapat melalui :

1. Teori entrepreneur politik, dan
2. Tindakan formal formasi preferensi

Kedua, kami mengamati bahwa kekuatan peristiwa eksogen dapat mempengaruhi politik etnis dalam beberapa cara yang tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh: kesuraman krisis ekonomi, agresi eksternal, bencana alam dapat mengubah

bidang politik dalam masyarakat plural. Hal-hal tersebut kadang-kadang mengejutkan dan bersifat terbatas dalam ilmu pengetahuan.

Kami percaya bahwa sifat logis yang melekat dalam proses kompetisi demokratis dalam masyarakat plural adalah pemaksaan. Setidaknya, seperti apa yang telah kita ketahui di negara barat, demokrasi tidak dapat ditopang dibawah kondisi preferensi yang kuat dan bersifat penting karena hasilnya bernilai lebih dari norma-norma prosedural. Masyarakat plural dibatasi oleh preferensi warga negaranya, dan tidak memberikan lahan yang subur bagi nilai-nilai demokratis ataupun stabilitas.

Mobilisasi Protes

Protes komunal tampaknya tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah ataupun peneliti luar sampai pemimpin gerakan politik yang menuntut untuk mewakili kepentingan kelompok mengekspresikan protes tersebut secara koheren. Keotentikan tuntutan representatif sulit dinilai, karena organisasi-organisasi yang bersaing menuntut untuk mewakili kelompoknya, karena para peneliti jarang mempunyai akses langsung ke dalam bagian silang anggota-anggota kelompok, dan karena pemerintah yang di tantang oleh gerakan berdasarkan pada minoritas biasanya mencoba untuk tidak mempercayai atau meminimalisasai tuntutan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa bukti yang baik dari kepentingan dan aksi protes sebagian besar kelompok komunal berasal dari gerakan politik mereka. Pernyataan dan strategi kelompok komunal tersebut memberikan dasar bagi pengkodean protes kelompok. Empat poin umum yang harus diingat ketika mengevaluasi semua tuntutan dan bukti tentang kepentingan kelompok komunal.

1. Kepentingan kolektif bukanlah merupakan suatu kesatuan

Terdapat kepentingan individu yang beraneka macam dan kepentingan yang terbagi-bagi didalam setiap kelompok komunal. Seseorang dapat memperkirakan bahwa terdapat berbagai macam jumlah individu setiap minoritas yang tidak diuntungkan yang akan lebih senang menerima status quo atau netral, daripada secara aktif mengejar “sebab yang ada”. Tiap-tiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda : mereka yang mempunyai percampuran atau menjadi perantara bagi kelompok dominan mempunyai hak istimewa perlindungan, klen dan partai politik mempunyai kepentingan lokal dan memiliki badan-badan untuk mempromosikannya. Pertanyaannya adalah apakah terdapat kepentingan umum yang tidak dapat dikurangi, atau barang-barang kolektif yang untuknya anggota kelompok akan menyimpan uang untuk kepentingan yang berkenaan dengan agamanya.

2. Organisasi politik penting untuk memformulasikan dan mengekspresikan kepentingan kolektif.

Secara analitis, kita akan memutuskan bahwa orang-orang yang telah dikalahkan dan tidak diuntungkan mempunyai kepentingan kolektif obyektif dalam otonomi dan keadilan. Secara subyektif, interview jurnalistik dan penyelidikan pendapat umum menunjukkan bahwa individu korban diskriminasi memiliki persepsi ketidakadilan dan perasaan alienasi. Tindakan kolektif yang didukung dan pengaruh politik tergantung pada penyuaaraan serangkaian tuntutan dan strategi tindakan yang menggerakkan

kelompok orang yang substansial. Tuntutan dan strategi semacam itu hanya dapat disediakan oleh organisasi politik yang merepresentasikan dan mengejar tujuan kelompok. Struktur organisasi untuk mobilitas kelompok dapat berasal dari klan terdahulu atau hirarki agama, kadang-kadang dari asosiasi ekonomi atau partai politik konvensional tetapi didalam masyarakat modern tuntutan dan strategi itu biasanya diberikan oleh kelompok asosiasi yang baru, seperti gerakan Indian-Amerika dan organisasi kemerdekaan Kachin.

3. Ekspresi politis kepentingan kolektif lebih otentik dibandingkan yang lain.

Pada tahap awal dan tengah mobilisasi komunal menyerupai bazar politis dimana penjual menjajakan untuk bersaing intepretasi kepentingan kelompok dan taktik alternatif serta strategi untuk mempromosikannya. Para pesaing itu adalah pemimpin tradisional, pemimpin gerakan politis yang terjadi, kaki tangan pemerintah, liberasionalis militan, pendeta fundamentalis dan banyak lagi yang lainnya. Kompetisi dan perkelahian antara partai politik diantara mereka kadang-kadang berlanjut kesegala penjuru konflik komunal dan dapat menghancurkan akomodasi usaha. Pada prinsipnya, gerakan yang paling otentik adalah gerakan yang paling dapat mewakili kepentingan bersama kelompok. Dalam praktinya, anggota kelompok memutuskan apa yang penting dalam kepentingan mereka dengan mengakui dan memberikan dukungan kepada pemimpin dan organisasi tertentu, Oleh karena itu, satu-satunya standar penilaian yang diberikan kepada peneliti luar adalah bahwa organisasi yang paling otentik adalah

organisasi yang tuntutananya mempunyai validitas masa sekarang yang besar, organisasi seperti itulah yang terbesar dan paling tahan lama.

4. Kepentingan dan tujuan kelompok berubah selama terjadinya konflik komunal

Konsensus pada kepentingan umum cenderung untuk meningkat selama terjadinya konflik terbuka, menurut prinsip sosiologi yang ada konflik dengan musuh eksternal meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Akan tetapi, tidak ada tendensi yang kuat untuk gerakan komunal untuk menjadi lebih radikal atau moderat selama berlangsungnya konflik. Kita telah meneliti contoh-contoh dari kedua jenis perubahan itu. Yang jelas adalah bahwa perubahan didalam kebijaksanaan yang dilakukan oleh gerakan dan pemerintah menyebabkan beberapa individu dan unsur untuk menetapkan lagi kepentingan dan strateginya. Konsensus pemerintah cenderung untuk memotong sebagian besar gerakan militan karena beberapa anggota kelompok memutuskan bahwa lebih merah untuk mengabaikan tuntutan daripada berjuang meneruskannya. Disisi lain, penindasan oleh pemerintah cenderung untuk mencemari gerakan moderat karena para aktivis memutuskan bahwa mereka berada dalam konflik semua atau lebih sedikit daripada tidak, pengevaluasian yang meningkatkan dukungan organisasi siap memakai alat-alat militan yang lebih untuk mengejar tujuan yang lebih radikal.

*) Sebuah resitasi bersumber Rabushka, Alvin and Shepsle, Kenneth A., *Politics in Plural Societies, A Theory of Democratic Instability*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.

4. Negara Bangsa*)

1. Pendahuluan

Dalam pidato penerimaan hadiah Nobel di bidang sastra pada akhir 1950-an, Camus mengamati bahwa mereka yang lahir pada masa-masa awal Perang Dunia I akan berusia dua puluh tahun baik di masa Hitler berkuasa dan di masa percobaan revolusi pertama. Kemudian, untuk menyelesaikan pendidikan mereka, mereka dihadapkan pada Perang saudara Spanyol dan Perang Dunia II - kamp konsentrasi universal, sebuah Eropa yang penuh siksaan dan penjara. Sekarang mereka harus membesarkan anak-anak mereka dan melakukan pekerjaan di sebuah dunia yang terancam oleh penghancuran senjata nuklir. Jelas bahwa tidak seorangpun bisa mengharapka mereka untuk menjadi orang-orang yang optimis.

Sekarang anak-anak tersebut telah beranjak dewasa dan tidak ada alasan bagi mereka untuk sedikit merasa muram akan dunia di mana mereka telah menjadi lebih dewasa dari pada yang dibayangkan camus. Namun tradisi inti teori sosial masih berada sangat jauh dari dunia nyata, tidak saja dalam hal menganalisa alamnya, tetapi juga dalam hal mengembangkan pertimbangan-pertimbangan alternatif yang mudah dipahami.

Dari empat tatanan kelembagaan modernitas yang dibedakan dalam bagian-bagian awal tulisan ini, hanya dua yang terus mendapatkan perhatian dalam ilmu-ilmu sosial. Marxisme menitikberatkan terutama pada

interpretasi perkembangan masa lalu dan potensi transformasi kapitalisme di masa depan dengan memberikan tempat utama pada konflik antar kelas sebagai medium perubahan sosial. Ada banyak diskusi dan kritik tentang dampak industrialisme secara umum, dan dampak teknologi secara khusus, bagi kehidupan sosial di dunia kontemporer. Tetapi, dengan beberapa penting, baik meluasnya peran pengawasan (*surveillance*), maupun perubahan sifat kekuasaan militer dengan pengembangan cara memerangi industri tidak berperan penting dalam perumusan teori sosial. Saya akan mengkaji beberapa implikasi fenomena masalah- masalah analisa sosial di akhir abad dua puluh. Penilaian Camus termotivasi sebagian karena ketidaksukaan terhadap modernitas pada umumnya dan sebagian lagi karena adanya suatu kesadaran akan bahaya kekuasaan politik totaliter pada khususnya. Totalitarianisme merupakan sifat tendensial negara modern. Pemahaman terhadap asal-usul totalitarianisme, sebagai fenomena yang khas abad dua puluh, mensyaratkan analisa terhadap konsolidasi kekuasaan politik yang disebabkan Oleh perpaduan tehnik pengawasan maju dan tehknologi industrialisasi perang. Dibalik pernyataan ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara negara dan penyebaran kekuasaan militer di jaman sekarang -tidak saja sebagai isu analitis tetapi juga sebagai persoalan bagi Teori politik normatif. Bagaimana mungkin alat-alat kekerasan negara bisa didamaikan dengan gagasan politik tentang "*good society*"? Pertama, saya akan mengkaji sifat totaliter kekuasaan politik, dari situ beralih ke diskusi tentang

ketegangan-ketegangan yang berkaitan dengan dampak modernitas dan selanjutnya beralih lagi ke pertanyaan tentang 'teori kekerasan politik normatif'.

2. Totalitarianisme

Sejarah istilah 'totalitarianisme' sudah sangat dikenal, sekalipun konsepnya sendiri merupakan satu dari debat paling keras dalam teori politik. Ketika Gentile berbicara tentang : "*uno Stato totalitario*" atas nama Mussolini, ia hanya memiliki sedikit gagasan tentang penggunaan-penggunaan yang bisa diwujudkan oleh istilah tersebut di kemudian hari, maupun kontroversi-kontroversi yang akan dihadapinya. Kata tersebut pertama kali diciptakan sebagai kata yang memiliki konotasi yang sangat bagus dalam hal tatanan politik yang menjadi acuannya, di jaman ketika Mussolini masih membela kebebasan pers, menerima eksistensi partai-partai lain dan mendukung perekonomian pasar yang kompetitif. 'Totalitarian' mulai digunakan dalam serangan kritis terhadap fasisme Italia pada akhir 1920-an, ketika partai-partai oposisi ditindas secara brutal, semua serikat dagang kecuali yang disponsori negara diberangus, *Chamber of Deputy* dibubarkan dan kamp konsentrasi diciptakan, dengan pelembagaan hukuman mati bagi para lawan politik.

Sejak saat itu konsep tersebut telah mengalami berbagai perubahan. Kata tersebut telah diterapkan untuk berbagai pergerakan, partai, pemimpin dan gagasan, dan terutama untuk sistem politik. Negara atau pemerintahan yang diberi label totaliter terutama adalah negara fasis

Italia, Nazi Jerman dan Stalin Uni sovyet, tetapi juga Russia di bawah kekuasaan Czar, beberapa negara tradisional, khususnya Mesir dan Roma, negara-negara absolut, dan masyarakat fiksi seperti republiknya Plato. Ada sebagian pandangan yang menilai konsep ini sebagai "sundal konseptual tanpa asal-usul yang jelas, bukan milik siapa-siapa tetapi melayani semuanya". Di tengah campur-aduk penggunaan konsep kata ini terdapat beberapa garis kesepakatan umum yang diterima oleh beberapa penulis. Kebanyakan penulis berpendapat bahwa totalitarianisme, dalam bentuknya yang telah berkembang utuh, berasal dari jaman sekarang, yang kelahirannya kira-kira pada saat kata tersebut ditemukan. Konsep kata tersebut pada umumnya terutama dipahami secara politis, yang mengacu pada bentuk organisasi kekuasaan politik, yang memberikan konsentrasi penuhnya pada pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan oleh sempitnya batasan kepemimpinan. Definisi Friedrich barangkali merupakan definisi yang paling banyak dikutip dalam literatur. Totalitarianisme, menurutnya, berbeda "dengan otokrasi lain dan yang lebih tua" dan dengan "demokrasi tipe-Barat". Totalitarianisme memiliki karakteristik: "(1) ideologi totalis, (2) partai tunggal yang berkomitmen pada ideologi ini dan biasanya dipimpin oleh satu orang, yakni sang diktator, (3) polisi rahasia yang sangat maju; dan tiga jenis monopoli atau, lebih tepatnya, kekuasaan monopolistik: yakni kekuasaan monopolistik terhadap (a) komunikasi massa; (b) senjata operasional; (c) semua organisasi, termasuk organisasi-organisasi ekonomi."

Perbedaan antara totalitarianisme dengan 'demokrasi

tipe barat' adalah makna penting kuncinya dalam menjelaskan popularitas konsep ini dalam periode sejak Perang Dunia Kedua. Negara- negara totalitarianisme oleh para pengamat politik liberal dianggap termasuk bentuk-bentuk tatanan sosial yang memiliki basis industri maju, tetapi tidak menjalankan karakteristik kelembagaan demokrasi liberal. Sedangkan, jika mengacu pada totalitarianisme Italia atau Jerman yang menunjukkan fase transisi relatif dalam perkembangan sosial - yang dihentikan oleh perang - dalam kasus Uni Sovyet dan negara-negara Eropa Timur konsep ini digunakan untuk merujuk pada tipe tatanan sosial-politik *definitif* yang berbeda dengan negara-negara kapitalis, yang berkelanjutan selama tatanan tersebut tetap ada. Jika diaplikasikan sebagai karakteristik negara-negara Eropa Timur, 'totaliter' mengacu pada sistem politik yang dianggap menunjukkan karakteristik yang disebut Friedrich. USSR dan masyarakat negara sosialis digambarkan sebagai kekuasaan dengan sistem politik monolitik, yang didirikan di atas kecocokan kultural dan sosial yang muncul akibat penindasan dalam pembagian kepentingan. Pandangan ini sering dikaitkan dengan persamaan antara sosialisme Marxis dengan otoritarianisme, yang menghasilkan suatu negara yang *all-pervasive* (merambah ke mana-mana) , yang mengekang kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap kebijakan sewenang-wenang otoritas negara. Kolektivisme, sebagaimana yang diamati Belloc, bisa berasal dari motif-motif sederhana, tetapi dalam prakteknya justru melanggengkan kekuasaan negara 'Negara kapitalis

memelihara teori kolektivis yang dalam aksinya menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda dengan kolektivisme: *servile state* (negara yang merendahkan diri).

Jika pandangan ini benar, totalitarianisme tidak bisa dianggap sebagai fenomena yang berpotensi terjadi di semua negara modern. Totalitarianisme adalah jenis pemerintahan yang terkait dengan masyarakat fasis dan masyarakat tipe-Sovyet, yang bisa muncul di negara demokrasi liberal jika masyarakat tersebut mengalah pada kolektivisme. Karena itu di sini muncul dua pertanyaan. Sampai sejauh mana bisa dipahami jika menggambarkan Uni Sovyet dan negara-negara Eropa Timur atas dasar apa yang diungkapkan Friedrich? Apakah karakteristik tersebut ketika ditemukan, memiliki kesamaan yang dekat dengan masa-masa Fasis Eropa di mana saja? Karena kita harus menerima. menurut saya, bahwa totalitarianisme merupakan fenomena yang berbeda dengan bentuk-bentuk otokrasi yang ditemukan di negara-negara tradisional.

Dengan menguji sejarah USSR, telah terbukti bahwa rumusan Friedrich sangat cocok dengan masa pemerintahan Stalin, bukan pada fase awal perkembangan negara tersebut maupun tahun-tahun sejak kematian Stalin. Lenin mulai berkuasa di negara yang dikelilingi oleh negara-negara bagian yang saling bermusuhan, dalam situasi di mana perang saudara merebak di mana-mana, di mana muncul perlawanan keras dari kekuatan-kekuatan kontra revolusioner. Banyak langkah-langkah yang dilakukan Lenin dianggap sebagai langkah represif oleh berbagai standard nilai. tetapi, selain

pembelaannya terhadap 'partai barisan depan', adalah tidak jujur jika memandang Marxis-Leninisme di fase awalnya sebagai sebuah 'ideologi totalis', karena ideologi ini mengakui dan mentoleransi berbagai faksi dan organisasi. Lahirnya Uni Sovyet sesungguhnya jauh dari kecocokan dengan tiga kriteria terakhir yang disebutkan Friedrich, karena kekuasaan pemerintahan pusat yang sangat lemah terhadap wilayah-wilayah negara yang jauh lebih bebas dan aktivitas perekonomian yang masih sangat terdesentralisasi. Selain itu, mendekati akhir hidupnya Lenin harus menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh polisi rahasia, yang pada mulanya diambil alih dan dimodifikasi dari organisasi kiri oleh leluhur Tsarnya, dan kemudian mengubah menjadi sebuah agensi yang hanya berurusan dengan spionase dan ancaman serius kontra-revolusi.

Sejak pertengahan 1950-an, rejim Sovyet telah menjadi sangat lemah, akibat terputusnya hubungan dengan masa lalu stalinnya. Sekarang Friedrich terpaksa mengakui signifikansi fakta ini dengan berusaha memasukkannya ke dalam analisa dengan menekankan bahwa, sama halnya dengan negara-negara otokratik jaman dulu, totalitarianisme mengalami intensitas masa 'naik-turun' yang tajam dalam intensitasnya. Stalinisme terutama merupakan periode penting berlangsungnya intensifikasi teknik pemerintahan totaliter, yang diikuti oleh perubahan yang tetap tidak mengubah sifat dasar rejim tersebut. 'Siklusnya tampaknya bergerak maju menuju suatu ekstrim yang kadang-kadang diikuti oleh pembalikan radikal, suatu jalan kembali pada keadaan asli,

dan pengulangan kembali siklus tersebut. Perubahan yang terjadi setelah periode kepemimpinan Krushev dengan demikian bisa dijelaskan dengan sifat-sifat inheren sistem tersebut, yang tetap totaliter dalam institusi dasarnya. Bahkan di tahun-tahun penindasan Stalin yang paling ekstrim, 'kekuasaan total' tidak bisa dilakukan terhadap partai atau terhadap masyarakat secara keseluruhan; melunaknya kekuatan-kekuatan brutal pemerintahan dikondisikan oleh pemahaman masyarakat umum harus diberi ruang gerak cukup banyak untuk menentukan aktivitas mereka sendiri. Ini berarti bahwa dalam berbagai hal Friedrich telah melakukan penelusuran kembali gagasan-gagasan awalnya. Tetapi modifikasi gagasan ini sudah tidak masuk akal. Akan lebih meyakinkan jika mengatakan bahwa totalitarianisme, sebagaimana ia menggambarkan fenomena tersebut, bukan merupakan suatu konsep yang menunjukkan suatu tipe masyarakat secara keseluruhannya yakni masyarakat yang di temukan di USSR dan Eropa timur tetapi sangat tepat merujuk pada aspek terbatas pengalaman mereka, yaitu, Stalinisme. Justru selama naiknya Stalin proses politik internal di USSR menjadi sangat mirip dengan fasisme Italia dan Nazi Jerman. Ketiganya memiliki karakteristik yang dijelaskan Friedrich, tetapi juga ditandai oleh merajalelanya teror, yang menggunakan aplikasi kekuatan dalam mengejar tujuan - tujuan yang diinginkannya. Meskipun tidak muncul dalam definisi aslinya, tetapi hal ini barangkali tersirat dalam peran polisi rahasia yang disebutkan di atas, dan dalam tulisan berikut yang akan saya bahas secara langsung. Seperti yang dilakukan

Arendt, Neumann, dll, adalah benar jika menekankan signifikansi teror, yang kadang-kadang terjadi dalam totalitarianisme level paling bawah.

Jika kita membandingkan, bukan masyarakat tipe Sovyet dengan kapitalisme demokrasi liberal secara keseluruhan, tetapi Stalinisme, Nazisme dan fasisme Italia, baik dalam teori maupun prakteknya, maka kita akan menemukan banyak kesamaan. Ketiganya sesungguhnya cenderung mengalami apa yang diungkapkan Friedrich. setiap pemerintah yang diktator membentuk sistem simbol belum jadi menjadi basis ideologi pemerintahan yang kuat, yang disertai dengan penggunaan kekerasan untuk menindas para pembangkang. Fasisme Italia sejauh ini merupakan satu dari tiga ideologi yang paling sedikit melakukan pembunuhan. Angkatan kepolisian rahasia OVRA secara khusus dibentuk pada akhir 1920-an untuk membubarkan oposisi politik intern, yang melakukan penyensoran ketat terhadap kelompok-kelompok yang menentang. Namun demikian, pada 1930-an sekitar 20.000 orang di Italia didakwa di pengadilan khusus dan 10.000 orang dipenjarakan tanpa diadili. Seperti di negara-negara lain, di Italia juga terjadi personifikasi hukum, yang menjamin penguasa melakukan berbagai sanksi atas keinginannya terhadap para pembangkang. Jadi, pada 1926, Mussolini memperoleh hak mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat secara hukum sehingga sangat banyak orang yang menjadi korban selama pemerintahannya. Sebagai Pemimpin Tertinggi Sovyet, Stalin bisa secara pribadi mendominasi berbagai aspek dalam kebijakan negara. *The*

Enabling Act of 1933 di Jerman telah Hitler, sebagai Kanselir, hak membuat undang-undang untuk periode tertentu tanpa perlu adanya ratifikasi. Di setiap negara tersebut 'ideologi total' yang diungkapkan Friedrich didasarkan pada dorongan besar nasionalisme, yang menekankan perbedaan radikal antara komunitas nasional dan 'kelompok luar', dan berhubungan erat dengan figur pemimpinnya. Organisasi partai juga dibentuk di seputar afiliasidengan pemimpinnya, dan afiliasi ini dipengaruhi oleh slogan nasionalisme swadaya.

Penggunaan teror berlangsung di ketiga rejim ini, meskipun hilangnya nyawa tergolong lebih rendah di Italia dibandingkan dengan kedua negara lainnya. Teror diperbolehkan atas dasar persatuan nasional dan atas dasar keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan. 'Orang Jerman', menurut Hitler, telah memilih deputi tunggal sebagai wakil untuk 38 juta orang. Kita memiliki tanggung jawab yang sama terhadap masyarakat jika dibandingkan dengan parlemen manapun. "Di Italia diperlukan lebih dari empat tahun untuk bisa secara efektif menindas partai politik lain, tetapi di Jerman hal ini bisa dicapai secara radikal dan langsung, melalui pemenjaraan massal dan pembangunan kamp-kamp konsentrasi. Ketika pecah Perang, di Jerman ada sekitar seperempat juta orang yang dipenjarakan karena alasan politis dan angka ini bertambah tiga kali lipat di akhir masa permusuhan ini. Selama periode ini sekitar sebanyak dua belas juta orang dibunuh secara sistematis. Jumlah seperti ini juga pernah dialami di Uni Sovyet selama pemerintahan Stalin. Selama masa pembersihan ini sekitar satu juta orang telah

kehilangan hidupnya dan sekitar dua belas juta orang mati di kamp-kamp kerja paksa; barangkali sekitar dua puluh juta orang meninggal sebagai dampak langsung penggunaan kekerasan sebagai alat represi politik selama keseluruhan periode pemerintahan Stalin. Di Uni Sovyet, seperti Jerman, kamp-kamp kerja paksa memberi kontribusi besar bagi kinerja negara tersebut selama perang. Dua puluh persen rel kereta api di negara tersebut dibangun oleh para pekerja dari kamp-kamp kerja paksa dan 75 persen penambangan emas dikerjakan oleh pekerja yang sama. Tetapi tidak di kasus manapun keberadaan kamp-kamp tersebut lebih menguntungkan secara ekonomis.

Di ketiga negara tersebut, penggunaan kekerasan secara sistematis digabungkan dengan penggunaan jaringan polisi rahasia, yang karena memiliki kekuasaan besar untuk menahan para pembangkang politik, maka fenomena ini menjadi sangat terkait dengan pengarahannya negara yang kaku terhadap aktivitas kultural. Meluasnya penggunaan kekerasan, menurut Arendt, cenderung dipadukan dengan kontrol ketat terhadap produksi kultural, karena maksud ancaman dengan kekerasan adalah untuk memelihara ketakutan sehingga tercipta iklim yang akan memudahkan pelaksanaan propaganda.

Ketika Stalin memutuskan untuk menulis ulang sejarah Revolusi Russia, propaganda sejarah versi baru meliputi tindakan penghancuran tidak saja dokumen maupun buku-buku lamanya tetapi juga penulis dan pembacanya: publikasi di tahun 1938 sejarah resmi baru Partai Komunis merupakan tanda bahwa pembersihan besar-

besaran yang telah membinasakan seluruh generasi intelektual Sovyet telah berakhir. Demikian pula, kaum Nazi wilayah-wilayah pendudukan Timur pada mulanya menggunakan propaganda antisemitik untuk menguasai kontrol masyarakat. Mereka tidak membutuhkan menggunakan teror untuk mendukung propaganda ini. Ketika mereka membunuh sebagian besar kaum terpelajar Polandia, mereka melakukannya bukan karena perlawanan mereka, tetapi karena menurut doktrin mereka orang Polandia tidak berintelek, dan ketika mereka berencana untuk menculik anak-anak bermata biru dan berambut pirang, mereka tidak bermaksud menakut-nakuti masyarakat, tetapi ingin menyelamatkan 'darah Jerman'.

Ini tidak menunjukkan, tambahannya, bahwa dalam totalitarianisme teror merupakan cara sekunder dalam mengontrol produksi kultural. Sebaliknya, teror terus digunakan oleh rejim totaliter bahkan ketika masyarakat, atau bagian terkait dalam masyarakat tersebut, tidak bereaksi apa-apa. Karena itu teror, sebagaimana adanya, merupakan medium penting bagi pemerintah. Pandangan ini benar dalam satu segi, tetapi masih harus dipertanyakan dari segi lain. Karena telah digunakan untuk menaklukkan kelompok sosial tertentu, atau untuk mengamankan kebijakan tertentu, penggunaan kekerasan secara terpadu cenderung berlanjut seperti sebelumnya. Di sisi lain, di masing-masing dari ketiga negara tersebut, persetujuan masyarakat secara diam-diam tidak diperoleh melalui paksaan, atau bahkan oleh penyebaran proganda. Ketiga rejim tersebut, terutama pemimpin mereka, memelihara dukungan aktif dan antusias cukup besar dari berbagai

sektor dalam masyarakat. Para mahasiswa yang mempelajari totalitarianisme harus bisa menjelaskan hal ini maupun peran teror dalam memobilisasi masyarakat agar mendukung doktrin yang dikeluarkan otoritas negara. Tentu saja dukungan massa sebagiannya dipengaruhi oleh beberapa program yang secara cermat dipadukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, *National Socialist* memberi perhatian yang sangat besar terhadap perencanaan aktivitas waktu luang masyarakat agar bisa mengembangkan semangat persatuan nasional yang mereka inginkan. Semua bentuk rekreasi komunal diorganisir lewat kader-kader lokal partai, di bawah arahan pusat. Tetapi antusiasme masyarakat terhadap Nazi dan dukungan aktif terhadap pemimpin mereka hampir tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab program-program tersebut.

Menurut saya konsep Friedrich tentang totalitarianisme sudah akurat dan berguna. Totalitarianisme bukan menjadi karakteristik negara-negara tradisional, tetapi hanya merupakan karakteristik negara-bangsa yang menjalankan totalitarianisme di masa-masa sekarang; ciri-ciri utamanya bisa ditentukan berdasarkan kriteria Friedrich. Tetapi 'totalitarian' bukan merupakan kata sifat yang bisa dilekatkan pada suatu tipe negara, apalagi untuk negara-negara bergaya Sovyet pada umumnya. Totalitarianisme lebih mengacu pada tipe pemerintahan, yang tidak stabil dalam aspek-aspek pentingnya, tetapi mampu menimbulkan konsekuensi sangat besar bagi masyarakat yang merasakan bagian terberat akibat konsentrasi kekuasaannya.

Totalitarianisme, setidaknya sejauh ini merupakan suatu fenomena yang berhubungan terutama dengan fasisme Italia, Nazisme, dan Stalinisme, tetapi ada contoh lain yang termasuk dalam kategori ini misalnya, pemerintahan Pol Pot di Kamboja. Walaupun, tentu saja, ada banyak perbedaan antara semua contoh ini, tetapi semuanya memiliki benang merah yang sama. Karakteristik umum ini berhubungan dengan ciri-ciri negara modern pada umumnya; tidak ada tipe negara-bangsa di jaman sekarang yang sepenuhnya kebal dari potensialitas untuk menjadi pelaku pemerintahan yang totaliter.

Untuk menganalisa sifat totalitarianisme, kita harus menelusuri kembali suatu jalan lewat beberapa argumen utama tulisan ini. Negara-bangsa secara mendasar sangat berbeda dengan negara tradisional dalam hal pemaksimalan pengawasan yang, dikombinasikan dengan pengamanan internal, membentuk persatuan administratif yang berhubungan dengan batas-batas nyata. Totalitarianisme tidak bisa ada dalam negara tradisional karena karakter segmentalnya berbeda dengan tuntutan adanya mobilisasi pemusatan sumber daya. Beberapa ciri kekuasaan totaliter memang ada dalam beberapa negara tradisional, tetapi tidak dalam kombinasi menyeluruh antara satu dengan yang lainnya. Jadi, apa yang disebut Friedrich sebagai ‘ideologi totalis’ lebih merupakan norma dari pada suatu pengecualian dalam masyarakat yang dibagi berdasarkan kelas-kelas. Sedikitnya jumlah anggota masyarakat yang melek huruf, terjadinya fusi antara teokrasi dan kekuasaan militer, serta tidak adanya suatu ‘wilayah publik’ dalam pengertian modern, biasanya

mendorong terbentuknya dominasi suatu kultur simbolik yang mengikat, tetapi hal ini tidak bisa menjadi ‘propaganda afektif’ sejauh targetnya adalah keseluruhan masyarakat, karena adalah mustahil bagi otoritas negara untuk memastikan bahwa ‘propaganda’ tersebut telah disalurkan secara sistematis kepada seluruh masyarakat. Polisi rahasia adalah hal yang umum dalam negara tardisional, tetapi biasanya ruang lingkup pengaruh mereka terbatas pada kalangan elit dan dunia pemerintahan. Teror dalam arti penggunaan kekerasan berskala besar untuk menaklukkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok masyarakat, khususnya masyarakat terjajah, merupakan hal yang sangat umum dalam perjalanan sejarah. Tetapi dalam skala pembantaian dan brutalitas historis tidak ada yang mampu menyaingi degradasi yang ditimbulkan totalitarianisme.

Kemungkinan terbentuknya pemerintahan totaliter bergabung pada eksistensi masyarakat yang negaranya bisa dengan mudah menyusup ke dalam kehidupan keseharian sebagian besar penduduknya. Keadaan ini jelas menuntut adanya pengawasan tingkat tinggi, terdaskan syarat-syarat yang dianalisa sebelumnya pengkodean informasi tentang dan pengawasan terhadap perilaku segmen tertentu dalam masyarakat. Totalitarianisme, terutama, merupakan suatu pemfokusan pengawasan ekstrim, yang dilakukan demi mempertahankan tujuan politik dan karena itu menuntut adanya mobilisasi politik, pengawasan cenderung menjadi terkonsentrasi (a) dalam penggandaan bentuk-bentuk dokumentasi masyarakat oleh negara kartu identitas, segala macam perijinan, dan

berbagai jenis surat resmi, harus dimiliki semua anggota masyarakat dan digunakan untuk mengikuti aktivitas yang paling umum sekalipun; dan (b) hal tersebut menjadi landasan bagi perluasan pengawasan terhadap aktivitas tersebut, yang dijalankan oleh polisi atau agen-agensya.

Pencapaian tujuan mobilisasi yang dilakukan pemerintahan totaliter cenderung melibatkan nasionalisme, karena sentimen nasionalis merupakan alat ideologis utama untuk mengikat masyarakat dan bukan memecah-belahnya. Nasionalisme merupakan hal penting dalam menghadirkan aspek ‘total’ dalam doktrin totaliter karena nasionalisme memiliki ‘historisitas simbolik’, yang di dalamnya terkandung mitos asal-usul manusia, tetapi nasionalisme juga menawarkan nasib bersama di masa depan yang harus diperjuangkan. Pemikiran fasis cenderung diambil dari unsur-unsur cita-cita nasionalis yang menimbulkan sifat-sifat agresif, eksklusif nasionalis Janus. Marxisme, sebagaimana diungkapkan dalam kritik-kritiknya, bisa dengan mudah beradaptasi dengan tujuan mesianik dan merupakan *locus classicus* historisitas yang dianggap bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang imanen (abadi). Namun, Stalinisme merupakan percampuran pemikiran nasionalis, yang dengannya gagasan ‘sosialisme di satu negara’ dianggap cocok. Apakah berkaitan dengan Marxis-Leninisme atau tidak, nasionalisme selalu menghadirkan dirinya dalam bentuk propaganda massa, karena seluruh komunitas dianggap memiliki nasib yang sama.

3. Unsur-unsur Pemerintahan

1. Pemfokusan pengawasan seperti:
 - (a) pengkodean informasi, dokumentasi aktivitas masyarakat
 - (b) pengawasan aktivitas, intensifikasi tugas polisi
2. 'Totalisme moral': nasib komunitas politik ditanamkan dalam historitas manusia
3. Teror: pemaksimalan kekuasaan polisi, yang terkait dengan penyelesaian dengan cara perang dan pengucilan
4. Menonjolnya figur pemimpin : pemimpin memberikan kekuasaan bukan berdasarkan profesionalisme peran militer, tetapi berdasarkan besarnya dukungan massa.

Pengawasan dengan menerapkan intensifikasi tugas polisi cenderung berubah menjadi teror, sekalipun untuk alasan yang sangat sepele. Contoh yang paling jelas adalah bahwa polisi cenderung menerapkan metode penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dalam konteks di mana kejahatan dikaitkan dengan pandangan politik yang berlawanan, dan bukan dikaitkan dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Yang jauh lebih penting lagi adalah kemampuan polisi atau paramiliter dalam menggunakan teknologi perang untuk menghadapi masyarakat tak bersenjata. Tank, mortir, senjata mesin yang digunakan untuk menghadapi masyarakat sipil, meskipun hanya sekedar mengancam dan tidak sungguh-sungguh digunakan, membuktikan bahwa kontrol fisik dalam tugas polisi di

jaman sekarang jauh lebih besar dari apa yang bisa dicapai di negara-negara tradisional. Hal ini sangat memungkinkan jika cara-cara kekerasan difokuskan pada kelompok masyarakat tertentu, dan bukan digunakan sebagai instrumen negara untuk mengontrol seluruh komunitas politik. Ketika digabungkan dengan metode pengucilan yang telah dilakukan dengan baik dalam konteks kekerasan lain, konsentrasi aplikasi penggunaan kekerasan terhadap kelompok minoritas bisa menjadi sangat intens. Istilah ‘kamp konsentrasi’ telah menyiratkan makna ini dan merupakan ‘institusi total’ yang paling ‘total’ yang dengan sendirinya menjadi prototipe teror totaliter. Teror di sini, seperti yang dikatakan Arendt, tidak berhubungan dengan persoalan menimbulkan ketakutan atas nama teror itu sendiri, tetapi lebih mengekspresikan ekstrimitas ‘penyimpangan’ yang disematkan kepada mereka yang terlibat di dalam penyimpangan tersebut, agar bisa melindungi mayoritas masyarakat yang berada di luar lingkup tersebut.

Aspek kunci totalitarianisme, yang tanpa aspek ini maka aspek lain tidak mungkin terjadi, atau setidaknya aspek-aspek lain tidak akan menyatu dalam sistem pemerintahan yang kohesif (mengikat), adalah adanya figur pemimpin. Pemimpin mengambil semua kekuasaan yang sebelumnya dimiliki pengadilan hukum, lembaga politik, atau yang dimiliki pejabat negara lain. Hal ini bisa dicapai sebagiannya karena penggunaan teror, pembersihan terhadap mereka yang tidak sepakat dengan kebijakan tertentu atau dalam hal

tertentu bisa menjadi sumber perlawanan bagi mereka. Tetapi pihak kepolisian maupun militer juga harus memiliki afiliasi

Pribadi tingkat tinggi dengan pemimpin sekaligus mendapat dukungan besar dari sebagian besar segmen masyarakat umum. Menurut tesis saya, yang berbeda dengan tesis Arendt, teror bukanlah landasan utama bagi pemerintahan totaliter, tetapi bahwa dukungan masyarakatlah yang membentuk pengaruh politik yang di dalamnya teror bisa digunakan untuk menghadapi berbagai kategori 'penyimpang'. Penjelasan mengenai peran figur pemimpin dalam pemerintahan totaliter bisa ditemukan dalam pembahasan umum menyangkut nasionalisme yang telah dikemukakan sebelumnya. Tiga contoh utama tentang pemerintahan totaliter maju semuanya berawal dari bayang-bayang perang yang baru saja berakhir dan bayang-bayang perang baru yang sesaat lagi akan dimulai. Ketika mereka mulai berkuasa para pemimpin tersebut, serta organisasi partai yang mereka pimpin., mengkaji atmosfer tak terselesaikan ini dengan retorika mereka sendiri. Dalam situasi semacam ini, sebagaimana menurut teori psikologi Le Bon/Freud tentang kepemimpinan, ada suatu kecenderungan kuat untuk mengidentifikasi diri dengan figur pemimpin, berdasarkan ciri regresif kepribadian. Masyarakat akan mudah terpengaruh oleh simbol-simbol yang dipropagandakan figur pemimpinnya, yang kepadanya diberikan kepercayaan yang berlebihan walaupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemimpin tersebut lebih bersifat

menghukum. Kualitas/sifat **mesianik yang** sering mendorong bangkitnya sentimen nasionalistik disini kemudian berubah menjadi bentuk ekstrim dalam diri pemimpinnya, yang diberi kepercayaan karena sifatnya yang sangat otoriter dan bukan karena hal lain. Identifikasi regresif terhadap figur pemimpin mengakibatkan penolakan terhadap penilaian moral yang pemimpinnya diterima dengan begitu bersemangat. Orang menjadi "*suggestible*" (mudah dipengaruhi), menurut istilah Le Bon, oleh apa yang dianggap pemimpinnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Militansi yang disebabkan oleh ketergantungan pada figur pemimpin cenderung disertai dengan afiliasi Psikologis kuat terhadap suatu "kelompok-dalam", yang menjadi simbol pemimpin, dan diikuti oleh penolakan ekstrim terhadap "kelompok-luar", yang tidak memiliki sifat khusus yang mengikat pemimpin dan pengikut - pengikutnya.

Kecuali namanya, totalitarianisme merupakan fenomena yang sudah ada sebelumnya dan memiliki hubungan langsung dengan beberapa perubahan besar di negara-negara modern. Biarkan saya menunjukkannya dengan lebih singkat, yang bergerak dari 4 sampai 1 dikarakterisasi terdahulu tentang pemerintahan totaliter. Sejauh poinnya adalah 4, maka isu yang dikaji adalah kemungkinan terjadinya personalisasi kekuasaan di negara-negara modern. Bentuk dominasi semacam ini merupakan prototipe negara tradisional, tetapi ada dua pengecualiannya- Yunani Klasik dan Republik Roma, Eksistensi

'kediktatoran' dewasa ini harus dipahami dalam latar belakang pengakuan universal terhadap poliarki. Tingkat personalisasi kepemimpinan yang sangat tinggi bisa ditemukan di semua sistem poliarki, sebagaimana diungkapkan dan diperjuangkan Weber. Apa yang ia sebut dengan 'karisma' barangkali terletak pada dinamika kepemimpinan yang sangat psikologis, sebagaimana personalisasi kepemimpinan mampu membentuk dukungan massa personalisasi kepemimpinan, tentu saja, bisa dikaitkan dengan pemerintahan militer. Orang yang mendapatkan kekuasaan politik tidak melalui mekanisme pemilihan yang ada, tetapi lewat serangan dengan kekuatan bersenjata di mana orang tersebut adalah komandannya atau menjadi orang penting dalam kabinet militer yang berkuasa. Penguasa semacam ini akan menjadi 'diktator' dalam pengertian bahwa, dengan mengontrol semua alat kekerasan, ia akan mampu mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap semua masyarakat yang menentanginya, setidaknya untuk periode waktu tertentu. Tetapi melihat kesulitan inheren dalam mempertahankan pemerintahan militer, 'kediktatoran' semacam ini tidak mungkin bertahan kecuali penguasa tersebut mampu menumbuhkan komitmen luas masyarakat sipil dalam jumlah yang cukup besar.

Sejauh ini situasi paling umum di mana kekuasaan yang sangat personal muncul adalah ketika suatu pemerintahan terbentuk akibat pengaruh suatu gerakan sosial - sekali lagi menunjukkan pentingnya 'karisma'. Hal seperti ini terjadi di masing-masing dari tiga

situasi utama dalam kekuasaan totaliter, yakni kondisi yang mengakibatkan munculnya gerakan yang juga mempengaruhi kekuatan afiliasi personal yang bisa didapatkan pemimpinya. Stalin adalah 'pewaris' tahta Lenin, tetapi mampu mempertahankan kepemimpinan personal karena gejolak perubahan yang diprakarsai oleh Revolusi Oktober masih sangat kuat, Lenin meninggal dunia terlalu mudah setelah ia menguasai pemerintahan karena pada saat itu ia baru saja memulai suatu proses utuh rutinisasi karisma. Karena pengaruh gerakan sosial dalam kehidupan politik bangsa-bangsa modern masih sangat kuat, dipandang dari sudut 'wilayah-wilayah historisitas' yang diciptakan kultur modern, maka personalisasi kepemimpinan tentu saja tetap menjadi ciri penting kehidupan politik di berbagai negara.

Ikatan antara pemimpin karismatik dengan gerakan sosial yang mendapatkan kekuasaan pemerintahan merupakan sebagian alasan yang bisa menjelaskan mengapa pemberlakuan teror tetap menjadi suatu kemungkinan. Gerakan sosial merupakan bentuk ikatan yang dinamis, yang menitikberatkan pada mobilisasi perubahan berdasarkan pendirian kuat yang tidak perlu menyisakan banyak ruang untuk opini - opini alternatif. "Dukungan moral" yang bisa diperoleh seorang pemimpin populer dari pengikutnya, yang digabungkan penguasaan alat kekerasan modern, akan menumbuhkan kemampuan represif (menindas) yang sesungguhnya sangat besar. Sejak Revolusi Perancis, teror selalu dikaitkan terutama dengan aktivitas rejim

pasca-revolusioner dan berlanjut terus sampai pada abad dua puluh. Namun pada skala yang lebih kecil teror harus dianggap sebagai kemungkinan yang selalu ada dalam sistem politik modern kata dimana terdapat masalah akut menyangkut kemampuan memerintah. Di sini isu yang terlibat menyatu dengan beberapa isu yang menggunakan peran internal kekuatan bersenjata dalam melawan kedamaian. masyarakat suatu negara-bangsa. Tugas polisi yang didasarkan oleh penggunaan kekerasan secara luas, dan yang didukung oleh kekuatan paramiliter atau tentara, pada dasarnya merupakan kemungkinan yang bisa terjadi di semua bentuk negara . Adalah penting dalam negara modern untuk mempertanyakan teori politik mengenai penguasaan alat kekerasan secara umum,dan hal ini akan dibahas di bagian berikut.

Totalisme moral' dalam hal ini dikaitkan dengan pengaruh luas historisisme dalam kultur modernitas. Dalam lingkungan politik 'totalisme moral' sangat berhubungan dengan doktrin kaum nasionalis di dunia modern tetapi, dengan cara yang lebih umum, Juga berhubungan dengan pengaruh gerakan sosial. Membicarakan ' totalisme' tidak berarti bahwa kita menerima tesis yang dikemukakan Talmon dan yang lainnya, yang mengemukakan bahwa kecenderungan terhadap totalitarianisme disebabkan oleh generalisasi pengaruh doktrin-doktrin tentang '*popular will*' (kehendak masyarakat) wasit organisasi politik. Keseluruhan signifikansi poliarki di negara-negara modern selalu berkaitan dengan totalitarianisme -

berdasarkan rumusan saya tentang konsep tersebut dan bukan berdasarkan rumusan Talmon - karena keterlibatan secara poliarkis dalam sistem politik akan menimbulkan kemungkinan mobilisasi massa kalau tidak dihalangi. Tetapi efek 'totalisasi' sistem simbol sangat bergantung pada sejauh mana sistem simbol tersebut bisa dicocokkan sedemikian rupa sehingga bisa mengkaitkan historisitas dengan sikap memusuhi 'kelompok luar'. Dalam hal ini Marxisme bisa dimanfaatkan, sebagaimana berbagai arus pemikiran modern lain yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan kekuasaan totaliter. Tetapi, seperti nasionalisme, Marxisme merupakan *Janus-faced* (bermuka-Janus) dan bisa memberikan kritik- kritik radikal terhadap doktrin-doktrin yang totaliter.

Masalah-masalah ini telah banyak dibahas dalam literatur tentang ilmu politik, tetapi di sini saya akan memberi perhatian besar pada pengaruh pengawasan. Makna penting pengawasan sebagai medium kekuasaan belum terjangkau dalam tradisi teori politik sosialis maupun liberal. Ini disebabkan karena kedua tradisi politik tersebut memiliki penekanan sama yang cenderung menghambat keberhasilan penguasaan alat kekerasan dalam mempengaruhi organisasi sosial dan perubahan sosial. Pertukaran ekonomi dianggap sebagai kekuatan pengikat mendasar dalam masyarakat modern. Dalam sosialisme pada umumnya, dan Marxisme pada khususnya, bentuk kekuasaan opresif (menindas) diuji dalam dinamika kelas dan dalam beberapa pengertian — langsung atau tidak langsung

— dihubungkan dengan dampak dominasi kelas. Analisa terkemuka Marx tentang Bonapartisme adalah contoh kasusnya. 'Kekuasaan otokratik' yang dikembangkan negara di bawah kepemimpinan Louis Bonaparte dianggap berasal dari 'keseimbangan' antara kelas - kelas yang saling bertentangan sehingga memungkinkan aparat negara untuk ikut campur di dalamnya. Penulis-penulis Marxis selanjutnya telah mengalami berbagai perubahan konsep tentang kekuasaan administratif negara walaupun masih tetap mengakui bahwa sebab kekuasaan negara berasal dari dampak dominasi kelas. Di sisi lain, bagi para penulis-penulis liberal kekuasaan negara sangat terkait dengan birokrasi, pengaturan birokratis merupakan tuntutan dalam mengkoordinasi kerangka perekonomian suatu pembagian kerja yang kompleks.

Tidak satupun tradisi pemikiran ini menempatkan pengawasan, atau mekanisme pengontrolan 'penyimpangan' sehubungan dengan konsolidasi administratif negara modern, sebagai hal penting. Pengawasan bisa berinteraksi dalam berbagai cara dengan dominasi kelas tetapi, seperti ditekankan sebelumnya, pengawasan bukan merupakan turunan dari dominasi kelas. Birokrasi melibatkan bentuk-bentuk aktivitas pengawasan, dalam dua pengertian tentang pengawasan. Tetapi tema yang menjadi fokus perhatian berbagai penulis (termasuk Weber) ketika menganalisa birokrasi administrasi cenderung mengenyampingkan beberapa hal yang saya tekankan di sini. Kekuasaan birokratis, menurut pemikiran

Weber, merupakan kekuasaan para pakar dan pejabat dengan spesialisasi tertentu. Persoalan menyangkut pengawasan, dalam keseluruhan konteks negara-bangsa, adalah persoalan yang agak berbeda.

Perluasan pengawasan dalam tatanan politik modern, yang digabungkan dengan tindakan pengamanan terhadap mereka yang 'menyimpang', secara radikal mentransformasikan hubungan antara otoritas negara dan masyarakat yang diperintah, jika dibandingkan dengan negara tradisional. Kekuasaan administratif sekarang telah semakin menyusup ke dalam setiap segi kehidupan keseharian dan tindakan serta hubungan manusia yang paling pribadi. Dalam jaman yang hari demi hari selalu dikuasai oleh bentuk-bentuk penyimpanan, pemeriksaan dan penyebaran informasi secara elektronik, kemungkinan terjadinya akumulasi informasi yang terkait dengan praktek pemerintahan hampir tak pernah ada akhirnya. Kontrol informasi dalam negara modern aman yang memiliki sistem komunikasi, transportasi yang sangat cepat dan teknik penyitaan yang canggih, bisa berintegrasi langsung dengan pengawasan tingkah laku sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemusatan kekuasaan negara yang tinggi. Pengawasan merupakan tuntutan penting dalam kekuasaan administratif negara, apapun tujuan dari kekuasaan tersebut. Pengawasan tidak hanya terkait erat dengan poliarki tetapi lebih khusus berhubungan dengan aktualisasi hak kewarganegaraan. Misalnya dalam hal hak ekonomi. Ketentuan mengenai kesejahteraan tidak bisa diorganisir atau didanai

kecuali ada pemantauan ketat dan rinci terhadap berbagai karakteristik kehidupan masyarakat, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat sesungguhnya adalah penerima kesejahteraan yang tepat atau tidak. Semua informasi semacam ini kemudian dikumpulkan dan menjadi sumber potensi kebebasan bagi mereka yang kebutuhan materialnya dipenuhi melalui jatah kesejahteraan. Tetapi informasi tersebut juga bisa menjadi alat untuk mengatur aktivitas mereka secara terkoordinasi berdasarkan doktrin politik yang dikeluarkan oleh otoritas negara, yang jelas berhubungan dengan fakta bahwa pemerintahan otoriter bisa meningkatkan skala kesejahteraan sekaligus membatasi hak-hak sipil dan politik masyarakat.

Hubungan antara pengawasan dan tugas pengamanan justru menimbulkan kemungkinan lain bagi terjadinya penindasan politik yang kembali lagi kepada totalitarianisme, tetapi agak berbeda dalam bentuknya. Penciptaan konsep 'penyimpangan' dalam negara-negara modern berhubungan dengan fakta penindasan yang dilakukan negara. 'Penyimpangan' bukan merupakan kumpulan aktivitas atau sikap yang terpisah dengan pengoperasian pengawasan negara, tetapi 'penyimpangan' dibentuk di dalam dan melalui aktivitas dan sikap tersebut. Kini, walaupun berbeda dengan sebagian besar - meskipun tidak semua — bentuk penghukuman tradisional, perbaikan/koreksi 'penyimpangan' telah menjadi persoalan penyangkut moral; namun bentuk perbaikan ini masih banyak

didasarkan pada pertimbangan pragmatis. Tugas pengamanan di negara-negara tidak lagi sekedar menjadi persoalan administrasi “teknis” . Di dalam tugas ini teletak sangat banyak persoalan kompleks menyangkut teori politik normatif. Kita tidak perlu jauh-jauh mengatakan bahwa setiap tindakan kriminal merupakan dakwaan tatanan sosial yang ada, atau bahwa pembicaraan tentang ‘sakit mental’ telah membuka wawasan realitas baru bagi wawasan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, untuk memandang bahwa praktek memasukan para pembangkang ke dalam rumah sakit jiwa seperti yang dilakukan di Sovyet berkaitan erat dengan tindakan 'perbaikan' yang dilakukan di negara modern secara keseluruhan.

Pembahasan ini memiliki dua implikasi. Pertama, pengawasan (dan berbagai bentuk dan aspeknya) harus dianggap sebagai sumber independen terbentuknya kekuasaan, yang banyak terjadi di negara- negara modern, yang harus mendapat perhatian yang sama banyaknya dalam kritik sosial seperti dalam persoalan menyangkut kesenjangan material atau sifat poliarki. Tulisan dari analis yang paling cermat, Foucault, menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya pengawasan yang menindas tidak bisa dilawan hanya dengan menghubungkannya dengan dinamika kelas atau dengan pengembangan demokrasi, dan bahwa tidak ada program politik yang sederhana dan jelas yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan ini. Tetapi kita juga harus menyimpulkan bahwa aspek-

aspek kekuasaan totaliter selalu merupakan ancaman bagi semua negara modern, meskipun tidak semuanya mendapatkan ancaman yang sama atau cara yang sama. Suka atau tidak, kecenderungan terhadap kekuasaan totaliter merupakan ciri khusus dalam epos kita sekaligus menjadi ciri khusus di jaman industrialisasi perang sekarang ini.

4. Dimensi Modernitas

Ada empat kelompok lembaga yang berhubungan modernitas melalui cara yang agak berbeda dengan sebelumnya. Pertama dengan secara singkat mengulangi beberapa imterpretasi utama yang ditawarkan dalam tulisan ini, saya akan mencoba menunjukkan cara menerapkan interpretasi tersebut pada berbagai sebab terjadinya ketegangan dan konflik di negara negara modern.

Dengan menghubungkan empat poros , saya ingin menampilkan potensi hubungan erat yang bisa terjadi antara kelompok-kelompok tersebut. 'Hak milik pribadi' dalam gambar ini tidak mengacu terutama pada kepemilikan modal yang ditentukan secara hukum, tetapi pada penyekatan ekononi dan politik yang dibahas sebelumnya. bahkan di masa-masa jayanya wira usaha pribadi apa yang dianggap sebagai milik 'pribadi' harus ditentukan oleh apa dianggap milik 'publik', yakni oleh negara, sebagai penjamin hukum secara teritorial. Di fase terakhir perkembangan kapitalis, di mana perusahaan-perusahaan besar cenderung menyatukan kepemilikan saham yang luas,

dan ketika pemerintah secara langsung mengelola sektor-sektor industri besar, persamaan kontrol wira usaha kapitalis yang milik 'individu' dan 'swasta' menjadi tidak cocok. Ini bukan karena — sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa interpretasi — kapitalisme telah hilang ketika munculnya beberapa bentuk produksi lain, tetapi karena rumusan yang mengidentifikasi kapitalisme dengan aktivitas wira usaha individu menjadi tidak efisien. Di sini terjadi kebingungan terhadap masa tertentu dalam perkembangan wira usaha ekonomi modern — 'kapitalisme wira usaha' — dengan kapitalisme sebagai tipe umum bentuk produksi. Hubungan antara harta milik pribadi dengan kelas sangat dekat dan langsung dan menjelaskan mengapa 'masyarakat kapitalis' merupakan 'masyarakat kelas'. Tidak ada alasan bagi kita untuk memperdebatkan garis-garis umum posisi Marx dalam kaitan dengan struktur kelas kapitalisme, yang bergantung pada persimpangan modal sebagai komodifikasi produk dengan buruh sebagai komodifikasi buruh-kekuasaan. Namun, syarat-syarat komodifikasi buruh-kekuasaan tidak sama. Diferensiasi ekonomi lain selain tidak adanya kepemilikan harta milik dalam alat-alat produksi termasuk dalam strukturasi kelas.

Baik harta milik pribadi maupun konflik kelas secara keseluruhan tidak memiliki peran penting dalam sejarah sebagaimana yang dikemukakan Marx. Dalam kapitalisme, hubungan dan perjuangan antar kelas menjadi sangat signifikan, tetapi hal ini tidak bisa

digeneralisasikan kembali pada tipe masyarakat yang ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan sumber (penyebab) independen terjadinya pengelompokan lembaga dalam semua masyarakat kelas maupun modern. Dalam dua aspeknya, pengawasan merupakan hal mendasar bagi semua organisasi sosial, negara yang secara historis menjadi bentuk organisasi yang paling kosekuensial, tetapi kemudian hanya menjadi satu organisasi di antara berbagai organisasi lain. Dalam negara-bangsa intensitas pengawasannya sangat berbeda dengan pengawasan di tipe-tipe tatanan sosial sebelumnya, yang dimungkinkan terjadi melalui generasi dan kontrol informasi, dan perkembangan dalam komunikasi dan transportasi ditambah dengan bentuk-bentuk kontrol pengawasan terhadap 'penyimpangan' dalam berbagai cara beberapa hal tersebut cukup banyak dipengaruhi oleh ekspansi kapitalisme, meskipun sekali lagi semuanya tidak bisa direduksi atau dihubungkan dengan kapitalisme ketika mereka muncul. Dalam mendorong pengembangan suatu sistem kelas yang tidak didasarkan pada kontrol langsung alat-alat kekerasan demi kepentingan kelas dominan, dimana kekerasan tidak dimasukkan dalam kontrak kerja, munculnya kapitalisme justru menegaskan beberapa *trend* penting di negara modern. Keberhasilan monopoli kontrol alat-alat kekerasan di tangan otoritas negara merupakan wajah lain pengawasan di tempat kerja dan kontrol terhadap 'peyimpangan'.

Ketika terbentuk seperti ini, dalam konteks sistem negara, negara-bangsa semakin menjadi bentuk organisasi politik yang paling unggul. Pengontrolan terhadap alat-alat kekerasan menjadi terikat dengan peran angkatan bersenjata profesional, dalam kerangka industrialisasi perang, sementara sistem integrasi menjadi sangat bergantung pada pengawasan. Perkembangan terakhir ini, tentu saja, tidak membuat pengontrolan alat-alat kekerasan menjadi sesuatu yang tidak penting, terutama jika melihat hubungan yang erat antara industrialisme dan perang. Namun demikian, potensi kekuasaan militer karena itu menjadi terbatas, karena dalam suatu 'pemerintahan' negara modern terdapat spesialisasi administrasi dan partisipasi masyarakat dalam suatu dialektika kontrol yang sifat poliarkis.

Perubahan teknologi yang dirangsang oleh dinamisme energis perkembangan kapitalisme melibatkan proses transformasi dunia alami yang agak berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun, proses-proses semacam ini secara intrinsik lebih berhubungan dengan industrialisme daripada dengan kapitalisme. Walaupun di masyarakat suku maupun masyarakat, kelas manusia menganggap diri mereka memiliki 'kesinambungan * dengan alam, namun dengan hadirnya modernitas alam semakin dianggap sebagai instrumen pasif bagi pencapaian tujuan manusia. Akibatnya adalah terjadinya ribuan transmudasi lingkungan alam berdasarkan teknologi yang jauh berbeda dengan apa yang bisa dilihat dalam

jenis-jenis masyarakat sebelumnya. Dalam masyarakat industri, dan kebanyakan masyarakat dunia yang dipengaruhi oleh industrialisme, manusia hidup dalam kreasi lingkungan yang berbeda dengan 'fakta' dunia alam. Urbanisme modern, yang sangat berbeda di hampir semua seginya dengan kota-kota dalam berbagai bentuk masyarakat awal, merupakan wujud paling nyata dan konsekuensial fenomena ini. Adalah keliru jika kita menganggap urbanisme modern sebagai '*built environment*' (lingkungan yang sudah terbentuk sebelumnya), sebagaimana yang dianggap oleh banyak sosiolog dan ahli geografi. Kota-kota tradisional juga merupakan '*built environment*' sehingga seolah-olah efek industrialisme terhadap kota hanya berhubungan dengan penyebaran fisik konstruksi tempat. Namun, kreasi lingkungan dalam urbanisme modern tidak terikat pada wilayah-wilayah di mana konstruksi-habitat manusia ada atau bukan merupakan persoalan terutama menyangkut penyebaran wilayah-wilayah tersebut. Sebaliknya, kreasi lingkungan dalam urbanisasi modern melibatkan transformasi yang tercipta akibat hubungan antara kebiasaan kehidupan sosial sehari-hari dan lingkungan pergaulan yang di dalam serta melaluinya kebiasaan tersebut ditata.

Dalam sistem poliarki yang diilhami oleh historisitas gerakan-gerakan sosial menjadi hal yang sangat penting. Kebanyakan negara-negara modern dalam beberapa hal terbentuk oleh gerakan politik baik yang mengakibatkan revolusi dengan bentuk organisasi yang ada sebelumnya, atau yang mengakibatkan

reformasi politik progresif yang condong pada kesimpulan yang sama. Melihat adanya keterkaitan antara asal-usul negara modern dengan kapitalisme, maka tidak mengherankan jika gerakan politik semacam ini, baik dalam fakta maupun dalam teori tentang gerakan politik yang ditawarkan para pengamat sosial, telah sangat menyatu dengan gerakan buruh. Dalam Marxisme khususnya, di mana peran pentingnya adalah perjuangan kelas, gerakan buruh dianggap kurang lebih sebagai pelopor tekanan-tekanan agar terjadi perubahan sosial dan politik yang dimulai oleh gerakan 'borjuis'. Namun, menurut analisa yang dikembangkan di sini, gerakan buruh merupakan satu diantara berbagai bentuk gerakan sosial lain yang berkembang di dalam negara-negara modern dan melampaui batas-batasnya.

Gerakan-gerakan yang berorientasi pada pengembangan kebebasan berbicara dan hak prerogatif berdemokrasi tidak berarti terbatas pada kelompok 'borjuis' yang pengaruhnya sangat kuat dalam fase-fase awal perkembangan negara modern. Marx tentu saja benar jika mengklaim bahwa cita-cita yang dianut oleh kelompok-kelompok wirausaha yang sedang naik daun terlalu bersifat ideologis dan cemoohan yang ia alamatkan pada mereka seringkali diperbenarkan. Namun 'hak borjuis' memiliki relevansi yang lebih bisa diterima dalam sistem poliarki modern dari pada apa yang cenderung ia tekankan dalam analisisnya. Gerakan yang berorientasi pada perluasan partisipasi demokrasi dalam politik seharusnya selalu dipandang — dalam

tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah, dengan berbagai percampuran tujuan lain — sebagai gerakan yang berorientasi pada perbaikan ketidakseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam pengawasan. Apa yang dimaksudkan dengan 'demokrasi' di sini harus dipahami sebagai 'demokrasi' yang terjadi di setiap persaingan yang diciptakan gerakan tersebut. Namun ada suatu kekurangan mendasar dalam tesis Michels dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa perluasan organisasi justru akan menggantikan 'demokrasi' dengan 'oligarki'. Intensifikasi pengawasan, yang menjadi landasan pengembangan organisasi di masyarakat modern dan di dalam sistem dunia secara keseluruhan, sebaliknya, merupakan *syarat munculnya kecenderungan dan tekanan terhadap partisipasi demokratis*. Dalam masing-masing aspeknya pengawasan memperbesar kemungkinan terjadinya konsolidasi kekuasaan di tangan kelas atau elit dominan. Namun, pada saat yang sama proses ini disertai oleh pengaruh-tandingan yang muncul dalam dialektika kontrol.

Gerakan perdamaian menjadi sangat penting di era yang berpotensi perang nuklir, tetapi adalah tidak benar jika kita memandang gerakan ini hanya sebatas pada era tersebut saja. Cita-cita menghaapuskan kekerasan sebagai bentuk pengaturan hubungan manusia mungkin sama tuanya dengan usia angkatan bersenjata yang berarti lebih tua ribuan tahun dari jaman modern. Cita-cita tersebut telah menjadi nilai-nilai penting setidaknya dalam beberapa agama besar

dunia dan, sejak kehadiran negara modern, gerakan-gerakan terkait yang dipengaruhi oleh simbolisme keagamaan. Gagasan tentang 'perdamaian', seperti gagasan 'demokrasi', harus dianggap sebagai tandingan konsep yang penting bagi jenis gerakan ini. 'Perdamaian' dalam konteks semacam ini mungkin tidak lebih dari tidak adanya perang, tetapi secara karakteristik kata ini memiliki makna yang kaya. Jadi, dalam Quakerisme, nilai-nilai perdamaian selalu terkait dengan konsep-konsep Kristianitas yang memiliki pandangan tentang harmoni hubungan manusia yang bebas dari penggunaan kekuatan fisik. Gerakan perdamaian di jaman nuklir memiliki tujuan yang lebih penting dari setiap agensi sosial sebanding di jaman lalu dan, karena itu, ada suatu unsur "taktis" dalam gerakan tersebut yang tidak ditegakkan dalam jenis gerakan sebelumnya. Namun demikian, gerakan-gerakan tersebut jelas sangat terkait dengan cita-cita aktivitas sosial harmonis yang bebas dari penggunaan kekerasan secara terorganisir. Gerakan yang dalam pengertian tertentu memiliki aspek perdamaian sebagai tujuannya secara analitis setidaknya harus dipisahkan dari gerakan yang menggunakan *pacifisme* (paham perdamaian) sebagai cara, meskipun pembagian dalam prakteknya selalu dilakukan dengan jelas. Beberapa gerakan sosial secara terbuka selalu menjadi gerakan 'tanpa kekerasan', yang mengelakkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan yang mereka perjuangkan. Tetapi perhatian mereka tidak selalu berorientasi

terutama pada pengurangan atau penghilangan pengaruh kekuatan bersenjata di dunia pada umumnya.

Dengan 'gerakan ekologi' yang saya maksudkan adalah gerakan yang berhubungan dengan pembentukan kembali kreasi lingkungan, yang dengan demikian berarti bahwa perhatian gerakan ini diberikan terutama pada pengaruh industrialisme di jaman modern.

Gerakan-gerakan semacam ini seringkali digali dari nilai-nilai tradisi yang sudah mapan, meskipun periode terpenting perkembangannya hanya terjadi di awal-awal abad sembilan belas. Gerakan yang ditujukan pada dampak industrialisme pada saat itu cenderung sangat dipengaruhi oleh Romantisisme dan pada umumnya terdapat orientasi 'melihat ke belakang' terhadap gerakan ekologi, karena orientasi mereka adalah pada perbaikan sikap terhadap dunia alam yang terkait dengan bentuk masyarakat pra-modern. Berdasarkan faktanya adanya pengaruh industrialisasi perang dan hubungan erat teknologi tenaga nuklir dengan apa yang terlibat dalam persenjataan nuklir, maka tidaklah mengherankan jika gerakan perdamaian dan gerakan ekologi menjadi saling tumpang tindih dalam tujuan dan keanggotaannya. Jadi, seperti yang diungkapkan dalam sebuah pernyataan, para pendukung 'gerakan hijau' dipersatukan oleh kecintaan mereka akan alam, penghargaan mereka akan sumber daya bumi, dan komitmen mereka terhadap harmoni ideal antara manusia dari Berbagai ras, warna kulit dan kepercayaan. Keyakinan fundamental ini

mengandung nilai-nilai lain: suatu rasa hormat atas sifat manusia yang halus; ketidaksukaan terhadap materialisme; kerelaan untuk membagi kesejahteraan dunia di antara semua penduduknya; keinginan akan keputusan terbuka untuk semua persoalan; dan pencarian kebenaran pribadi.

Banyaknya karakter dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih antara tipe-tipe gerakan sosial yang dikemukakan di sini, maupun konflik-konflik yang bisa terjadi antara mereka. Gerakan buruh terutama berasal dari bentuk 'kontrol pertahanan' di tempat kerja dalam keadaan dimana karyawan otoritas formal kurang atau tidak memenuhi hak-hak buruh. Apakah memperhatikan perbaikan kondisi ekonomi, pencapaian keselamatan kerja, atau hanya pada perolehan kekuasaan, gerakan-gerakan buruh sangat bertentangan dengan tujuan dari tiga jenis gerakan lain. Perbaikan kesejahteraan buruh di sektor industri tertentu membuat mereka mendukung kebijakan-kebijakan yang menentang apa yang dianggap perlu oleh gerakan lain untuk melindungi alam. Demikian pula, tujuan-tujuan ekologis hanya bisa diwujudkan dengan menghalangi atau menghambat tujuan-tujuan yang diperjuangkan gerakan buruh. Gerakan ekologi cenderung menjadi 'budaya-tanding' dalam pengertian bahwa gerakan tersebut mempertanyakan basis organisasi dan teknologi yang dominan dalam masyarakat modern. Orientasi semacam ini dalam keadaan tertentu justru menempatkan mereka pada posisi yang bertentangan

dengan gerakan kebebasan mengeluarkan pendapat atau gerakan demokratis, karena gerakan demokratis memperjuangkan pengembangan prosedur partisipasi organisasi dalam sistem politik. Keterkaitan penting antara gerakan perdamaian dan ekologi di jaman sekarang seharusnya tidak mengaburkan fakta bahwa juga terdapat berbagai konflik potensial dan aktual antara keduanya.

Makna penting dari berbagai tipe gerakan sosial yang disebutkan di atas secara alamiah akan sangat beragam berdasarkan keadaannya masing-masing. Namun, makna tersebut bisa dihubungkan dengan bentuk-bentuk klasifikasi negara yang ditawarkan sekaligus juga dengan berbagai pengaruh kapitalisme maupun industrialisme. Ciri dan tingkatan konflik kelas, dan perkembangan terkait dalam gerakan buruh, terutama dipengaruhi oleh tingkat ekspansi bentuk produksi kapitalistik tetapi juga dipengaruhi oleh bentuk negara. Gerakan buruh bisa saja menjadi fokus utama, meskipun bukan penting, terjadinya konflik di kebanyakan negara-negara pasca penjajahan, tetapi bisa juga berhubungan dengan, atau dibayang-bayangi oleh, gerakan kebebasan berpendapat/demokratis yang lebih berorientasi pada transformasi tatana politik. Di kebanyakan negara semacam ini, apakah mereka memiliki pemerintahan militer atau tidak, protes terhadap militer lebih banyak dilakukan oleh gerakan kebebasan berpendapat/demokratis dari pada oleh organisasi yang menyamar dalam gerakan perdamaian. Namun demikian, gerakan yang diarahkan pada tujuan

demokratis dalam hal tertentu diilhami oleh cita-cita harmoni nasional dan internasional dan oleh ‘budaya-tanding’ yang menentang dominasi kekuasaan teknologi. Namun ‘budaya-tanding’ di sini mungkin mendapatkan dukungannya dari nilai-nilai non-Barat dalam menentang nilai-nilai yang dianut oleh hegemoni budaya Barat. Di dalam semua masyarakat industri gerakan buruh cenderung memiliki basis peran organisasi untuk jenis protes sosial lainnya. Namun, bukan ini yang **menyebabkan** mengapa masyarakat negara sosialis merupakan ‘masyarakat kelas’ dalam pengertian yang sama dengan masyarakat kapitalis atau bahwa ciri gerakan buruh tidak banyak berubah di negara-negara kapitalis selama masa-masa ‘institusionalisasi konflik kelas’.

Interpretasi yang diberikan Touraine tentang ‘menurunnya’ gerakan buruh, jika dibandingkan dengan gerakan sosial lain, harus ditentang. Menurut Touraine, yang menentang banyak arus pemikiran yang digunakan pengamat lain, gerakan buruh berhubungan terutama dengan fase kapitalisme wira usaha. Gerakan buruh muncul sebagai oposisi terhadap kekuasaan modal swasta yang berusaha menciptakan pembagian hasil produksi yang lebih adil, tetapi cenderung menjadi kurang penting ketika masa perkembangan sosial di negara-negara industri menciptakan ‘masyarakat terprogram’, di mana koordinasi informasi menjadi medium utama kekuasaan. Jenis gerakan sosial lain semakin maju, dengan menggantikan gerakan buruh dari posisi pentingnya sebagai suatu

mekanisme protes sosial. Tulisan Touraine adalah tulisan penting karena tulisan tersebut menyimpang dari gagasan bahwa gerakan buruh merupakan sumber oposisi utama dalam masyarakat kapitalis. Pada saat yang sama, Touraine tidak mau mengalah pada pandangan bahwa 'menurunnya' gerakan tersebut disebabkan oleh proses umum menghilangnya sumber-sumber oposisi radikal dalam masyarakat tersebut. Namun, pandangannya mengabaikan fakta bahwa masyarakat kapitalis (atau negara-bangsa) sejak awal merupakan 'masyarakat terprogram' di mana di dalamnya pengawasan memainkan peran yang sangat penting. Dari sudut pandang yang saya ajukan di sini, gerakan buruh tetap bertahan sebagai gerakan penting dalam masyarakat kapitalis karena karakter kelas yang dimilikinya. Di sisi lain gerakan yang berorientasi pada pengawasan, yakni gerakan militer dan dampak kreasi lingkungan juga terkait dengan sifat-sifat kelembagaan masyarakat-masyarakat tersebut, sekaligus berhubungan dengan keterlibatan mereka dalam sistem dunia.

Ada banyak bentuk gerakan sosial yang tidak disebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya. Bererapa gerakan yang paling penting termasuk adalah sebagai berikut:

1. Gerakan nasionalis
2. Gerakan wanita
3. Gerakan etnis
4. Kebangkitan agama
5. Gerakan mahasiswa

6. Gerakan konsumen

Prinsip umum yang dikemukakan sebelumnya bahwa gerakan sosial modern muncul di 'arena historisitas' yang sama dengan organisasi yang mereka lawan, ingin mereka ubah dan bentuk juga berlaku untuk semua gerakan ini. Tetapi saya tidak berambisi untuk membuat penjelasan tentang asal-usul serta karakter gerakan sosial pada umumnya, saya hanya memberikan suatu 'peta konseptual' yang akan menghubungkan sumber-sumber protes sosial dengan tema utama yang dibahas dalam tulisan ini. Satu-satunya klaim yang ingin saya buat adalah bahwa setiap gerakan ini, dan gerakan lain yang tidak disebutkan di sini, bisa ditempatkan dalam peta ini. Untuk mengembangkan pandangan ini kita perlu menghubungkan pembahasan ini kembali pada isu tentang hak kewarganegaraan.

Ada empat bentuk 'kandungan' berbeda dalam perjuangan gerakan sosial modern. Gerakan yang diarahkan pada pengembangan prerogatif demokrasi memperjuangkan hak dan kewajiban seperti yang dikemukakan Marshall dalam membahas hak-hak politik. Dalam menghubungkan persaingan antara hak-hak sipil dengan gerakan perdamaian kita harus mengingat-ingat tentang apa yang dikonotasikan dengan 'perdamaian'. Gerakan perdamaian memperjuangkan hak-hak sipil selama tujuan gerakan tersebut adalah menentang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar manusia. Dalam hal ini, obyek tujuan mereka adalah generalisasi penggunaan

kekerasan demi kepentingan negara, termasuk represi polisi maupun peran militer dalam perang. Dalam segmen yang menghubungkan hak-hak politik dengan hak-hak hukum terdapat beberapa dilema perpolitikan modern yang paling penting dan paling sulit. Karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, pengoperasian pengawasan yang dijalankan oleh negara modern dalam beberapa aspek merupakan *sine qua non* dari realisasi hak-hak sipil; tetapi berkembangnya pengawasan justru menciptakan konteks di mana kedudukan hak-hak yang sebelumnya susah diperoleh semakin terancam.

Walaupun wilayah utama perjuangan gerakan buruh, meliputi hak-hak kewarganegaraan sipil, namun gerakan tersebut bisa memiliki dan telah memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian dan pemeliharaan hak-hak lain. Melihat karakter perkembangan kapitalis maka gerakan buruh akhirnya terpaksa tetap berkembang seperti itu. Jadi, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, dalam negara-negara kapitalis konflik kelas telah menjadi medium utama dalam pencapaian hak-hak politik maupun jenis hak-hak sipil tertentu. Namun, adalah cukup jelas bahwa tiga bidang yang saling bersaing ini mengalami ketegangan sekaligus persatuan antara satu dengan yang lainnya. Hak-hak pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya, misalnya, oleh kelompok lain bisa dengan mudah dianggap sebagai aspek-aspek yang bertentangan baik dengan hak-hak politik maupun hak-hak sipil.

Dalam menunjukkannya sebagai perintah moral

terhadap lapangan yang ingin dijadikan tempat bermain oleh gerakan ekologi atau gerakan budaya tanding, di sini saya tidak bermaksud mengklaim bahwa hak-hak kewarganegaraan ini tidak melibatkan pertimbangan moral. Pendapat saya adalah bahwa bentuk perhatian tanpa henti dalam gerakan semacam ini adalah kepedulian terhadap demoralisasi lingkungan kehidupan yang kehilangan makna moralnya akibat pengaruh teknologi atau akibat kreasi lingkungan pada umumnya, salah satu karakteristik modernitas yang semakin kurang dianalisa dalam literatur sosiologi maupun filsafat adalah hal ini dan mereka yang telah mengangkat isu ini telah melakukan hal yang sepenuhnya benar. Tetapi mereka masih belum benar ketika mengatakan, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan dari mereka bahwa kepedulian terhadap pemulihan “makna moral” merupakan kepedulian yang sama yang menimbulkan konflik kelas, walaupun terjadi tumpang tindih yang berarti antara satu sama lain gerakan yang terlibat di dalamnya, namun tidak ada suatu kesimpulan bahwa salah satu gerakan bisa menjelaskan gerakan yang lainnya.

Setelah membahas analisa hak kewarganegaraan Marshall sebelumnya, saya kemudian mengungkapkan bahwa hak-hak tersebut tidak perlu mengalami kemajuan, karena masing-masing hak telah menjadi landasan bagi perkembangan satu dengan yang lainnya; dan di sini saya hendak menekankan hal itu lagi. Di Inggris, yang menjadi konsentrasi pembahasan

Marshall, adalah benar jika mengatakan bahwa kemajuan itu ada. Tetapi hak-hak yang telah terbentuk dengan mantap tidak bisa diserang atau dihapuskan, dan sejarah negara lain di seluruh muka bumi telah cukup jelas menunjukkan bahwa kategori hak-hak kewarganegaraan membentuk arena perjuangan yang pada dasarnya independen. Selain itu, ciri dan bentuk realisasinya sangat beragam. Semua gerakan sosial sebagiannya terlibat dalam perjuangan terhadap isu-isu semacam ini dan dalam hal inilah skema yang dikembangkan di sini akan membantu menjelaskan beberapa gerakan yang disebutkan di atas. Ambil dua contoh dari daftar tersebut gerakan nasionalis dan gerakan perempuan. Gerakan nasionalis cenderung menempati ruang konseptual, yang biasanya menekankan pada perjuangan hak politik kaum minoritas di dalam suatu negara atau untuk kelompok-kelompok yang berusaha membentuk tatanan politik baru. Di atas segalanya, gerakan nasionalis selalu berorientasi pada perluasan partisipasi demokratis, agar bisa mendapatkan hak keterlibatan politis. Tetapi bagian yang lebih agresif dalam Janus nasionalis selalu cenderung melibatkan nilai-nilai yang ditempatkan jauh di bawah poros tengah sama dengan posisi etika 'anti-modernis'. Gerakan perempuan melibatkan berbagai ikatan sosial yang mundur setidaknya sampai abad sembilan belas. Bentuk-bentuk awalnya terutama berorientasi pada pencapaian hak politik dan ekonomi yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tujuan-tujuan tersebut masih belum banyak tercapai tetapi

dalam tujuan tersebut telah ditambahkan maksud-maksud lain.

Gerakan sosial merupakan ekspresi aktif' situs konflik atau perjuangan, tetapi tentu saja ketegangan yang berlangsung dalam masyarakat modern tidak terikat pada wilayah-wilayah tempat terjadinya agensi perubahan aktual atau potensial, dengan membatasi perhatian kita terhadap masyarakat industri, maka kita bisa memetakan tendensi krisis.

Masyarakat-masyarakat kapitalis dewasa ini merepresentasikan bentuk-bentuk kompromi kelas dalam hal organisasi ekonomi mereka. Ini berarti bahwa konflik kelas difokuskan melalui sistem tawar menawar industri yang termasuk hak untuk melakukan mogok kerja dan melalui "perjuangan kelas politik" dalam organisasi partai. Ia dianggap kompromi dalam pengertian bahwa kelas-kelas utamanya telah mencapai akomodasi satu dengan yang lainnya, meskipun kelas yang rapuh bisa terpengaruh dari dalam atau dari luar lingkup administrasi negara.

Karena masyarakat kapitalis adalah masyarakat kelas, maka ketegangan antara kelas selalu berpotensi menjadi pengganggu bagi sistem sosial yang lebih luas. Sistem kelas berjalan melalui pemisahan (bergerak) antara ekonomi dan politik, yang merupakan salah satu syarat dari demokrasi liberal sebagai suatu bentuk politik. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sistem demokrasi liberal, kecuali di Jepang dan Jerman, selalu ditemukan, dalam berbagai negara-bangsa tradisional. Karakteristik demokrasi liberal bukan saja meliputi

pemisahan antara ekonomi dan politik, tetapi pemisahan keduanya dari militer. Bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara benih wira usaha kapitalis dalam perekonomian nasional tertentu dan demokrasi liberal, bisa ditunjukkan dengan beberapa contoh. Hubungan antara keduanya secara historis didasarkan pada perubahan-perubahan yang kemudian menimbulkan keinginan untuk menghilangkan kekerasan dalam kontrak kerja, dengan mengesampingkan tidak saja kekuatan ekonomi dan politik tetapi juga kontrol negara terhadap alat-alat kekerasan dari keduanya.

Yang saya maksudkan dengan kemampuan memerintah (*governability*) dalam masyarakat sosialis adalah kemampuan otoritas negara mempertahankan kondisi kekuasaan yang stabil sejauh mana mungkin. “Memerintah” (*to govern*), seperti yang saya tekankan sebelumnya, tidak saja berarti “memegang kekuasaan” tetapi juga berarti mampu memobilisasi sumber daya secara sistematis melalui upaya mempengaruhi wilayah kehidupan pribadi masyarakat luas. Kemampuan memerintah dalam masyarakat modern bergantung terutama pada tingkat “integrasi organisasi” yang mampu ia capai. Konflik kelas merupakan salah satu ancaman bagi integrasi tersebut. Selama suatu masyarakat tetap menjadi sosialis, dalam pengertian yang telah saya rumuskan sebelumnya, konflik kelas akan selalu menjadi wabah di dalamnya. Kompromi kelas, yang dicapai melalui tersedianya formalisasi bentuk konflik industri ditambah dengan

kesejahteraan sosial yang diatur negara, cenderung didasarkan terutama pada “upaya tawar-menawar” antara kekuatan buruh, pengusaha dan negara. Pada gilirannya hal ini dalam beberapa hal penting bergantung pada pelaksanaan kinerja ekonomi yang memadai untuk mempertahankan tingkat kemakmuran bagi yang lebih kuat, yakni bagian angkatan kerja yang lebih bersatu. Karena itu benih-benih dalam “kompromi kelas” akan ditanamkan langsung pada kemampuan memerintah. Tetapi kita bisa dengan begitu saja menyimpulkan, seperti yang disimpulkan oleh kalangan ortodoks Marxis, bahwa perjuangan kelas merupakan satu-satunya masalah yang dihadapi pemerintah. Ia merupakan salah satu fenomena yang mempengaruhi kemampuan memerintah suatu fenomena penting tetapi yang tidak seharusnya menjadi yang paling mendasar.

Kemampuan memerintah di suatu negara modern menekankan pada keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mampu ia pertahankan, namun pada gilirannya hal ini hanya memiliki beberapa relevansi sepanjang pengawasan tersebut meliputi kontrol terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Apa yang penting di sini bukan terletak pada tingkat legitimasi yang bisa diperoleh suatu pemerintahan dari massa masyarakatnya, seperti sejauh mana pola-pola maupun perilaku sosial bisa ditempa oleh kebijakan negara. Dengan kata lain, sejauh mana suatu pemerintahan sungguh-sungguh “memerintah” tidak lebih banyak bergantung pada generalisasi

penerimaan akan membenaran kebijakannya dibanding bergantung pada penerimaan kebijakan tersebut dari hari ke hari. Namun, di sisi lain “pemerintah” bisa eksis jika ada hubungan “dua arah” antara program-program pemerintah dan “input perilaku” dari mereka yang diperintah. Hubungan semacam ini akan terancam jika sektor-sektor penting kekuatan buruh menolak kerja sama dalam perjuangan kelas, tetapi ancamannya bisa berasal dari sumber lain juga. Yang menjadi hal penting di sini bukan terletak pada kekecewaan langsung terhadap kebijakan negara penarikan legitimasi sebagaimana permusuhan atau ketidaksukaan terhadap pola-pola utama perilaku yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi modern. Jika “anomie” dimaknai sebagai generalisasi ketidakpuasan terhadap nilai-nilai kultural utama, yang kehilangan pegangannya dalam kehidupan sehari-hari individu-individu, maka ia bisa dipandang sebagai potensialitas umum di dalam masyarakat modern. Kita tidak memiliki alasan untuk berpendapat bahwa anomie merupakan ancaman yang lebih besar bagi kemampuan memerintah dari pada konflik kelas, tetapi jelas bahwa dalam tingkatan tertentu anomia disebabkan oleh hal-hal yang berlainan.

Adalah beralasan untuk berpendapat bahwa masyarakat kapitalis dan masyarakat negara sosialis mungkin diletakkan pada tempat berbeda dalam hal ikatan kelembagaannya. Jadi dalam negara-negara kapitalis “pembobotan” ketegangan yang mendasar bisa diletakkan sepanjang sebuah garis yang ditarik

dari kanan bawah menuju kiri atas, masalah-masalah dalam mempertahankan kompromi kelas terletak sangat dekat pada kesulitan-kesulitan dalam kemampuan memerintah, yang sebab-sebabnya sebagian berasal dari kondisi anomik yang bertahan dalam berbagai sektor masyarakat. Sejauh mana pemerintah berhasil mengatasi masalah-masalah ini pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat saling mempengaruhi dalam perjuangan kelas dan penarikan anomik dari pola-pola kelembagaan dominan.

Dalam negara-negara demokrasi liberal yang sudah mapan, selama “kompromi kelas” dipertahankan dengan cara wajar yang efektif, peran kekerasan dalam konstitusi internal tatanan sosial akan menjadi terbatas. Seperti di negara-negara industri, baik masyarakat kapitalis maupun sosial memiliki sekumpulan masalah yang sama menyangkut kemampuan memerintah yang disebabkan oleh ketidaksukaan anomik yang bisa memotivasi munculnya berbagai gerakan sosial yang berbeda. Namun, masyarakat negara sosialis tidak mengalami dinamika kelas yang sama dengan negara-negara kapitalis. Tidak ada suatu kelas dominan yang karena dipisahkan dari mekanisme kekuasaan politik, mampu bernegosiasi baik dengan kalangan kelas bawah maupun dengan otoritas negara. Dalam “negara pekerja”, otoritas yang memerintah, dalam prinsip maupun dalam prakteknya, memiliki kekuasaan atas berbagai arena kehidupan ekonomi, dengan menterjemahkan pertikaian antara organisasi-

organisasi buruh menjadi konfrontasi langsung melawan negara. Jelas bahwa hal ini merupakan pengaruh utama terhadap kemampuan memerintah pada suatu negara, yang menunjukkan bahwa gerakan buruh barangkali merupakan sumber yang lebih berpotensi bagi terjadinya transformasi dalam negara sosialis dari pada dalam negara-negara Barat. Karena, dalam negara-negara sosialis, yang berbeda dengan negara kapitalis, tidak terdapat cara-cara mempertahankan “perjuangan ekonomi” yang berbeda dengan cara mempertahankan “perjuangan politik”. Berdasarkan keadaan ini, yang telah menimbulkan konflik-konflik besar di negara-negara Eropa Timur meskipun tidak terjadi di Uni Sovyet sendiri selama tiga dekade terakhir, kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam hubungan internal pemerintahan agak dibiarkan berkembang.

Abad dua puluh telah dibentuk dalam garis-garis perkembangan utamanya oleh Marxisme, tetapi pada saat yang sama juga menentang pemikiran Marx dalam beberapa hal tulisan-tulisan Marx tentang gagasan bahwa sejarah manusia membentuk kondisi bagi emansipasi kehidupan sosial dari bentuk-bentuk penindasan atau eksploitasi yang ada sebelumnya. Implikasi teleologis catatan sejarah Marx dalam beberapa hal tergolong ambigu, tetapi tidak bisa disangkal bahwa beberapa teleologi ini berkaitan dengan perkembangan sosial manusia. Menurut Marx, “manusia membuat teka-teki yang bisa ia pecahkan”. Perkembangan masyarakat manusia di masa lalu, yang

mengkulminasi dalam kapitalisme, telah menghasilkan suatu dunia di mana produksi industri mampu menciptakan kesejahteraan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dialami manusia sebelumnya. Sejak industrialisme muncul di dalam kerangka masyarakat kelas, hasil-hasil produksi, dalam bentuk “kehidupan yang baik”, telah diabaikan oleh mayoritas produsennya. Namun gerakan buruh segera memecahkan teka-teki sejarah tersebut, dan menjadi unggul melalui proses penyamaan diri yang mendorong perkembangan produksi kapitalis. Kemenangan kelas pekerja telah memanusiaikan kembali kondisi produksi, yang mengembalikan langkah kontrol terhadap proses produksi kepada para pekerja dan kelas-kelas yang tersisihkan. Karena itu lahirlah masyarakat dunia di mana produksi secara sadar ditata menurut kebutuhan manusia, dan bukan berdasarkan tuntutan wirausaha kapitalis.

Dalam beberapa segi skenario ini tidak begitu berbeda dengan realitas dari apa yang terjadi selama ratusan tahun lalu seperti yang dinilai oleh sebagian besar kritik Marx. Setidaknya di antara masyarakat-masyarakat industri, kapitalisme sekarang telah menjadi fenomena yang sangat berbeda dengan fenomena kapitalisme di abad sembilan belas dan gerakan buruh telah memainkan peran utama dalam mengubahnya. Di kebanyakan negara-negara kapitalis, sekarang kita harus berbicara tentang eksistensi “kapitalisme kesejahteraan” (*welfare capitalism*), suatu sistem di mana gerakan buruh telah menjadi

cukup kuat dan di mana hak-hak ekonomi warga negara telah semakin meningkat.

Beberapa dari antara usulan Marx yang tidak pernah dikaji secara rinci tentang bentuk masa depan dari suatu jenis tatanan sosial yang menembus kapitalisme sekarang kelihatan agak kurang memadai. Perencanaan produksi dalam perekonomian modern yang sangat kompleks, jika ia mempertimbangkan hal ini, terbukti justru membawa lebih banyak kesulitan dalam mencapai suatu bentuk efektif dari pada apa yang kelihatannya dimungkinkan terjadi di abad sembilas. Skema manajemen sendiri para pekerja telah menemui beberapa kesulitan dan jika, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa penerjemah, Marx meramalkan munculnya suatu perekonomian pasca kelangkaan yang mengglobal, maka tampaknya dewasa ini hal tersebut berada di luar batas-batas kemungkinan. Namun demikian, tampaknya ada kemungkinan jika kita mempertimbangkan suatu tatanan ekonomi di mana rencana produksi, yang disertai oleh manajemen sendiri yang bagus, yang bisa mengembalikan langkah kontrol terhadap proses kerja kepada mereka yang terlibat di dalamnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk kontrol terhadap alat-alat kekerasan. Marx mengungkapkan gagasan tentang masyarakat pekerja bersenjata sebagai keseimbangan tandingan bagi kekuasaan negara yang penuh kekerasan, tetapi gagasan semacam ini tampaknya telah kuno untuk jaman sekarang. Di negara-negara yang di dalamnya ditemukan sesuatu yang mendekati

situasi semacam ini, setidaknya dalam hal persenjataan ringan, seperti USA atau beberapa negara Amerika Latin, hasilnya tidak memuaskan. Di sisi lain, pembicaraan tentang pengembalian kontrol alat-alat kekerasan kepada masyarakat menjadi tidak berguna dalam jaman ketika terjadi pengembangan senjata untuk industrialisasi perang. Dalam segi agensi historis perubahan, tidak ada kesamaan dalam dunia persenjataan dengan kaum proletar di daerah industri. Tampaknya di sini tidak ada suatu lawan dialektis yang logis bagi akumulasi progresif kekuasaan militer. Gerakan protes dan gerakan perdamaian memang ada, tetapi bahkan dalam potret masa depan yang paling optimistik sekalipun hampir tidak bisa dipahami bahwa hal ini bisa disejajarkan dengan peran historis dunia yang Marx ramalkan untuk kelas pekerja.

Karena itu sekarang kita bisa mengatakan bahwa sejarah tidak memiliki teleologi, yang berbeda dengan maksud yang ditanamkan manusia dalam aksi-aksinya; dan bahwa bagian yang diramalkan akan dimainkan oleh kaum proletar dalam sejarah ternyata terlalu dilebih-lebihkan. Tetapi pengamatan semacam ini tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang diangkat. Akan jadi apa suatu “masyarakat yang baik” dalam kaitannya dengan kontrol alat-alat kekerasan? Makna apa yang bisa kita berikan pada “masyarakat” dalam frase ini, berdasarkan fakta bahwa dunia dibagi ke dalam negara bangsa yang berlipat ganda, yang semuanya memiliki kemampuan untuk menggunakan angkatan bersenjata yang memiliki kekuatan destruksi

yang cukup besar dan di mana beberapa negara benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan segenap manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan lebih banyak kesulitan, tentu saja, dari pada apa yang bisa dibahas di sini dan saya membatasi diri untuk menunjukkan kemungkinan pendekatan terhadap kesulitan-kesulitan tersebut.

Pendekatan semacam ini harus diterapkan pada masalah kekuasaan militer dan polisi dalam negara, dan dengan isu kekerasan antar negara di era industrialisasi perang. Dewasa ini negara-negara di seluruh dunia masyarakat yang cinta damai di beberapa daerah dan wilayah tertentu mulai menentang tentara yang memiliki senjata industri. Dalam situasi di mana menggunakan kekuatan polisi sangat represif ada sedikit atau tidak ada perbedaan antara polisi dan militer. Sejauh mana polisi terlibat dalam penggunaan kekerasan secara berlebihan terhadap berbagai aktivitas “menyimpang” akan bergantung pada definisi “penyimpangan” dalam masyarakat tersebut, dan bergantung pada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh keseluruhan organisasi dalam sistem kemasyarakatan. Salah satu unsur pentingnya adalah “penyimpangan” tertentu dianggap terkait dengan tindak kriminal, dengan tidak mempertimbangkan aksi politik. Tentu saja, di sini terjadi pergeseran sangat besar terhadap apa yang dianggap sebagai aktivitas “politik”. barangkali semua yang perlu diungkapkan dalam konteks ini adalah bahwa “ruang publik” debat politik harus dilakukan dengan cukup terbuka sehingga

terjadi pembagian yang tepat antara apa yang disebut aktivitas “politik” dan apa yang sebenarnya tergolong tindak “kriminal”.

Persoalan kekuasaan militer telah dibahas sebelumnya, meskipun dengan keberanian yang sungguh-sungguh. Potensialitas bagi pemerintahan militer di negara-negara modern termasuk masih relatif terbatas, jika “pemerintahan” di sini berarti penguasaan semua tanggung jawab untuk berkuasa. Adalah persoalan berbeda jika kita memperhatikan kemampuan militer untuk menerapkan sanksi berat kepada pemerintah atas gaya kebijakan tertentu yang dikeluarkan, atau dengan membatasi apa yang mereka lakukan dalam batasan yang jelas. Di sini pengaruh militer menjadi kuat di negara-bangsa berskala besar, dan dalam kasus-kasus di mana tidak mungkin menjamin bahwa kekuasaan militer tidak akan ikut campur sekalipun dalam demokrasi liberal yang paling stabil. Salah satu faktor yang mungkin penting adalah perlawanan terhadap penyebaran nilai-nilai militer, yakni faktor yang jelas menjadi inspirasi bersama dalam gerakan perdamaian dan ekologi. Apa yang membentuk “militerisme” bukanlah suatu konstanta, tetapi yang secara mendasar telah diubah oleh angkatan bersenjata sejak abad sembilan belas dan yang diubah oleh industrialisasi perang secara bersama. Nilai-nilai militer tradisional barangkali diterapkan dengan skala besar untuk terakhir kalinya ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Bahkan ketika nilai-nilai tersebut menjadi semakin tunduk terhadap tuntutan modern,

yakni profesionalisme tentara, di mana pameran kekuatan pribadi sudah tidak penting lagi jika dibandingkan dengan disiplin efektif di medan tempur dan produksi efisien dalam industri. “Militerisme” dewasa ini berarti lebih dari sekedar patuh demi kepentingan mereka yang memiliki eselon yang lebih tinggi dalam angkatan bersenjata dan demi kepentingan mereka di luar lingkaran militer yang selalu mengutamakan penyelesaian militer terhadap isu-isu yang bisa diselesaikan dengan cara lain, dan kesediaan kalangan bawah untuk menerima solusi tersebut tanpa mempertanyakannya. Disiplin militer tidak perlu menghalangi perkembangan kultur politik yang semakin canggih dalam angkatan bersenjata, dan perjuangan atas “keterbukaan” dalam hal ini harus dianggap sebagai satu unsur di setiap program politik yang ingin memerangi militerisme. Namun, ada isu kompleks yang terlibat dalam persoalan ini karena ada suatu hal yang masuk akal atas argumen bahwa adalah tentara a-politis yang profesional yang paling sedikit membawa pengaruh kekuasaan militer terhadap keputusan pemerintah.

Telah saya katakan sebelumnya bahwa, mungkin sama pentingnya dengan pertanyaan tentang peran militer dalam pemerintahan di negara modern, isu tersebut tidak terlalu penting dibandingkan dengan isu-isu tentang penyebaran persenjataan industri dalam tatanan militer. Dalam hal ini tidaklah diragukan lagi bahwa masalah yang kita hadapi di jaman sekarang sangat berbeda dengan masalah yang dihadapi

kebanyakan pemikir politik abad delapan belas dan sembilan belas. Kita tampaknya kehilangan tindakan--tindakan yang masuk akal yang bisa melakukan lebih dari sekedar membatasi ancaman yang lebih besar dari apa yang pernah dirasakan manusia dalam sejarahnya. Bahkan ketika senjata “ortodoks” telah memiliki potensi destruktif di jaman modern, maka tidak diragukan lagi bahwa kita harus mencari jalan lain untuk sama sekali mencegah setiap peristiwa perang, tetapi tugas paling penting dan paling dibutuhkan yang kita hadapi sekarang adalah pencegahan perang yang melibatkan persenjataan nuklir atau senjata lain yang tidak lama lagi akan menjadi senjata yang destruktif. Tidak satupun manusia yang hidup di jaman sekarang tidak mampu menyadari bahwa ada proses “dua langkah” yang harus kita hadapi dan masih belum jelas apakah atau bagaimana kemanusiaan merupakan langkah kedua yang harus dilakukan. Langkah pertamanya adalah langkah taktis langkah ini hanya menyangkut upaya mempertahankan situasi di mana seperti selama empat puluh tahun terakhir, senjata nuklir sudah tidak digunakan. Langkah kedua adalah implementasi teori politik normatif tentang alat-alat kekerasan penciptaan tatanan sosial di mana penggunaan kekuasaan militer tidak lagi mengancam eksistensi kita secara umum. Sejarah tidak memiliki teleologi dan sejarah hanya menjadi pengamat paling hebat yang dengan yakin menilai bahwa langkah kedua akan segera diambil.

Pemahaman terhadap perlunya sifat “taktis” dalam

menghadapi kemungkinan perang nuklir di jaman sekarang bisa diperdalam melalui rekapitulasi pengaruh perang terhadap perkembangan sistem negara Eropa dan sistem negara bangsa global. Berawal dari suatu tempat pada sekitar tahun 1000 M, perang di Eropa tidak lagi menjadi serangkaian perjuangan bersenjata yang tidak beraturan, yang perlahan-lahan menjadi bagian dari budaya perang aristokrat dan dilakukan dalam bentuk ritual. Dalam banyak pertempuran, meskipun bukan dalam pertempuran melawan musuh dari luar Eropa, terdapat pembatasan formal terhadap cara berperang, yang disaksikan oleh semua pihak yang bertikai. Keadaan ini diganti oleh suatu periode di mana seni dan ilmu berperang dikesampingkan dan ketika angkatan bersenjata dikoordinasi dalam tugas negara kuat baru. Periode ini bisa dianggap berawal dari abad sembilan belas sampai pecahnya Perang Dunia Pertama. Perang dan diplomasi menjadi berhubungan dengan sangat terpadu, di mana, menurut Clausewitz, perang dilakukan hanya jika langkah diplomatik gagal dilakukan. Bisa dikatakan juga bahwa Clausewitz ingin memisahkan perang dengan militerisme menurut makna tradisionalanya perjuangan perang sebagai nilai intrinsik, atau demi kebajikan yang bisa ditingkatkan lewat keterlibatan dalam pertikaian berdarah. Pandangan paling terkenal tentang sifat perang. Perang bukan semata-mata suatu taktik politik, tetapi juga merupakan alat politik sesungguhnya, suatu kesinambungan hubungan politik, perulangan hal yang sama dengan cara lain bukan

sebagai ekspresi filsafat para ksatria, tetapi suatu pengamatan tentang praktikalitas eksistensi negara dalam sistem negara Eropa.

Baik kemenangan militer atau polisi tidak berakhir di dalam dirinya masing-masing; keduanya merupakan instrumen untuk merealisasi kebijakan jangka panjang. Perang memiliki karakter yang terbentuk oleh maksud politik dan strategi utama yang diterapkannya adalah untuk mencapai jalan diplomatis dengan biaya militer terendah.

Meskipun realisasi untuk kebanyakan kebijakan yang terlibat dilakukan setelah munculnya fenomena ini, namun perkembangan cara memerangi industrialisasi perang di paruh berikut abad sembilan belas akhirnya mengubah sifat perang dan perannya dalam kaitannya dengan ambisi negara. Ini tidak berarti bahwa diktum Clausewitz menjadi tidak relevan segera setelah tentara bertempur. Tetapi perang tidak dilakukan secara terbatas, yang dibatasi oleh motif politik yang menggarisbawahinya. Era “perang total” jelas mengabaikan pandangan ini, seperti yang terjadi di era lain yang oleh Clausewitz dianggap sebagai sifat perang. Sebelum abad sembilan belas pihak-pihak yang bertikai telah menerima, dan telah dijadikan bagian dari hukum internasional, bahwa perang merupakan konflik antara entitas politik, di mana individu yang terlibat di dalamnya hanya menghilangkan status sipilnya untuk menjadi agen negara. Tetapi ketika munculnya perang industri, massa masyarakat akhirnya ikut terlibat, dengan kemenangan yang diraih

harus diganti dengan hancurnya sistem produksi yang menjadi landasan penting perang tersebut, selama Perang Dunia Pertama implikasi semacam ini perlahan-lahan direalisasikan oleh para partisipan perang, meskipun generalisasi perang kepada seluruh masyarakat negara-negara yang bertikai hanya terjadi selama Perang Dunia Kedua. Tujuan upaya militer dalam Perang Dunia Kedua bukan saja untuk mengatasi kekuatan militer pihak lawannya, tetapi juga menghancurkan massa masyarakat musuhnya.

Selama masa-masa antara kedua Perang Dunia tersebut berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para politisi di level internasional. Pelarangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas. Juga termasuk proposal bagi aturan internasional yang mengatur penggunaan senjata dan pembatasan penggunaan angkatan udara. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti penggunaan gas, semua larangan ini dibatalkan. Dalam bagian pembukaan Perang Dunia Kedua kedua pihak yang bertikai berusaha menjamin bahwa serangan udara hanya dibatasi pada sasaran industri yang secara langsung berkaitan dengan produksi militer. Tetapi walaupun hal ini secara teknis nampaknya mungkin dilakukan, tetapi dalam prakteknya tidak demikian, di mana pemboman terhadap warga sipil telah dengan pesat menjadi cara utama mengalahkan lawan. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tidak lebih sekaligus tidak kurang dari pemusatan aplikasi teror, yang dirancang untuk mengejutkan Jepang agar menyerah. Tujuan ini

tercapai, tetapi langkah ini telah menjadi fase baru dalam kekerasan militer kekerasan militer yang telah menimbulkan skisma yang lebih dramatis terhadap bentuk konflik militer sebelumnya dari pada skisma yang diberikan dalam fase-fase awal pengembangan perang industri.

Eksistensi senjata nuklir merupakan perkembangan langsung integrasi industri dan bentuk pelaksanaan perang, tetapi skala kemampuan destruktifnya begitu besar sehingga ancaman untuk menggunakannya bisa mengubah sifat perang. Dalam kasus kekuatan nuklir, terutama yang adi daya, hubungan diplomasi yang telah terbentuk tidak retak, tetapi dibalikkan. Negara-negara ini tidak bisa menggunakan kepemilikan senjata nuklir mereka untuk memperjuangkan tujuan-tujuan diplomatisnya tetapi manuver diplomasi bermaksud untuk menjamin bahwa situasi perang tidak akan melibatkan senjata nuklir tersebut. Ini terjadi khususnya jika negara adi daya saling berseteru secara langsung, keberhasilan diplomasi krisis rudal Kuba, misalnya, lebih bermakna karena tidak terjadi pertikaian militer daripada ketika Kenedy mencapai tujuan awalnya (yang sesungguhnya mengandung perintah yang sama) mencegah masuknya rudal Sovyet ke Kuba. Sayangnya, walaupun keberadaan senjata nuklir justru mengubah sifat hubungan antara tawar menawar diplomatik dan perang, namun hal ini tidak berlaku dalam diplomasi, atau dalam sifat strategis hubungan antara negara- negara di suatu dunia yang saling bergantung yang pada saat yang sama juga

mengalami kehancuran dan kekacauan. Berdasarkan sifat sistem negara-bangsa, aktivitas politik di dalam dan atas nama negara cenderung berkaitan dengan kepentingan jangka pendek dari pada kepentingan jangka panjang dan akan memperjuangkan kepentingan bersama hanya jika pencapaian jangka pendek telah dicapai oleh masing-masing negara.

Selain itu, adalah jelas bahwa keberadaan persenjataan nuklir dalam skala besar di negara adi daya tidak akan mengakhiri dinamika proses perubahan teknis yang dipengaruhi oleh kombinasi pengembangan ilmu, industri dan persenjataan. Perlombaan senjata telah menjadi bagian inheren baik bagi masa damai maupun masa perang karena koordinasi produksi industri dan alat untuk memerangi sejak awal telah menjadi basis kekuatan militer di jaman modern. Salah satu contoh paling jelas di abad sembilan belas adalah konflik antara Inggris dan Jerman, yang mana masing-masing pihak menggunakan produksi senjatanya untuk mengancam satu dengan yang lain. Seperti dalam perlombaan senjata di jaman sekarang, perusahaan industri terdorong, setidaknya dalam sektor tertentu, oleh tekanan yang ditimbulkan dalam kompetisi persenjataan.

Validitas apa yang terkandung di dalamnya bisa ditemukan pada gagasan “kompleks industri militer” yang berasal dari unsur koordinasi perencanaan ke depan yang terjadi dalam persaingan militer antara negara-negara adi daya. Keteraturan inovasi, dan

dorongan untuk melakukan produksi industri, tidak hanya berasal dari proses inovasi teknologi dalam ekonomi secara keseluruhan tetapi dari upaya berkesinambungan untuk merespon apa yang dilakukan pihak lawan dan kemajuan apa yang akan mereka lakukan. Perlombaan senjata bukan merupakan diplomasi keseimbangan kekuasaan yang diterapkan pada pengembangan senjata di tempat yang bipolar. Jika telah tercapai keseimbangan tertentu, maka keseimbangan tersebut bersifat tidak stabil dan goyah karena logika kemajuan teknis bukanlah semata-mata pencapaian keseimbangan dengan kekuatan lain, tetapi kemampuan untuk mengadaptasikan produksi senjata dengan inovasi masa depan yang ditargetkan. Dalam situasi di mana terjadi “keseimbangan bergerak” (*mobile equilibrium*) tidak ada satu titik di mana keseluruhan keterikatan terhadap kemajuan teknologi lebih jauh dalam pengembangan senjata, atau bahkan keinginan untuk berhenti sejenak agar bisa mengakumulasi persenjataan yang ada, tidak akan cenderung untuk menguntungkan salah satu pihak di atas yang lainnya. Salah satu contohnya adalah usulan Amerika untuk mengontrol persenjataan, Baruch Plan 1946, telah membuat senjata nuklir berada di bawah pengawasan internasional. Tetapi Uni Sovyet, yang pada saat itu belum meledakkan peralatan nuklir, mendapatkan kerugian yang lebih besar dibanding USA, yang mampu mendominasi badan pengawasan. Sovyet membuat usulan tandingan untuk melakukan pelucutan senjata berdasarkan kontrol internasional

dan penetapan zona bebas nuklir bersamaan dengan beberapa pakta non-agresi. Namun, situasi semacam ini telah lebih menguntungkan Sovyet dibandingkan lawannya, karena ketentuan tersebut mengatur tentara non-nuklir dalam jumlah yang lebih besar. Keberhasilan yang dicapai hanya terjadi dalam situasi di mana keduanya berdiri bersama untuk mencapai tujuan jangka pendek atau menengah tertentu, seperti dalam *Non-proliferation treaty*, dan perjanjian SALT. Perjanjian pertama dibentuk untuk memeriksa penyebaran senjata nuklir kepada negara yang belum memilikinya dan perjanjian SALT barangkali sesungguhnya telah merumuskan sifat kompetitif dalam perlombaan senjata dari pada berusaha menentang pelaksanaannya.

Walaupun pengembangan senjata secara besar-besaran demi kepentingan negara adi daya harus dimasukkan dalam setiap analisa kekuasaan militer di jaman nuklir, pengembangan alat-alat perang industri, melalui tatanan militer dunia, tidak lagi merupakan sesuatu yang terlepas begitu saja dari pusat-pusat utama perlombaan senjata. Difusi persenjataan “Perang Dunia” kepada seluruh negara dengan sendirinya telah melibatkan diri di dalam perlombaan senjata secara umum, terutama dalam hubungan antara negara di wilayah-wilayah yang memiliki ketegangan tinggi. Logika yang sama yang mendorong kompetisi persenjataan dalam bidang ini seperti dalam perlombaan senjata nuklir dan beberapa bagian yang diperjuangkan dengan transfer militer yang dilakukan

oleh negara adi daya dan negara lain yang memiliki industri persenjataan yang maju. Ini berarti bahwa negara-negara saingan mengejar apa yang ingin dimiliki negara lawannya di masa depan dan walaupun sebagian besar negara tersebut mungkin sangat bergantung pada kemajuan teknologi dalam pembuatan senjata di negara industri, tetapi semakin banyak jumlah negara yang akan membangun industri persenjataan sendiri. Yang paling mengganggu dari hal ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah penyebaran teknologi dan bahan mentah untuk penggunaan nuklir secara ‘damai’ bisa saja mengakibatkan terjadinya ekspansi persenjataan nuklir walaupun telah ada perjanjian yang melarangnya.

Teori politik normatif tentang kontrol alat-alat kekerasan di jaman sekarang tidak bisa melakukan hal lain selain memulainya dari pesimisme Camus, yang selanjutnya berusaha mengembangkan setidaknya beberapa panduan akan kemungkinan yang lebih optimistik di masa depan. Daya tarik pemikiran Marxis, yang berbeda dengan “sosialisme utopia” yang diserang Marx dan Hegel dengan keras di abad sembilan belas, adalah bahwa munculnya tatanan sosialis baru bukanlah suatu mimpi belaka, tetapi merupakan hal yang selalu ada dalam sifat perkembangan kapitalis. Dialektika semacam itu tidak bisa kita gunakan lagi di jaman sekarang tetapi kita harus melakukan pembaharuan terhadap utopianisme, yang tergabung dengan bentuk realisme yang paling kuat. Taktik-taktik (a) hidup di hadapan kemampuan

destruktif global yang dimiliki negara-negara adi daya dan (b) meminimalan kemungkinan terjadinya perang nuklir yang melibatkan negara-negara lain, harus menjadi prioritas utama. Tetapi perdamaian dalam konteks (a) dan (b) bukan merupakan jalan yang konstruktif bagi perkembangan masa depan yang tidak terbatas, yang harus dikaitkan dengan konsepsi ‘*good society*’ tanpa memperdulikan seberapa jauh kemungkinan yang bisa kita capai sekarang.

Beberapa parameter debat tampaknya jelas dan tidak dapat diperdebatkan kembali. Pengetahuan ilmiah yang memungkinkan terciptanya senjata nuklir tidak bisa dihilangkan. Demikian pula tidak agensi internasional atau program bersama yang mampu membujuk negara-negara adi daya untuk menghancurkan senjata nuklir mereka. Gerakan perdamaian, bersamaan dengan pemerintah negara lain bisa berpotensi untuk mempengaruhi aspek-aspek kunci dalam tatanan militer dunia serta perlombaan senjata. Tujuan fase taktis pemfasilitasan “perdamaian” yang di sini berarti tidak adanya perang nuklir tampaknya sederhana, sekalipun kekuatan yang digunakan untuk mencapainya terlalu kecil jika dibandingkan dengan kekuatan organisasi ekonomi, politik dan militer yang akan dilawan. Tujuannya adalah: promosi gencatan senjata antara negara adi daya dalam konteks mengamankan kemungkinan keterbukaan komunikasi dan arus informasi antara negara-negara tersebut; promosi program pergantian industri persenjataan, menghentikan produksi sistem

persenjataan, melakukan riset dan pengembangan agar bisa dimanfaatkan untuk kegunaan lain; melakukan pelembagaan pengendalian transfer teknologi dan material tenaga nuklir kepada negara-negara non-nuklir, bersamaan dengan pengembalian program tenaga nuklir di semua negara yang padanya pernah diterapkan tenaga nuklir, demi kepentingan sumber daya non-nuklir; dan pelarangan unilateral terhadap senjata nuklir oleh negara-negara nuklir kecil. Tidak masuk akal nya usulan tersebut untuk segera dipadatkan dalam jangka pendek, atau jangka menengah, menunjukkan bahwa Camus tidak melebih-lebihkan kasusnya.

Akhirnya, untuk Indonesia yang merupakan negara bangsa dengan pelbagai kultur di dalamnya, diperlukan pendekatan khusus untuk memahami ideologi Pancasila. Filsafat multikultural menawarkan pendekatan yang menarik. Negara bangsa yang multikultural dipahami sebagai kemajemukan yang tidak mungkin dibuat monistik. Menghilangkan multikultur artinya menghapus negara bangsa berdasar Pancasila.

*)Resitasi bersumber Anthony Giddens, *The Nation-State and Violence*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1985.

DAFTAR REFERENSI

Fay, Brian, *Contemporary Philosophy of Social Science. A Multicultural Approach*, Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 1996.

Giddens, Anthony, *The Nation-State and Violence*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1985.

Rabuska, Alvin and Shepsle, Kenneth A, *Politics in Plural Societies. A Theory of Democratic Instability*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.

Wibisono, Koento, *Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pendidikan Pancasila*, Ditjen Dikti Depdiknas, 2002.

RIWAYAT HIDUP

Thomas Santoso, lahir di Bandung, 6 September 1959. Lulus dari Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 1984. Pada tahun 1994 lulus *Cum Laude* dari Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Terpilih sebagai wisudawan terbaik Universitas Airlangga tahun 1994. Lulus Doktor Ilmu Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun 2002. Saat ini menjadi dosen (Guru Besar) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Kristen Petra. Beberapa buku yang pernah ditulis, antara lain, *Ilmu Budaya Besar* (Penerbit UK Petra, 1985); *Ilmu Sosial Dasar* (Penerbit UK Petra, 1985); *Beginikah Kemerdekaan Kita?* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., Penerbit FKKS-FKKI, 1997); *The Church and Human Rights in Indonesia* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., SCCF-ICCF, 1997); *Ilmu Budaya Dasar* (bersama Dr. L. Dyson, M.A, Penerbit Citra Media, 1997); *Panggilan Dan Tanggungjawab Menghadapi Masa Depan Bersama* (Anggota Tim Penyusun Buku Putih PGI, 1997); *Jangan Menjual Kebenaran* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., Penerbit FKKI, 1998); *Sosiologi dan Politik* (Penerbit UK Petra, 1998); *Supplement The Church and Human Rights in Indonesia* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., SCCF-ICCF, 2001); *Indonesia Di Persimpangan Kekuasaan. Dominasi Kekerasan Atas Dialog Publik.* (Editor bersama Dr.med. Paul Tahalele,

DSB/T. dan Drs. Frans Parera, The Go-East Institute, 2001); *Etnometodologi dan Beberapa Kasus Penelitian Sosial* (dalam Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, 2001); *Teori-Teori Kekerasan* (Penerbit Ghalia, 2002); *Kekerasan Agama Tanpa Agama* (Penerbit Pustaka Utan Kayu, 2002); *Orang Madura dan Orang Peranakan Tionghoa* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2002); *Juragan dan Bandol* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2002); *Mobilisasi Massa* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2003); *Peristiwa Sepuluh-Sepuluh* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2003); *Kebebasan Beragama : Bunga Rampai Kehidupan Berbangsa* (Pusat Studi Etika dan Sosio Religiositas UK Petra, 2015). *Meneropong Kekerasan Politik Agama di Indonesia* (Pustaka Saga, 2016), *Konflik & Perdamaian* (Pustaka Saga, 2019), *Memahami Modal Sosial* (Pustaka Saga, 2020), *Virtual Capital* (Pustaka Saga, 2021), *Pasang Surut Nasionalisme*, (Pustaka Saga, 2021), *Political-Religious Violence In Indonesia* (Pustaka Saga, 2021), *Dekonstruksi Kekerasan Politik dan Kriminalitas*, dalam Doddy Sumbodo Singgih (Editor), *Merajut Pemikiran Sosiologi Kontemporer Dari Tahun 1976-2021*, Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2021; *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pustaka Saga, 2022); *Etika Bisnis* (Pustaka Saga, 2022).

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dikaji dari aspek filosofi, ideologi, maupun moral masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat dibahas untuk lebih memahami kondisi internal masyarakat Indonesia. Konsep negara-bangsa dikemukakan untuk melihat prospek Indonesia di tengah konstelasi negara-bangsa di dunia.



Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima no 4A
Surabaya 60129
saga.penerbit@gmail.com
www.pustakasaga.id

ISBN 979-623-7862-51

